

Laporan Nasional Sport Development Index Tahun 2021

Olahraga Untuk Investasi Pembangunan Manusia



Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Tim Penyusun Laporan Sport Development Index 2021

Penanggung Jawab	Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainudin Amali
Penasehat	Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Jonni Madrizar
Ketua	Deputi Pembudayaan Olahraga R. Isnanta
Wakil Ketua	Asdep Kemitraan dan Penghargaan Olahraga Suyadi Pawiro
Tim Penulis	Prof. Toho Cholik Mutohir Prof. Rusli Lutan Prof. Ali Maksum Prof. Agus Kristiyanto Reesa Akbar, Ph. D
Editor	Prof. Ali Maksum
Sekretariat	Andi Rahman Dian Haerani Fitra Tri Apriliningtyas Edward Taufan P. Sriyanti Shani Ridzki M. Perdiyana

Sekretariat:

Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan
Jakarta Pusat 10270

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan SDI 2021 dapat diselesaikan sesuai harapan. Laporan ini disusun beriringan waktunya dengan upaya DPR bersama Pemerintah mengaggas revisi UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan mengonstruksi desain besar olahraga nasional. Ada kesadaran kolektif bahwa olahraga merupakan kebutuhan publik dan bermanfaat untuk mendinamisasi kehidupan yang lebih baik.

Perkembangan olahraga di level dunia sudah sedemikian jauh, terutama kontribusinya terhadap pembangunan, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, kesejahteraan psikis, dan sosial. Demikian juga, ukuran keberhasilan pun juga telah bergeser dari hal-hal yang bersifat instan seperti kemenangan menuju hal-hal yang bersifat jangka panjang seperti kesejahteraan fisik dan psikis. Karena itu, upaya perbaikan perlu terus-menerus dilakukan guna mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari aktivitas olahraga. Pada tahun 2003-2007, Kemenpora pernah mengimplementasikan sebuah ukuran keberhasilan pembangunan olahraga yang kemudian disebut dengan *Sport Development Index* (SDI). SDI mencakup empat dimensi, yakni ketersediaan SDM olahraga, ruang terbuka, partisipasi, dan kebugaran jasmani. Keempat dimensi tersebut kemudian disempurnakan menjadi 9 dimensi dengan menambah literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, performa, dan ekonomi.

Pengumpulan data SDI 2021 mencakup 34 Provinsi, 246 Kabupaten/Kota, 594 Kecamatan, 667 Desa/Kelurahan, dan 20.010 responden serta melibatkan 2.561 personil pengumpul data. Untuk menjamin kecepatan dan mutu data, manajemen data dioperasionalkan dengan berbasis elektronik, yang memungkinkan *input*, verifikasi, dan pelaporan data dilakukan dan dikendalikan melalui perangkat elektronik berbasis internet. Ada harapan besar bahwa data SDI bermanfaat bagi perbaikan pembangunan olahraga Indonesia ke depan, melalui intervensi berbasis data.

Kami menyadari bahwa tidak semua pihak setuju dengan argumen dan kesimpulan yang dikonstruksi dalam laporan ini. Namun, bagaimanapun, kami berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi sekaligus memberikan arah baru bagi pembangunan olahraga Indonesia ke depan. Akhirnya, kami tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, terutama dari Bappenas dan BPS yang telah berkenan menjadi teman diskusi dalam membahas program ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua.

Jakarta, 15 Desember 2021
Deputi Pembudayaan Olahraga
Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

Dr. Raden Isnanta, M. Pd

Ringkasan Eksekutif

Olahraga Untuk Investasi Pembangunan Manusia

Sejak Asian Games 1962 di Jakarta dan diamplifikasi oleh Kongres Internasional ICHPER 1973 di Bali, para pemimpin bangsa ini sudah sangat sadar bahwa olahraga merupakan investasi yang sangat strategis untuk membentuk manusia Indonesia ke depan. Ungkapan Bung Karno berulang kali terkait “nation and character building” dan “mengharapkan manusia Indonesia yang kuat, bukan loyo” merupakan visi besar membangun bangsa melalui olahraga. Dalam konteks internasional, pada tahun 2003 PBB telah menjadikan olahraga sebagai instrumen pembangunan dan perdamaian melalui resolusi 58/5. Nilai-nilai olahraga dianggap identik dengan nilai-nilai yang dipromosikan oleh PBB. Lebih jauh dari itu, olahraga digunakan sebagai *driving forces* dalam konteks MDGs dan SDGs. Spirit tersebut juga telah menjadi roh Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Karena itu, melalui laporan SDI 2021 ini kita ingin mengingatkan tujuan mulia tersebut.

Pembangunan olahraga harus memungkinkan setiap orang memiliki akses untuk melakukan aktivitas fisik yang bermutu guna mendapatkan manfaat kebugaran, kesehatan, kesejahteraan psikis, perkembangan personal, dan nilai tambah ekonomi. Pertanyaannya kemudian, bagaimana keberhasilan pembangunan olahraga di Indonesia? Sudahkah pembangunan olahraga mencapai tujuan-tujuan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas?

Laporan ini menyebutkan bahwa indeks SDI 2021 sebesar 0,408. Angka tersebut masuk kategori rendah dalam skala 0-1. Ibarat orang yang ingin menempuh suatu perjalanan mencapai tujuan, maka capaian pembangunan olahraga Indonesia belum sampai separuh perjalanan. Masih diperlukan kerja keras, kerja cerdas, dan strategi terarah untuk mencapai tujuan pembangunan keolahragaan. Dari 9 dimensi dalam SDI, dimensi SDM dan kebugaran capaiannya paling rendah. Rasio SDM olahraga dengan jumlah penduduk sebesar 1:3487 dan dari SDM yang tersedia, hanya 17% yang telah bersertifikat. Secara nasional, rerata vo_{2max} sebesar 26,35 ml/kg/min, pada laki-laki sebesar 28,68 ml/kg/min dan perempuan sebesar 23,98 ml/kg/min. Dari data yang ada, kebugaran dengan kategori kurang sekali sebesar 53,63%, kategori kurang sebanyak 22,68%, dan hanya 5,86% yang masuk kategori baik sekali dan unggul. Selain itu, angka prevalensi kelebihan berat badan (*overweight*) secara nasional sebesar 27%, pada laki-laki sebesar 20,3% dan pada perempuan sebesar 33,9%.

Rasio ruang terbuka olahraga dengan jumlah penduduk sebesar 1,78m², masih jauh dari standar kelayakan. Dari ruang terbuka yang ada, 86% berbentuk *outdoor* dan 14% berbentuk *indoor*. Dilihat dari status kepemilikan, 60% milik pemerintah, 16% milik swasta, dan 24% milik pribadi. Rasio anggaran olahraga Provinsi terhadap APBD 2020 sebesar 0,33%, lebih tinggi dibanding rasio anggaran Kemepora dengan APBN yang besarnya 0,067%. Indeks literasi fisik secara nasional sebesar 0,565. Artinya tingkat pencapaian literasi fisik sebesar 56%, berada pada batas bawah kategori sedang. Secara nasional, olahraga/aktivitas fisik dilakukan oleh 81,2% dari anggota masyarakat dan angka partisipasi aktif sebesar 32,83%. Ada kesenjangan tingkat partisipasi yang cukup lebar antara laki-laki (35,7%) dan perempuan (21,4%).

Indeks perkembangan personal masyarakat Indonesia sebesar 0,41, termasuk dalam kategori rendah. Capaian angka resilien sebesar 3,37 dan modal sosial sebesar 2,97 dari skala 1-5. Mereka yang berolahraga memiliki resilien dan modal sosial yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak berolahraga. Indeks kesehatan masyarakat Indonesia sebesar 0,41, masuk dalam kategori rendah. Koefisien kesehatan fisik sebesar 2,72 dan kesejahteraan psikis sebesar 2,66 pada

skala 1-5. Mereka yang berolahraga memiliki kesehatan fisik dan kesejahteraan psikis yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak berolahraga.

Secara nasional, indeks performa olahraga sebesar 0,385, masuk dalam kategori rendah. Terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara Provinsi di Jawa dan di luar Jawa dalam perolehan medali. Dari waktu ke waktu, dominasi Provinsi di Jawa sangat signifikan dalam perolehan medali. Ada korelasi kuat antara ketersediaan sumberdaya, terutama anggaran, dengan perolehan medali. Perlu ada perspektif baru dalam melihat prestasi olahraga sebagai sebuah *identity*, *regional identity* dan terlebih dalam konteks *national identity*.

Ada korelasi yang sangat kuat antara tingkat partisipasi dengan ekonomi olahraga. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam berolahraga, maka semakin tinggi pula belanja olahraga yang dapat dikapitalisasi. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat 56% atau sekitar 110,45 juta orang yang membelanjakan uangnya untuk kebutuhan olahraga dalam bentuk belanja barang, seperti pembelian sepatu dan pakaian, serta untuk belanja jasa olahraga seperti TV berbayar dan membayar pelatih. Besaran uang yang dibelanjakan berkisar antara <Rp200 ribu hingga >Rp5 juta per orang per tahun. Jika angka tersebut dihitung secara agregat, maka diperkirakan uang yang beredar secara nasional untuk belanja olahraga mencapai Rp 43,8 trilyun per tahun. Belanja barang olahraga sebagian besar atau 33,9% berupa sepatu olahraga, baru diikuti belanja pakaian olahraga sebesar 27,4%, dan belanja peralatan olahraga sebesar 13,2%. Sementara itu, untuk belanja jasa olahraga, prioritas pertama adalah biaya perjalanan yang mencapai 22,7%, baru kemudian diikuti belanja tiket pertandingan sebesar 20,4%, dan membayar tempat latihan sebesar 19,1%.

Laporan ini banyak menyajikan data keolahragaan dalam lingkup nasional yang mencakup 34 Provinsi, terutama yang terkait sembilan dimensi SDI. Data tersebut hendaknya digunakan sebagai dasar dalam menyusun program intervensi sesuai kebutuhan, urgensi, dan relevansinya. Dengan begitu, perbaikan dapat dilakukan karena memiliki *baseline* yang terukur. Laporan ini telah dapat membuktikan bahwa olahraga berdampak positif bagi kebugaran, kesehatan fisik, kesejahteraan psikis, resiliensi, dan modal sosial, yang merupakan bagian penting dari *human capital* melalui metode *cross-sectional*. Bukti empirik tersebut perlu diperkuat dengan rekayasa masyarakat dalam bentuk *community development* melalui eksperimen lapangan, dengan memasukkan aspek ekonomi sebagai variabel dampak. Meskipun laporan SDI 2021 disusun oleh Kemenpora, tetapi kebermanfaatannya tidak hanya terbatas pada kebutuhan internal Kemenpora, melainkan juga untuk kepentingan Kementerian/Lembaga lain terkait seperti Bappenas, Kemenkes, Kemendikbud, dan Kemendagri. Karena itu, diseminasi perlu dilakukan kepada mereka agar terjadi kesepahaman, sinergi, dan harmoni dalam merumuskan dan melaksanakan program-program keolahragaan dalam satu ayunan kebijakan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Bab 1 Olahraga dan Pembangunan Manusia	1
Olahraga dan Pembangunan Berkelanjutan	5
Olahraga Mempertinggi Kualitas Sumberdaya Manusia	7
Olahraga Untuk Semua	9
Olahraga dan Kesetaraan Jender	12
Pemberdayaan kepada Mereka yang Tertinggal	15
Kesimpulan	17
Bab 2 SDI, Kebijakan, dan Metodologi	18
SDI dan Perkembangan Terbaru	19
Evaluasi Kebijakan Olahraga.....	22
Intervensi Program Berbasis Data	25
Metodologi Pengkajian	27
Kesimpulan	33
Bab 3 Pilar Utama Pembangunan Olahraga	34
SDM Olahraga	34
Infrastruktur Olahraga.....	38
Anggaran.....	43
Kesimpulan	48
Bab 4 Literasi fisik, Partisipasi, dan Kebugaran	49
Literasi Fisik	51
Partisipasi dalam Olahraga	54
Kebugaran Jasmani	59
Kesimpulan	63
Bab 5 Olahraga dan Perkembangan Personal	65
Olahraga dan Resilien.....	67
Olahraga dan Modal Sosial.....	69
Kesimpulan	71
Bab 6 Olahraga dan Kesehatan	73
Olahraga dan Kesehatan Fisik	75

Obesitas, Penyakit Nonmenular, dan Beban Anggaran Kesehatan	78
Olahraga dan Kesejahteraan Psikis	81
Kesimpulan	83
Bab 7 Olahraga, Performa Tinggi, dan Identitas	85
Performa Tinggi dalam Olahraga.....	85
Prestasi dan Penguatan Identitas	89
Kesimpulan	92
Bab 8 Menggerakkan Ekonomi Melalui Olahraga.....	93
Potensi Ekonomi Olahraga Indonesia.....	96
Industri Barang dan Jasa Olahraga	100
Kesimpulan	104
Bab 9 Indeks SDI Nasional dan Rekomendasi Kebijakan	105
Indeks SDI Nasional	105
Rekomendasi Kebijakan	108
Referensi	109
Lampiran	117
1. SDI Menurut Provinsi.....	117
2. SDM Olahraga Menurut Provinsi.....	118
3. Ruang Terbuka Olahraga Menurut Provinsi.....	119
4. Literasi Fisik Menurut Provinsi	120
5. Tingkat Partisipasi Olahraga Menurut Provinsi	121
6. Tingkat Kebugaran Menurut Provinsi	122
7. Kesehatan Fisik dan Kesejahteraan Psikis Menurut Provinsi	123
8. Resilien dan Modal Sosial Menurut Provinsi.....	124
9. Capaian Olahraga Prestasi Menurut Provinsi.....	125
10. Ekonomi Olahraga Menurut Provinsi.....	126

Bab 1 Olahraga dan Pembangunan Manusia

Asesmen terhadap hasil pembangunan keolahragaan nasional tahun 2021 yang mencakup 9 dimensi dalam studi *Sport Development Index*, yang kemudian disingkat dengan SDI, pada dasarnya bertujuan untuk tidak sekedar menghimpun seperangkat data secara terpisah-pisah tetapi untuk tujuan memperoleh pemahaman yang bersifat integratif dan menyeluruh, tentang dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yang dikonsepsikan sebagai *output* pembangunan olahraga. Dimensi manusia seutuhnya tersebut mencakup seperangkat atribut bio-psiko-fisiologis dan sosio-ekonomi yang dikemas dalam konsep *human capital* sebagai sebuah investasi yang akan mendatangkan keuntungan dalam jangka panjang (Bailey, Cope, Parnell, & Reeves, 2016; Bailey, Hillman, Arent, & Petitpas, 2012). Karena itu, olahraga dipandang sebagai sumber daya dan sekaligus instrumen, yang tidak berhenti pada pencapaian tujuan dalam entitas olahraga itu sendiri, tetapi berpotensi untuk menciptakan perubahan multiaspek, mulai dari tingkat mikro seperti gen, sel, dan organ tubuh dengan fungsi fisiologis yang terintegrasi dalam sebuah sistem homeostatis yang kompleks, mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan paripurna, perkembangan keterampilan personal, hingga peningkatan produktivitas kerja dan ekonomi.

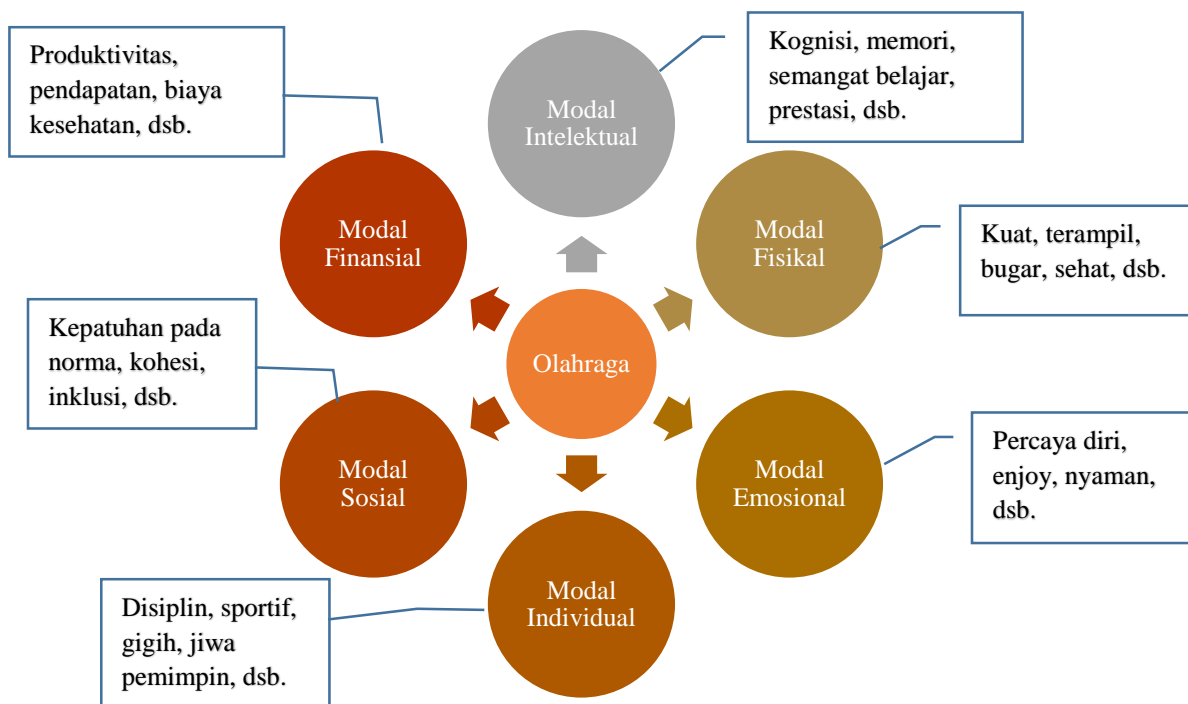
Paradigma semacam inilah yang dikembangkan negara-negara Skandinavia seperti Finlandia, Denmark, dan Norwegia dalam membangun olahraganya (Heinemann, 2003), yang mengarah pada negara kesejahteraan. Fungsi sosial olahraga mendapat pengakuan di tingkat politik tertinggi di sejumlah negara Eropa utara tersebut. Olahraga lebih dari sekadar kegiatan fisik dan permainan, tetapi bernilai ekonomi dan karakter nyata yang dialami oleh warga masyarakat. Olahraga pertama-tama adalah aktivitas yang membuat mereka merasa lebih baik, aktivitas yang menyatukan orang-orang dari kelas sosial, usia, jenis kelamin, dan negara yang berbeda. Dengan cara ini, olahraga mentransfer banyak nilai, yang memainkan peran sentral dalam kesuksesan kehidupan masyarakat, seperti kerja tim, prinsip *fair play*, integrasi sosial, dan gaya hidup sehat. Bagi mereka, olahraga saat ini merupakan gairah bagi jutaan orang di seluruh Uni Eropa. Tingkat partisipasi menjadi hal yang sangat esensial.

Rendahnya partisipasi dalam olahraga dan aktivitas jasmani membutuhkan strategi baru untuk mempromosikan peningkatan partisipasi dalam olahraga dan aktivitas jasmani mulai tataran kebijakan hingga implementasi di lapangan. Strategi yang dimaksud bertujuan untuk merealisasi kontribusi olahraga dan aktivitas jasmani pada umumnya terhadap pembentukan modal manusia

(Bailey et al., 2016). Dengan kata lain, penerapan konsep modal manusia melalui olahraga adalah bahwa olahraga merupakan sebuah investasi yang kelak mendatangkan *rate of returns* dalam jangka panjang. Konsep modal di sini merupakan bingkai dari seperangkat modal fisik, emosional, sosial, individual, intelektual, dan finansial (lihat gambar 1.1).

Penerapan konsep olahraga sebagai investasi pembentukan modal manusia agak terlambat dibandingkan dengan diskursus yang sama dalam bidang pendidikan. Namun demikian, konsep dasar yang pernah dikembangkan para ahli dalam pendidikan dapat diadopsi. Yang pertama dan utama adalah makna investasi itu sendiri. Investasi menunjukkan pemanfaatan *input* yang ada sekarang untuk memperoleh *output* yang lebih besar di masa yang akan datang. Istilah konsumsi menunjukkan pemakaian *input* yang habis begitu saja dalam sekejap. Perubahan dan peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai faktor konsekuensi dari pendidikan merupakan modal manusia.

Gambar 1.1. Kontribusi Olahraga dalam Pembangunan Manusia - Human Capital Model



Jika tujuan olahraga hanya sampai mendatangkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, yang secara psikologis dipahami masyarakat luas sebagai prestise, maka program pembinaan tersebut

termasuk dimensi konsumsi. Namun manakala perubahan yang dicapai melalui pembinaan olahraga yang terkelola dengan baik dan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja, menyumbang kepada kualitas hidup masyarakat yang lebih maju, maka yang menonjol di sini adalah dimensi investasi. Esensi investasi di sini adalah perolehan kembali nilai tambah yang lebih besar meski dalam konteks olahraga tidak sepenuhnya dinilai dengan ukuran finansial. Para bintang top dunia dalam olahraga, seperti Messi, Ronaldo, Tiger Wood, dan banyak lagi atlet profesional, *rate of return* yang diperoleh berupa peningkatan produktivitas atau pendapatan mereka sebagai hasil pelatihan bertahun-tahun, jam kerja minimal 10-12 tahun sejak pemula hingga mencapai puncak. Dalam konteks Indonesia, hadiah dan imbalan yang melimpah kini menjadi masalah baru, bukan tentang berapa gaji minimal dalam kasus pemain liga di Indonesia (masih ada di bawah UMR), tetapi berapa pantasnya batas gaji tertinggi yang menimbulkan reaksi dari kalangan profesional bahwa imbalan itu semuanya adalah hak pribadi.

Bentuk nilai tambah dari pembinaan olahraga dapat ditinjau dari konsep non-moneter yakni pemahaman pentingnya kebutuhan akan sumber daya manusia yang diartikan sebagai peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan, sehingga dari sudut pandang sosial dan ekonomi, pengertiannya adalah akumulasi modal manusia untuk kemajuan ekonomi.

Pentingnya penerapan konsep olahraga sebagai pembangunan modal manusia merupakan sebuah kerangka dari semua diskusi selama ini, yang dipandang terpilah-pilah, seperti yang banyak diperbincangkan adalah peranan kebugaran terkait kesehatan, diskursus nasional tentang obesitas, yang berimplikasi terhadap pentingnya olahraga dan aktivitas jasmani bagi anak-anak dan remaja. Hal ini tetap penting, tetapi program olahraga pendidikan di sekolah, misalnya, perlu dipandang sebagai sebuah investasi, kesempatan terbaik bagi pembekalan dasar-dasar literasi fisikal (kompetensi fisikal, pengetahuan, sikap, motivasi) agar kemudian terjadi “carry over effect” atau efek bawaan hasil pembinaan pada masa-masa hidup berikutnya untuk mendukung terciptanya gaya hidup aktif dan sehat di sepanjang hayat. Efek bawaan ini disinyalir rendah pada perguruan tinggi di AS (Keating et al., 2010), termasuk para mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia.

Relevansi fungsi olahraga untuk menciptakan perubahan terkait kesehatan dan kesejahteraan paripurna tersebut terkait kecerdasan fisikal yang sangat vital peranannya untuk mendukung kecerdasan konseptual, kecerdasan emotional, dan kecerdasan berinspirasi agar berhasil mengatasi tantangan dan masalah yang dibangkitkan oleh revolusi industri 4.0 (Schwab, 2017). Kecerdasan fisikal juga sangat kritikal peranannya untuk menghadapi situasi dewasa ini berupa akselerasi

tempo perubahan, meningkatnya kompleksitas, dan banyaknya kepentingan dalam pembuatan keputusan, dibutuhkan kebugaran dan kemampuan tetap tenang di bawah tekanan. Epigenetik, sebuah bidang biologi yang sedang berkembang pesat pada tahun-tahun terakhir ini, mengkaji proses bagaimana lingkungan mengubah genetika. Tidak terbantahkan pengaruh tidur, nutrisi yang sehat, dan olahraga dalam makna luas, termasuk aktivitas jasmani dan latihan ringan, berdampak positif terhadap bagaimana kita berpikir dan berperasaan, yang pada gilirannya berpengaruh langsung terhadap performa kerja.

Pemahaman tentang fungsi olahraga untuk membangun modal manusia sangat penting untuk menepis keraguan selama ini terhadap diskursus nasional yang bersifat fragmentaris seperti peringatan yang kurang digubris tentang tingginya prevalensi penyakit non-menular seperti jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus tipe 2. Pangkal penyebabnya adalah pola konsumsi yang tidak sehat dan seimbang (Kemenkes, 2018) yang diperparah oleh rendahnya partisipasi dalam olahraga (Maksum & Indahwati, 2021). Peningkatan pengeluaran biaya yang besar dalam kesehatan, misalnya dalam kasus BPJS, sangat jelas merupakan argumentasi kuat tentang kelemahan dari tindakan yang bersifat kuratif. Karena itu, dirasakan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan kerangka kerja yang koheren seperti tercakup dalam laporan ini sebagai informasi umpan balik untuk mengatasi sebagian dari masalah kesehatan.

Konferensi tingkat internasional berulang kali diselenggarakan dengan tema untuk membangkitkan kesadaran dan menggalakkan kampanye meluas tentang pentingnya olahraga dan/atau aktivitas jasmani sebagai bagian penting dari kebijakan publik. Asumsinya sangat sederhana yaitu berolahraga merupakan cara murah dan mudah bagi pencegahan penyakit non-menular (WHO, 2015). Bahkan kajian lainnya menyatakan bahwa kebugaran jasmani merupakan sumber daya paling efektif untuk mencegah penyakit kronis (Bailey et al., 2016). Semakin meyakinkan peranan pembangunan olahraga dan aktivitas jasmani dalam skala luas berdasarkan data pengaruhnya signifikan terhadap pembinaan kesehatan dan ekonomi secara umum.

Berdasarkan temuan ilmiah tersebut, aktivitas jasmani sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, dan bahkan tingkat partisipasi mereka merupakan prediktor yang signifikan terhadap derajat partisipasi mereka dalam olahraga dan aktivitas jasmani di masa-masa berikutnya. Para ahli sudah sering mengemukakan kriteria pelaksanaan olahraga atau aktivitas jasmani yaitu setidaknya 30 menit aktivitas jasmani dengan intensitas sedang dan setidaknya tiga kali seminggu

untuk memperoleh manfaat dari kegiatan itu. Sayangnya, banyak bukti menunjukkan bahwa tidak semua anak-anak dan remaja menghabiskan cukup waktu secara fisik. Kegiatan di depan layar komputer untuk memainkan *game* dan penggunaan gawai sudah sampai taraf kecanduan, yang tidak saja mengurangi aktivitas mereka secara fisik, tetapi ‘melukai’ otak, dan berakibat negatif terhadap kesehatan mental (Chan, Huo, Kelly, Leung, & Tisdale, 2022; Yin, 2020). Terjadi penurunan drastis kemampuan berempati, terisolasi secara sosial, dan kurang termotivasi.

Olahraga dan Pembangunan Berkelanjutan

Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi 58/5 tahun 2003, olahraga telah menjadi agenda penting bagi komunitas internasional dalam *platform* olahraga untuk pembangunan dan perdamaian (United Nations General Assembly, 2003). Olahraga diyakini sebagai instrumen yang efektif untuk mendinamisasi dan mempercepat pembangunan diberbagai bidang, mulai dari kesehatan, mental, sosial, politik, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Selaras dengan itu, PBB membentuk satuan tugas khusus yang disebut *Inter-Agency Task Force on Sport for Development and Peace* (Fenwick, 2005). Tim yang diisi oleh sejumlah ahli dari banyak negara tersebut telah menghasilkan dokumen penting, yang mengelaborasi bagaimana peran, kontribusi, dan strategi olahraga dalam rangka menyukseskan agenda internasional berupa *Millenium Development Goals* (MDGs). Agenda kemudian dilanjutkan dengan menetapkan tahun 2005 sebagai *International Year of Sport and Physical Education* (IYSP). Tujuan dari IYSPE adalah untuk mengkapitaliasi semua pemangku kepentingan olahraga dan menghadirkan bukti empirik bahwa olahraga dan pendidikan jasmani memiliki peran dalam pencapaian tujuan MDGs dan meningkatkan kehidupan manusia menjadi lebih baik, mengurangi kemiskinan, penyakit, atau konflik (United Nations, 2007a). Berbagai organisasi internasional dan nasional terlibat, mulai dari PBB, UNDP, WHO, IOC, federasi olahraga internasional, pemerintah, swasta, industri, lembaga swadaya masyarakat, dan perorangan. Berbagai agenda dan proyek diselenggarakan guna mengartikulasi tujuan tersebut. Kini, setelah era MDGs berakhir, PBB juga telah membentuk badan yang setingkat lebih tinggi dari sebelumnya, yakni *Office on Sport Development and Peace*. Institusi tersebut juga telah selesai menyusun dokumen yang berisi agenda dan strategi global terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama tujuan ketiga “health and well-being” yang terkait langsung dengan olahraga (Lynch, 2016; Sapkota & Neupane, 2020).

Pembangunan olahraga seharusnya berkontribusi terhadap penyelesaian masalah bangsa. Mengacu RPJMN 2020-2024, yang merupakan elaborasi dari program Nawacita, olahraga bisa berkontribusi dalam peningkatan sumberdaya manusia, terutama terkait dengan pengembangan kepribadian, kesehatan, dan produktivitas (Bappenas, 2019). Mutu SDM, termasuk di dalamnya kesehatan menjadi masalah krusial hari ini dan ke depan. Penyakit non-menular seperti hipertensi, diabetes, dan serangan jantung terus menjadi ancaman yang serius jika tidak dimitigasi dengan baik. Pola hidup yang tidak sehat, termasuk kurang gerak, dicurigai sebagai pemicu utama masalah ini. WHO menyebutkan bahwa penyakit nonmenular terus akan menjadi perhatian dunia melalui program SDGs seiring lemahnya komitmen global, baik dalam bentuk legislasi, anggaran, dan implementasi (Lynch, 2016; McInnes, 2018). Pada 2014, WHO melakukan survei global dan menurunkan laporan profil tiap negara terkait penyakit nonmenular. Untuk Indonesia, WHO mencatat bahwa penyakit nonmenular —seperti jantung, stroke, pernafasan akut, dan diabetes mellitus —menyebabkan kematian sebesar 71%. Tampaknya terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1995, angka kematian akibat penyakit nonmenular sebesar 41,7%, pada 2001 menjadi 49,9%, dan pada 2007 menjadi 59,5% (World Health Organization, 2018).

Dampak paling nyata terkait dengan masalah tersebut adalah membengkaknya anggaran BPJS kesehatan jauh di atas normal. Iuran peserta yang diterima BPJS kesehatan tidak bisa menutupi anggaran yang harus dikeluarkan untuk membiayai orang sakit sehingga cenderung terus merugi. Pada tahun 2019, BPJS kesehatan diperkirakan mengalami defisit anggaran sebesar 32 triliun (Rosana, 2019). Porsi penggunaan anggaran terbesar dikeluarkan untuk membiayai penyakit nonmenular, seperti jantung, ginjal, diabetes, dan stroke. Evaluasi 1 tahun pelaksanaan jaminan kesehatan nasional menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang sakit mencapai 65%, jauh melebihi standar normal 10-15% dari total penduduk (Noviani, 2015). Gaya hidup yang tidak sehat, ketidakseimbangan antara asupan makan dan energi yang dikeluarkan dapat menimbulkan kegemukan. Orang yang mengalami obesitas berpotensi mengalami penyakit kardiovaskuler, suatu penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah (Fuchs, 2015; C. J. Huang, Webb, Zourdos, & Acevedo, 2013). Kondisi yang demikian tentu sangat merugikan negara dalam jangka panjang.

Kini, komitmen internasional untuk menjadikan olahraga sebagai instrumen pembangunan multiaspek begitu kuat. PBB sebagai kumpulan negara-negara di dunia, termasuk struktur organisasi terkait seperti UNDP, WHO, UNICEF, UNHCR, dan UNESCO, melakukan kerjasama

saling menguntungkan dengan IOC dan federasi olahraga internasional dalam rangka membangun peradaban manusia yang lebih sehat, berkualitas, bermartabat, dan damai. Munculnya sejumlah dokumen seperti *Charter of Physical Education and Sport*, Resolusi PBB 58/5, kelompok kerja Sport & MDGs, dan badan kerja sport & SDGs merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai yang dipromosikan PBB, yakni perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, aturan hukum, dan pembangunan, sejalan dengan nilai-nilai olahraga. Bahkan jika ditelusuri lebih dalam, nilai-nilai olahraga juga selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang mengedepankan kebebasan, partisipasi, dan tanpa kekerasan (Balkin, 2017; Philp & Posada-Carbó, 2018).

Olahraga Mempertinggi Kualitas Sumberdaya Manusia

Bukti riset begitu banyak yang menegaskan dan sekaligus mengingatkan, betapa penting pembinaan literasi fisik yang mencakup motivasi, kepercayaan diri, kompetensi fisikal, pengetahuan, dan pemahaman untuk melakukan dan mempertahankan aktivitas jasmani di sepanjang hayat (Durdan-Myers, Green, & Whitehead, 2018). Bayi anak manusia yang lahir sempurna setelah selama 9 bulan dalam kandungan, sungguh sangat indah tata letak anatomis dan keserasiannya dengan fungsi fisiologis. Kehidupan berdasarkan sistem daur ulang amat cermat untuk menjaga homesostatis, yang dilengkapi pula dengan *deoxyribonucleic acid* (DNA). Sebagai cetak biru DNA menyimpan dan mengalihkan instruksi untuk diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya, seperti menentukan warna mata, tekstur rambut, kepekaan terhadap penyakit, dan bahkan sifat-sifat tertentu. Kesemuanya itu baru berupa potensi yang akan berkembang dan tumbuh optimal jika tidak dirangsang melalui pendidikan, termasuk olahraga. Maka usia 3-4 tahun merupakan fase yang sangat kritis bagi perkembangan motorik, yang jika tidak dididik dan dilatih maka anak akan mengalami hambatan motorik (Lutan, 1988).

Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik, termasuk didalamnya olahraga, akan meningkatkan aliran darah ke otak. Hal ini memungkinkan tubuh untuk membangun lebih banyak koneksi antara saraf di dalam otak. Aktivitas fisik dapat meningkatkan memori, merangsang kreativitas, dan membantu otak mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang lebih baik. Berpartisipasi dalam olahraga juga dapat menjaga konsentrasi dan keterampilan berpikir kritis tetap tajam, seiring bertambahnya usia (Bidzan-Bluma & Lipowska, 2018; Prakash, Voss, Erickson, & Kramer, 2015).

Penelitian pada anak-anak menemukan bahwa anak-anak praremaja yang lebih bugar dan lebih aktif menunjukkan volume ganglia hipokampus dan basal yang lebih besar, pola aktivitas otak yang lebih tinggi dan lebih efisien, dan kinerja kognitif dan pencapaian skolastik yang superior (Erickson, Hillman, & Kramer, 2015). Orang dewasa yang lebih bugar dan lebih aktif secara fisik menunjukkan volume hipokampus, korteks prefrontal, dan ganglia basal yang lebih besar, konektivitas otak fungsional yang lebih besar, aktivitas otak yang lebih efisien, dan fungsi eksekutif dan memori yang unggul.

Olahraga juga dapat mencegah atrofi otak dikaitkan dengan gangguan fungsi kognitif dan fungsi belajar (Yuki et al., 2012). Penelitian terhadap 381 pria dan 393 wanita yang telah berpartisipasi dalam survei awal dan survei lanjutan dengan durasi rata-rata 8,2 tahun menunjukkan bukti empirik yang signifikan. Pencitraan resonansi magnetik lobus frontal dan temporal dilakukan pada saat survei awal dan survei lanjutan. Aktivitas fisik harian dan pengeluaran energi total peserta dicatat pada awal dengan sensor akselerometri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pria dan wanita dengan total pengeluaran energi yang rendah berisiko mengalami perkembangan atrofi lobus frontal. Aktivitas fisik dan pengeluaran energi total merupakan prediktor signifikan dari perkembangan atrofi lobus frontal selama periode 8 tahun. Dengan demikian, mempromosikan partisipasi dalam olahraga akan bermanfaat untuk mencegah atrofi lobus frontal terkait usia dan untuk mencegah demensia.

Tujuan Aktivitas fisik (PA) diketahui meningkatkan fungsi kognitif dan otak, tetapi perdebatan terus berlanjut mengenai konsistensi dan besarnya efeknya, populasi dan domain kognitif yang paling terpengaruh, dan parameter yang diperlukan untuk mencapai peningkatan terbesar (misalnya, dosis). Metode Dalam tinjauan umum yang dilakukan sebagian untuk Pedoman Aktivitas Fisik Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan 2018 untuk Komite Penasihat Amerika,

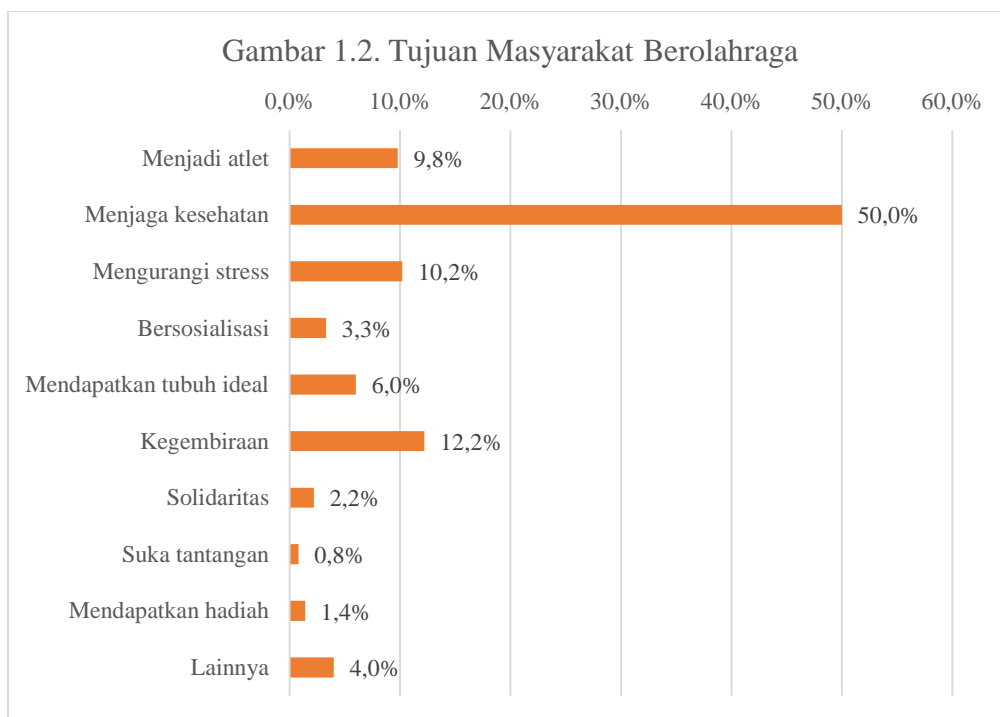
Penelitian di Amerika yang mencoba mengungkap dampak aktivitas fisik terhadap peningkatan hasil kognitif dan otak di seluruh rentang kehidupan, termasuk populasi yang mengalami disfungsi kognitif, membuktikan hasil yang meyakinkan (Erickson et al., 2019). Hasil uji coba terkontrol secara acak menunjukkan hubungan antara aktivitas fisik intensitas sedang hingga kuat dan peningkatan kognisi, termasuk kinerja pada prestasi akademik dan tes neuropsikologis, seperti mengukur kecepatan pemrosesan, memori, dan fungsi eksekutif. Bukti kuat menunjukkan bahwa aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga kuat memiliki manfaat

untuk kognisi selama periode pasca pemulihan. Selain itu, aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga berat dapat menurunkan risiko gangguan kognitif, termasuk penyakit Alzheimer. Penelitian tersebut sampai pada kesimpulan bahwa aktivitas fisik bermanfaat bagi fungsi kognitif selama periode awal dan akhir rentang kehidupan dan pada populasi tertentu yang ditandai dengan defisit kognitif.

Olahraga Untuk Semua

Olahraga telah menjadi bagian dari kepentingan publik. Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan bahwa setiap orang punya hak untuk melakukan olahraga dan pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi terwujudnya hak tersebut. Pesan tersebut juga diperkuat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan olahraga juga sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keberadaan Kemenpora di pusat dan Dispora di daerah dengan segala varian lembaganya membuktikan bahwa olahraga telah menjadi urusan publik dan karena itu harus dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebijakan publik. Salah satu prinsip mendasar dari kebijakan publik adalah memberikan akses dan layanan kepada semua orang tanpa diskriminasi. Pertanyaannya, apakah kebijakan olahraga yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Kemenpora dan Dispora telah mempertimbangkan kebutuhan semua anggota masyarakat? Apa yang sejatinya menjadi tujuan utama masyarakat melakukan olahraga?

Tampaknya ada bias kebijakan yang menempatkan olahraga prestasi sebagai arus utama. Sebagian besar energi, termasuk anggaran, dicurahkan pada olahraga prestasi yang menjadikan perburuan medali sebagai tujuan. Memberikan perhatian pada olahraga prestasi yang cenderung elit tentu bukan suatu kesalahan, tetapi mengabaikan kepentingan olahraga bagi semua orang merupakan kealpaan jika tidak mau disebut kesesatan dalam kebijakan publik. Survei yang dilakukan terhadap 1396 responden yang berusia 6-90 tahun menunjukkan bahwa 90% lebih tujuan masyarakat berolahraga lebih bersifat non-prestasi (Maksum, 2020b). Sebagian besar untuk tujuan kesehatan, baik pada dimensi fisik maupun psikis (lihat gambar 1.2). Pertanyaannya, bagaimana kebijakan publik merespons kebutuhan mereka yang lebih dari 90% tersebut?



Pengabaian terhadap kepentingan yang lebih besar acapkali baru disadari ketika peringatan itu datang. Pada awal 2015, kita dikejutkan oleh pernyataan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek terkait hasil evaluasi 1 tahun pelaksanaan jaminan kesehatan nasional bahwa jumlah penduduk Indonesia yang sakit mencapai 65%, jauh melebihi standar normal 10-15% dari total penduduk (Noviani, 2015). Iuran peserta yang diterima BPJS kesehatan tidak bisa menutupi anggaran yang harus dikeluarkan untuk membiayai orang sakit sehingga cenderung terus merugi. Porsi penggunaan anggaran terbesar dikeluarkan untuk membiayai penyakit nonmenular, seperti jantung, ginjal, diabetes, dan stroke. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, diantaranya karena kurang gerak. Ketidakseimbangan antara asupan makan dan energi yang dibakar atau dikeluarkan dapat menimbulkan kegemukan, yang indikator sederhananya berupa semakin besarnya ukuran lingkaran perut. Orang yang mengalami obesitas berpotensi mengalami penyakit kardiovaskuler, suatu penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Kondisi yang demikian tentu sangat merugikan negara dalam jangka panjang. Karena itu, perlu dipikirkan kembali apakah strategi penanganannya bersifat kuratif dengan menyediakan layanan kesehatan sebanyak-banyaknya atau bersifat preventif dengan menyediakan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat melakukan aktivitas fisik secara optimal sehingga angka orang yang sakit menurun.

Penyakit nonmenular sejatinya merupakan fenomena global, tidak hanya bagi negara berkembang tetapi juga sejumlah negara maju. Pola hidup yang tidak sehat merupakan pemicu utama masalah ini, seperti kebiasaan merokok, minuman beralkohol, makanan instan minim serat, dan kurangnya aktivitas fisik. WHO melalui laporannya pada tahun 2018 menyebutkan bahwa penyakit nonmenular terus akan menjadi perhatian dunia melalui program SDGs seiring lemahnya komitmen global, baik dalam bentuk legislasi, anggaran, dan implementasi. Pada 2014, WHO melakukan survei global dan menurunkan laporan profil tiap negara terkait penyakit nonmenular. Untuk Indonesia, WHO mencatat bahwa penyakit nonmenular—seperti jantung, stroke, pernafasan akut, dan diabetes mellitus—menyebabkan kematian sebesar 71%¹. Tampaknya terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1995, angka kematian akibat penyakit nonmenular sebesar 41,7%, pada 2001 menjadi 49,9%, dan pada 2007 menjadi 59,5%.

Penyakit non-menular sejatinya merupakan fenomena global, tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga terjadi di negara maju. Di Inggris, misalnya, meningkatnya obesitas dan diabetes, termasuk masalah kesehatan mental dan kondisi lain yang terkait dengan kurang gerak telah merugikan negara sebesar £7,4 milyar setiap tahun (Sport England, 2016). Itu semua harus dicegah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berolahraga. Terbukti, peningkatan partisipasi olahraga berdampak pada ekonomi, terutama terkait ketersediaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan di dalam negeri dan ekspor ke luar negeri. Aktivitas fisik berkontribusi £39 milyar ke ekonomi Inggris setiap tahun dan setengahnya berasal dari keterlibatan individu dalam olahraga akar rumput. Semakin banyak orang yang aktif secara fisik, semakin sukses ekonomi. Melalui sektor swasta, pusat kebugaran berbiaya rendah atau teknologi baru yang menghembuskan kehidupan baru ke dalam olahraga akar rumput hingga transformasi dramatis dari daerah tertinggal menuju berkemajuan menunjukkan bahwa olahraga adalah pusat kesuksesan ekonomi.

Pengalaman Australia juga menarik untuk disimak. Meski berhasil dalam Olimpiade Sydney 2000, menempati peringkat keempat dengan 16 medali emas, kebijakan olahraga Australia dianggap menghadapi persoalan serius (Australian Government, 2010). Kebijakan olahraga yang berfokus pada pencapaian performa tinggi melalui pendekatan “top-down” telah mengangkat Australia di panggung internasional, tetapi tantangan baru dihadapi seiring banyaknya warga Australia yang berpotensi mengidap *non-communicable diseases*. Menurut Organisasi untuk

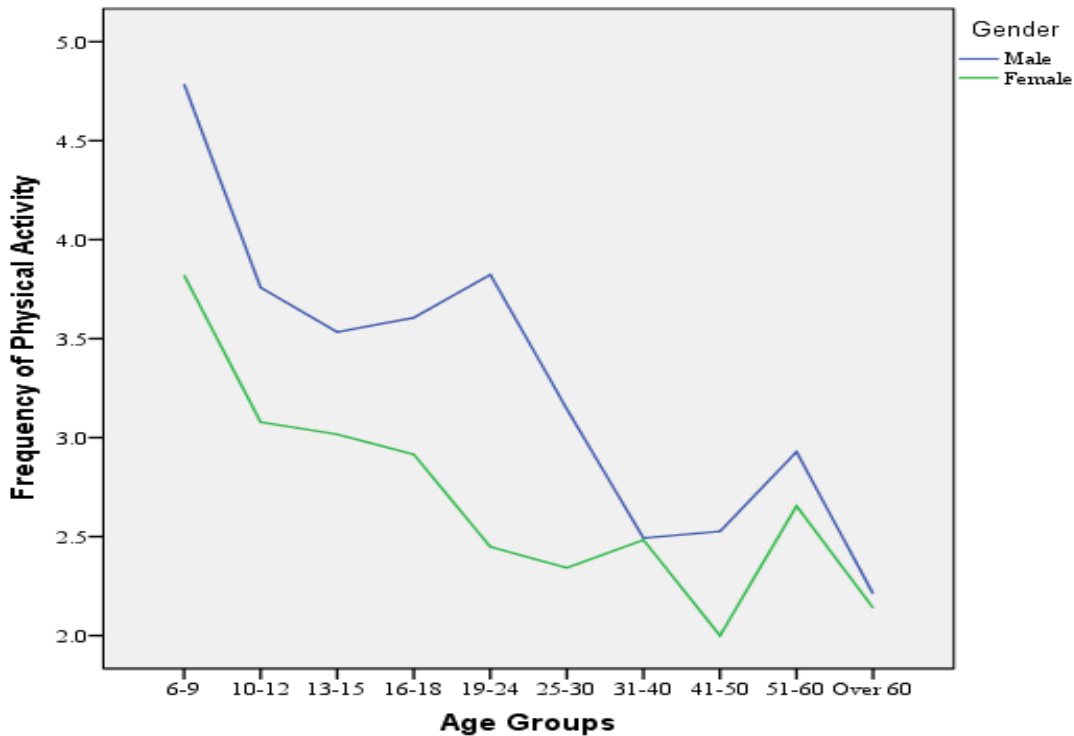
¹ Malaysia 73%, Thailand 71%, China sebesar 87% dan Amerika 88%

Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Australia ada di tingkat kelima tertinggi obesitas dewasa di negara maju. Survei Kesehatan Nasional 2007-2008 menemukan bahwa 68% pria dewasa Australia dan 55% wanita dewasa kelebihan berat badan atau obesitas. Selanjutnya, 17% anak Australia usia 5-17 tahun mengalami kelebihan berat badan dan hampir 8% mengalami obesitas (Australian Government, 2010). Untuk menghidupkan kembali keterlibatan dalam olahraga di antara warga dan untuk mendapatkan kembali keunggulan kompetitif, Australia melakukan refleksi dan reorientasi kebijakan olahraganya. Reorientasi diarahkan dengan menempatkan fokus strategis pada kolaborasi, reformasi, dan investasi di seluruh jalur olahraga secara “bottom-up”. Pendekatan yang lebih komprehensif, yang mengawinkan pendekatan elit dan massal, sangat penting untuk meningkatkan partisipasi olahraga untuk kepentingan kesehatan dan produktivitas sekaligus memberikan kontribusi dan mempertahankan kesuksesan internasional.

Olahraga dan Kesetaraan Jender

Partisipasi perempuan ke ranah publik termasuk dalam olahraga perlu terus ditingkatkan seiring dicapainya kesepakatan global terkait kesetaraan jender seperti Konvensi PBB tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks *Sustainable Development Goals* (Gigliotti, Schmidt-Traub, & Bastianoni, 2018; McInnes, 2018; Sapkota & Neupane, 2020). Selain alasan keadilan dan kesetaraan, partisipasi perempuan dalam olahraga berdampak positif bagi kualitas kehidupannya. Sudah banyak bukti empirik yang menunjukkan bahwa partisipasi dalam olahraga berdampak positif bagi kesehatan fisik dan kesejahteraan psikis. Namun begitu, masih saja tingkat partisipasi perempuan dalam olahraga tergolong rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam aktivitas fisik sebesar 47%, sementara pada laki-laki sebesar 62% (Maksum, 2020b). Ada kesenjangan 15% di antara keduanya (lihat gambar 1.3). Tingkat partisipasi tertinggi dicapai pada kategori usia 6-12 tahun dan mengalami penurunan memasuki usia 19 tahun. Pada laki-laki, pola partisipasi naik kembali memasuki usia 50-80 tahun. Sementara itu, pada perempuan tingkat partisipasi justru menurun tajam memasuki usia 50 tahun (Maksum, 2020a; Maksum & Indahwati, 2020). Data secara global juga menunjukkan serupa, sekitar 31% orang dewasa berusia 15 tahun ke atas tidak cukup aktif, pada pria mencapai 28% dan wanita sebesar 34% (World Health Organization, 2015).

Gambar 1.3. Pola Partisipasi Berolahraga Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin



Pertanyaannya kemudian, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam olahraga? Apakah persoalan tersebut berkorelasi dengan literasi fisik mereka? Bagaimana peran faktor sosial dan ekonomi? Bagaimana pula dampaknya terhadap kesehatan fisik dan kesejahteraan psikisnya? Pada usia dewasa, aktivitas fisik yang cukup menjadi semakin penting seiring menurunnya fungsi organ dan metabolisme tubuh. Kondisi yang demikian memang tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi dari bertambahnya usia. Namun, penurunan yang tajam dapat dihindari termasuk risiko terhadap penyakit non-menular jika aktivitas fisik dapat dilakukan secara regular. Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran yang sangat berharga, risiko kematian tertinggi ada pada usia 50 tahun ke atas, apalagi jika memiliki penyakit penyerta (komorbid) seperti jantung, hipertensi, dan diabetes (Driggin et al., 2020; Handayani, Hadi, Isbaniah, Burhan, & Agustin, 2020).

Banyak penelitian dihasilkan terkait dengan manfaat olahraga bagi perkembangan diri individu, termasuk pada perempuan (Fernández-Abascal & Martín-Díaz, 2021; Hughes et al., 2020; Meisenberg & Woodley, 2015; Samouilidu, Pacić, Nikić, & Eminović, 2016). Sejumlah hasil riset membuktikan bahwa partisipasi perempuan dalam olahraga bermanfaat bagi kesehatan

reproduksi dan kesehatan secara umum. Keterlibatan aktivitas fisik saat anak-anak berdampak positif bagi kehidupannya saat remaja dan sekaligus mengurangi risiko penyakit kronis kala dewasa (United Nations, 2007b). Pada wanita dewasa, aktivitas fisik bisa berkontribusi terhadap pencegahan penyakit kardiovaskular yang menyebabkan sepertiga kematian wanita di seluruh dunia dan setengah dari semua kematian wanita di 50 negara berkembang (Pharr & Lough, 2016; United Nations, 2007b).

Partisipasi dalam olahraga juga dapat memfasilitasi kesehatan mental yang baik bagi wanita segala usia, termasuk pengelolaan gangguan mental seperti penyakit Alzheimer. Olahraga dapat meningkatkan kesejahteraan psikis dengan membangun harga diri, kepercayaan diri, dan integrasi sosial, serta membantu mengurangi stres, kecemasan, kesepian, dan depresi. Masalah ini menjadi sangat penting mengingat tingkat depresi wanita hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pria, baik di negara maju maupun negara berkembang. Aktivitas fisik juga membantu mengurangi efek osteoporosis, dimana wanita memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan pria. Partisipasi dalam aktivitas fisik membantu dalam pencegahan dan/atau pengobatan penyakit kronis dan degeneratif lainnya yang berhubungan dengan penuaan, seperti diabetes tipe-2, hipertensi, artritis, dan kelainan kardiovaskular (de Lira et al., 2018; WHO, 2017, 2019). Ini juga membantu dalam pengelolaan berat badan dan berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan kesehatan tulang, otot, dan persendian.

Meski aktivitas fisik diyakini bermanfaat bagi kesehatan, namun prevalensinya masih cukup rendah, terutama di wilayah Amerika dan Mediterania Timur. Di kedua wilayah ini, hampir 50% wanita tidak cukup aktif, sedangkan prevalensi untuk pria adalah 40% di Amerika dan 36% di Mediterania Timur. Pada wilayah Asia Tenggara menunjukkan persentase terendah, 15% untuk pria dan 19% untuk wanita (United Nations, 2007b; World Health Organization, 2015). Di semua negara, tingkat partisipasi pria lebih tinggi daripada wanita, dengan perbedaan prevalensi terbesar ada di negara-negara Mediterania Timur seperti Israel, Jordania, Lebanon, dan Suriah. Secara umum, alasan ketidakaktifan fisik sebagian disebabkan oleh kurangnya waktu senggang dan peningkatan perilaku sedentari selama aktivitas pekerjaan dan rumah tangga. Peningkatan penggunaan moda transportasi "pasif" diduga juga terkait dengan penurunan tingkat aktivitas fisik. Selain itu, masalah urbanisasi telah mengakibatkan beberapa faktor lingkungan yang dapat menghambat partisipasi dalam aktivitas fisik seperti infrastruktur jalan bebas hambatan, kepadatan

lalu-lintas, kualitas udara rendah, kurangnya taman, trotoar dan fasilitas olahraga/ rekreasi (Eime et al., 2017; Zambrano-Monserrate, Ruano, & Sanchez-Alcalde, 2020).

Kesehatan fisik dan kesejahteraan psikis yang merupakan dimensi utama dari kualitas hidup seseorang juga berkaitan dengan kebebasan yang dimiliki individu dalam memperoleh akses ekonomi, pendidikan, dan lingkungan yang baik (Miletzki & Broten, 2017). Kualitas hidup individu dan masyarakat bisa jadi rendah akibat ketiadaan akses yang adil terhadap sumber-sumber ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Penelitian yang dilakukan oleh organisasi Gallup-Healthways terhadap 450.000 respons dari 1000 penduduk Amerika menemukan bahwa kesejahteraan psikis dan evaluasi kehidupan memiliki korelasi yang berbeda (Kahneman & Deaton, 2010). Penghasilan dan pendidikan lebih erat kaitannya dengan evaluasi kehidupan, tetapi kesehatan, pemberian perawatan, kesepian, dan merokok adalah prediktor yang relatif kuat dari emosi sehari-hari. Penghasilan rendah memperburuk rasa sakit emosional yang terkait dengan kemalangan seperti perceraian, kesehatan yang buruk, dan kesendirian. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendapatan yang tinggi dapat “membeli” kepuasan hidup, tetapi tidak dapat “membeli” kebahagiaan.

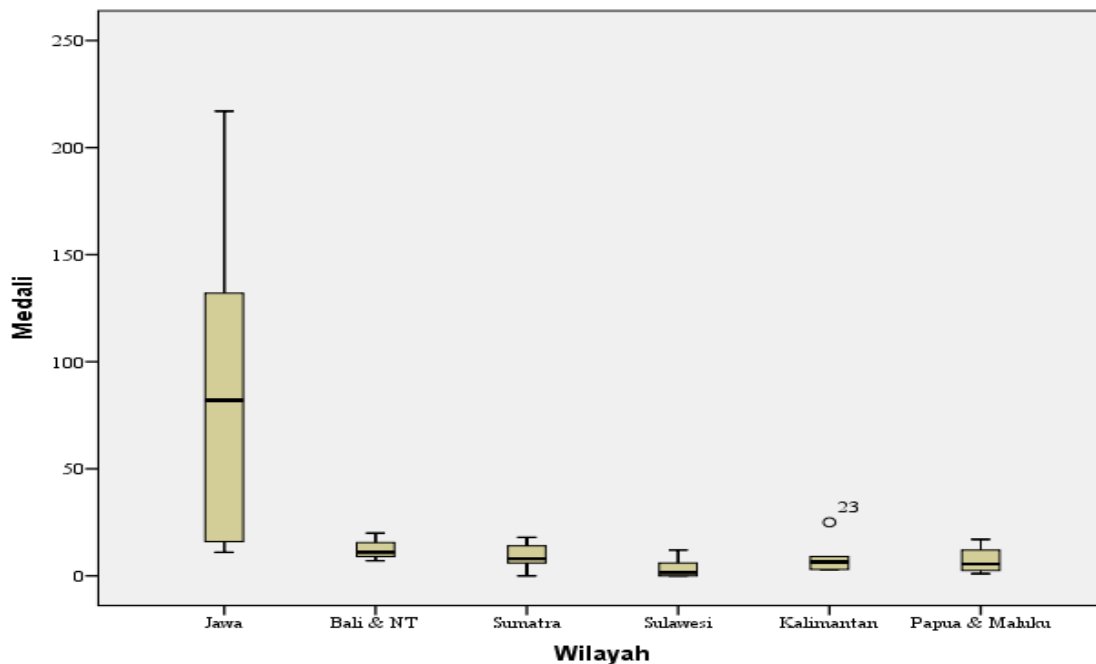
Pemberdayaan kepada Mereka yang Tertinggal

Harus diakui bahwa hasil-hasil pembangunan, termasuk dalam olahraga, belum dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa diskriminasi. Masalah kesenjangan gender, Jawa dan luar Jawa, kaum miskin dan berpunya, dominasi etnis, kelompok anak-anak dan orangtua, serta kaum disabilitas masih menjadi persoalan yang memerlukan solusi komprehensif dan jangka panjang. Mengadopsi spirit pembangunan berkelanjutan 2030, menempatkan martabat individu adalah fundamental dan bahwa tujuan dan target pembangunan harus bisa menjangkau semua segmen masyarakat, tanpa ada satu pun yang tertinggal (United Nations, 2016). Memastikan bahwa komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan yang efektif memerlukan pemahaman yang tepat tentang target sasaran.

Dalam beberapa kajian, perolehan medali sangat terkait erat dengan kemajuan ekonomi dan jumlah penduduk (De Bosscher, De Knop, van Bottenburg, Shibli, & Bingham, 2009; De Bosscher, Heyndels, De Knop, Van Bottenburg, & Shibli, 2008). Variabel ekonomi dan jumlah penduduk menjadi faktor dominan. Semakin kaya dan semakin banyak penduduk, maka semakin

banyak jumlah medali yang diperoleh. *More people, more money, more medals* (Hylton, Bramham, Jackson, & Nesti, 2007). Peraih medali dalam suatu *event*, apakah Olimpiade, Asian Games, Sea Games, dan PON, adalah mereka yang secara ekonomi memiliki PDB yang tinggi dan jumlah penduduk yang besar. Amerika dan China adalah negara dengan kekuatan ekonomi dan jumlah penduduk terbesar. Mereka selalu mendominasi perolehan medali dalam Olimpiade. Demikian juga Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta adalah daerah dengan PDRB dan penduduk terbesar. Ketiga daerah tersebut juga silih berganti menjadi juara dalam PON. Berdasarkan data PON 2016, sebanyak 63% medali emas dikuasai oleh tiga provinsi teratas, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta dan 82% medali dikuasai oleh 10 besar provinsi teratas. Artinya, ada kesenjangan yang luar biasa dalam perburuan medali antara mereka yang memiliki kemewahan dalam anggaran dan jumlah penduduk dengan mereka yang secara sumberdaya memiliki keterbatasan (lihat gambar 1.4).

Gambar 1.4. Distribusi Perolehan Medali dalam PON Berdasarkan Wilayah



Kajian yang dilakukan terhadap 34 propinsi di Indonesia melalui analisis regresi menunjukkan bahwa medali yang diperoleh suatu daerah dipengaruhi secara signifikan oleh PDRB dan jumlah penduduknya, dengan nilai beta sebesar 0,615 dan 0,337 pada signifikansi $<.01$ dan $<.05$. Variabel

partisipasi dalam olahraga dan tingkat kebugaran jasmani justru tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil kajian ini mengonfirmasi kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Bosscher, dkk serta Hylton, dkk terkait dengan keberhasilan pembangunan olahraga (De Bosscher et al., 2008; Hylton et al., 2007).

Kesimpulan

1. Diperlukan perubahan paradigma pembangunan olahraga secara lebih mendasar, komprehensif, dan berjangka panjang, dari olahraga untuk olahraga yang berdimensi konsumtif menjadi olahraga untuk pembangunan yang berdimensi investatif. Investasi tersebut mencakup modal fisik, intelektual, individual, sosial, emosional, dan finansial.
2. Olahraga merupakan bagian penting dari program pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama pada tujuan ketiga, yakni kesehatan fisik dan kesejahteraan psikis. Karena itu, diperlukan program aksi dan sinergi yang mengagregasi tujuan tersebut secara terukur dan berkelanjutan.
3. Sebagai bidang garapan yang menyangkut kepentingan publik, olahraga perlu dikelola dengan menerapkan kebijakan publik yang inklusif, bukan elitis. Kebijakan seharusnya lebih memberikan tekanan pada lebih dari 90% pelaku olahraga yang berolahraga untuk kebutuhan kesehatan fisik dan kesejahteraan psikis.
4. Partisipasi perempuan dalam berolahraga perlu terus dipromosikan dengan skala yang lebih masif, mengingat ada kesenjangan tingkat partisipasi yang signifikan antara laki-laki (35,7%) dan perempuan (21,4%). Gerakan tersebut selain untuk kepentingan kesetaraan jender, juga peningkatan mutu kesehatan perempuan terutama terkait dengan reproduksi.
5. Ketimpangan pembangunan olahraga, termasuk hasil-hasilnya, antara elit dan massal, Jawa dan luar Jawa, etnis tertentu dengan yang lain, dan antar kelompok usia masih menjadi persoalan serius. Penguasaan 63% medali emas dalam PON oleh tiga Provinsi hanyalah sekadar contoh. Karena itu, pemberdayaan dan keberpihakan kepada mereka yang tertinggal perlu menjadi perhatian.

Bab 2 SDI, Kebijakan, dan Metodologi

Merumuskan definisi olahraga tidak akan pernah memuaskan baik bagi kalangan ilmuwan olahraga maupun praktisi. Istilah yang diklaim asli Indonesia ini, karena bukan terjemahan dari *sports* (Siregar & Harsuki, 2003) sejak awal tahun 1960-an membuka perspektif baru bahwa olahraga merupakan investasi sumber daya manusia untuk menciptakan perubahan. Dengan otoritasnya sebagai Ketua *International Council of Health, Physical Education, and Recreation* (ICHPER), Prof. Klaas Rijdsdorp mengupas ringkas makna frasa olahraga dari perspektif semantik dan filosofis. Makna frasa “olah” seperti halnya mengolah lahan pertanian, yang juga digunakan dalam konteks memasak makanan, adalah mengelola, menjadikan sesuatu lebih baik, yakni terhadap “raga” yang berarti tubuh yang bermakna juga manusia (Rijsdorp, 1973). Rumusan tersebut berlandaskan paham filsafat monism Kretschmar, kesatuan jiwa dan badan, lawan dari paham dualism Rene Descartes (Morgan & Meier, 1995).

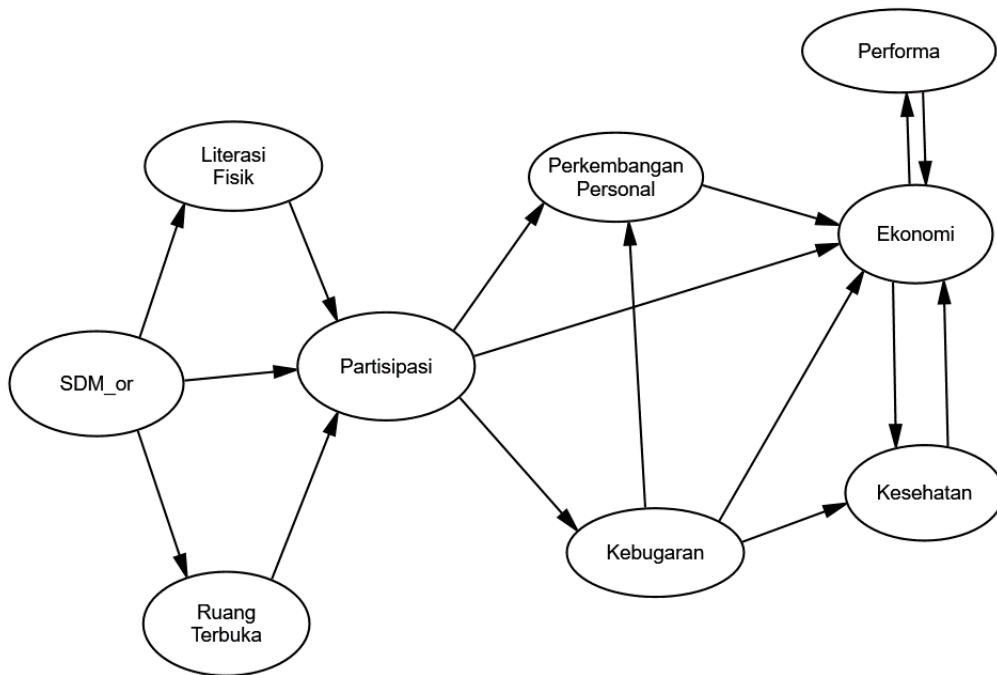
Olahraga dipandang sebagai sebuah istilah generik yang tepat untuk menciptakan Manusia Indonesia Baru sebagai komplemen dari platform politik dalam rangka *nation and character building*. Bagi Bung Karno, olahraga adalah alat pembangunan. Karena itu, kita mempunyai argumentasi kuat bahwa ide pemanfaatan olahraga sebagai instrumen bagi *nation building*—sangat populer di negara-negara bekas jajahan kolonial—jauh mendahului prakarsa Sekjen PBB Kofi Annan yang digaungkan ke mana-mana oleh Adolf Ogi sebagai pembantu khusus bidang olahraga, seperti dikemukakannya dalam konferensi internasional bertema “Sport for Development and Peace” di Magglingen Swiss (United Nations General Assembly, 2003).

Istilah pembangunan olahraga yang digunakan dalam SDI menggambarkan proses, kebijakan, dan praktik yang membentuk sebuah kerangka kerja yang terpadu untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat untuk berolahraga. Pembangunan olahraga merupakan penciptaan peluang yang memungkinkan proses, sistem, dan struktur yang efektif yang memungkinkan dan mendorong semua orang, tanpa kecuali, termasuk kelompok dan area tertentu untuk mengambil bagian dalam olahraga untuk meningkatkan kinerja mereka ke tingkat apa pun yang mereka inginkan (Bailey et al., 2016; Bergsgard, Houlihan, Mangset, Nødland, & Rommetvedt, 2007). Pembangunan olahraga juga tentang memastikan jalur dan struktur yang tersedia untuk memungkinkan orang mempelajari keterampilan gerakan dasar, berpartisipasi dalam olahraga pilihan mereka, mengembangkan keterampilan mereka, kompetensi dan kinerja, dan mencapai tingkat keunggulan.

SDI dan Perkembangan Terbaru

SDI sejatinya bukan barang baru. Ukuran pembangunan olahraga tersebut telah dikaji dan diterapkan pada 2003-2007 (T.C. Mutohir & Maksum, 2007). Pada saat itu, SDI terdiri dari empat dimensi yang mencakup sumberdaya manusia, ruang terbuka, partisipasi, dan kebugaran. Setelah melalui proses reviu dengan memperhatikan hasil kajian literatur dan bukti-bukti empirik serta pertimbangan kebijakan untuk olahraga Indonesia ke depan, maka SDI dirumuskan dengan mempertahankan empat dimensi yang sudah ada, ditambah dengan lima dimensi baru, yakni literasi fisik, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa (T.C. Mutohir, Lutan, Maksum, Kristiyanto, & Akbar, 2020b). Dengan demikian, SDI baru mencakup sembilan dimensi. Logika teoretik yang dibangun terhadap sembilan dimensi tersebut terlihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1: Model Relasi Struktural Sembilan Dimensi SDI



Dari model teoretik tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel SDM menjadi titik awal perhatian pembangunan olahraga, karena variabel tersebut akan mempengaruhi variabel-variabel lain seperti literasi fisik dan partisipasi. Ruang terbuka tetap menjadi variabel prasyarat untuk tumbuhnya partisipasi (T.C. Mutohir & Maksum, 2007). Variabel partisipasi menjadi *output* pertama dari pembangunan olahraga. Jika angka partisipasi olahraga semakin meningkat, maka

akan menimbulkan efek ganda kepada variabel yang lain, seperti kebugaran jasmani, perkembangan pribadi, kesehatan, kesejahteraan psikis, dan ekonomi. Dari hasil analisis, variabel performa sejatinya merupakan entitas tersendiri. Performa yang diukur dengan medali sangat dipengaruhi oleh variabel ekonomi (De Bosscher et al., 2008; Hylton et al., 2007), tetapi tidak berkorelasi langsung dengan partisipasi, kebugaran masyarakat, dan kesejahteraan psikis. Karena itu, masuknya variabel performa perlu diikuti dengan variabel ekonomi agar pola relasinya menjadi rasional.

Setiap dimensi tersebut selanjutnya turunkan ke dalam indikator agar dapat dilakukan pengukuran secara lebih jelas. Dari kesembilan dimensi tersebut akhirnya dirinci menjadi 23 indikator (lihat tabel 2.1).

Tabel 2.1: Rincian variabel SDI, 9 dimensi, 23 indikator

Varibel	Indikator	Variabel	Indikator
1. SDM olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Guru penjas • Pelatih • Instruktur • Relawan 	6. Perkembangan personal	<ul style="list-style-type: none"> • Resilien • Modal sosial
2. Literasi fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan • Sikap • Perilaku 	7. Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Fisik • Psikis
3. Ruang terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • Indoor • Outdoor 	8. Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja barang olahraga • Jasa olahraga
4. Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi • Intensitas • Durasi 	1. Performa	<ul style="list-style-type: none"> • Medali • Populasi atlet
5. Kebugaran	<ul style="list-style-type: none"> • Usia 10-19 • Usia 20-44 • Usia 45-60 		

Penjelasan dari setiap dimensi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. SDM olahraga merujuk pada pelatih, guru pendidikan jasmani, instruktur, dan relawan olahraga yang merupakan komponen utama dalam sistem pembinaan dan pengembangan olahraga. Indikator SDM Olahraga di suatu wilayah adalah rasio jumlah pelatih, guru pendidikan jasmani, instruktur, dan relawan olahraga dengan jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas di wilayah tersebut.

2. Ruang terbuka olahraga adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas olahraga, baik *indoor* maupun *outdoor*. Ruang terbuka merupakan tempat yang menjadi kebutuhan dasar bagi siapa pun untuk melakukan aktivitas olahraga. Ruang terbuka yang memadai menjadi syarat terbentuknya partisipasi dalam aktivitas olahraga. Indikator ruang terbuka di suatu wilayah adalah rasio antara ketersediaan ruang terbuka dengan jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas di wilayah tersebut.
3. Literasi fisik adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, keterlibatan, dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan aktivitas fisik untuk hidup yang berkualitas sepanjang hayat. Indikator utama dari literasi fisik adalah pengetahuan, sikap, dan kompetensi fisik dari individu. Individu yang memiliki literasi fisik yang bagus akan melibatkan diri dalam aktivitas fisik secara lebih intens dan berkelanjutan.
4. Partisipasi adalah keterlibatan individu dalam olahraga/aktivitas fisik dalam satu minggu terakhir. Indikator partisipasi aktif merujuk pada angka partisipasi anggota masyarakat berusia 10 - 60 tahun yang melakukan aktivitas olahraga minimal tiga kali per minggu.
5. Kebugaran didefinisikan sebagai kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Indikator kebugaran adalah angka kebugaran yang ditunjukkan dengan V_{O2max} , yakni berupa derajat kapasitas konsumsi aerobik maksimum. Semakin tinggi V_{O2max} , menunjukkan semakin tinggi tingkat kebugaran seseorang.
6. Kesehatan mencakup sehat secara fisik dan psikis yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Seseorang dinyatakan sehat secara fisik jika terbebas dari penyakit dan mampu bekerja secara produktif. Sementara itu, sehat secara psikis mengacu pada kesejahteraan psikis, yakni suatu kondisi di mana individu dapat bertindak secara otonom, dapat menerima kelebihan dan kekurangan dirinya, dan memiliki tujuan hidup yang jelas.
7. Perkembangan personal adalah aspek-aspek kepribadian yang dibutuhkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang konstruktif, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Ada dua aspek yang diukur dalam perkembangan personal, yakni resilien dan modal sosial. Resilien adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan (Connor & Davidson, 2003; Luthans, Luthans, & Luthans, 2004). Sementara itu, modal sosial adalah perasaan bersama sebagai warga

bangsa yang memungkinkan mereka percaya satu sama lain (Degenne, 2004; Forrest & Kearns, 2001).

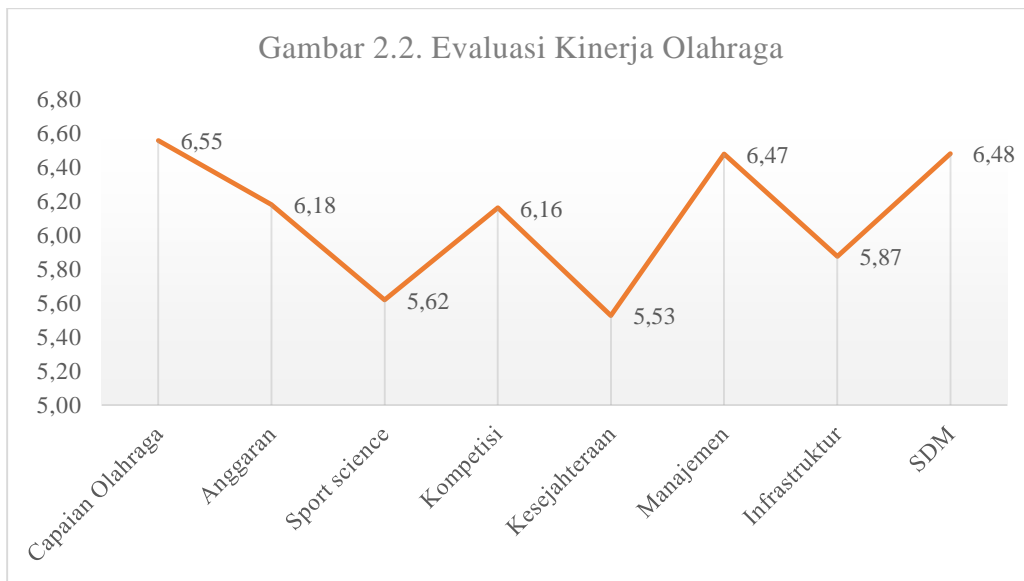
8. Ekonomi adalah pengeluaran individu terkait aktivitas olahraga, baik dalam bentuk barang maupun jasa, dalam satu tahun. Belanja barang dapat berupa peralatan dan perlengkapan olahraga. Peralatan olahraga dapat berupa raket, *stick* atau pemukul, *glove*, dan bola. Sedangkan perlengkapan olahraga dapat berupa pakaian olahraga dan sepatu. Sementara itu, jasa olahraga bisa berupa pembayaran tiket, konsultan, dan/atau jasa pelatihan. Kemampuan membayar terhadap barang atau jasa merupakan indikator penting dari ekonomi seseorang dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
9. Performa adalah capaian olahragawan atau sekelompok olahragawan sebagai hasil dari pembinaan olahraga prestasi pada suatu wilayah. Performa dalam konteks ini diukur dengan dua hal, yakni perolehan medali dalam suatu kejuaraan dan populasi atlet elit di suatu daerah.

Menyimak keseluruhan dimensi SDI yang baru, termasuk dengan sejumlah indikatornya, terlihat bahwa pendekatan pengukuran lebih bersifat *outputs-outcomes based assessment* (Crespo et al., 2010; Tam, 2014). Mengacu pada pendekatan tersebut, semua aktivitas dan sumber daya olahraga harus terkait dengan hasil yang diharapkan dari pembangunan olahraga itu sendiri. Dari sembilan dimensi tersebut, hanya dua dimensi yang bersifat *input*, yakni SDM olahraga dan ruang terbuka, selebihnya merupakan dimensi yang bersifat *outputs* dan *outcomes*.

Evaluasi Kebijakan Olahraga

Kebijakan pembangunan olahraga membutuhkan evaluasi untuk mendapatkan gambaran tentang tujuan yang ingin dicapai. Masalah kebijakan bukan persoalan yang sederhana, tetapi sesuatu yang kompleks. Lain yang merumuskannya dan lain pula yang menerapkannya. Tidak mengherankan akan selalalu ada kesenjangan, seperti mengapa hanya dengan 1 pasal (Pasal 9), dalam Bab IV Undang-Undang Pendidikan Dasar Tahun 1950 tentang pendidikan jasmani, implementasi dan jubarannya sangat kuat, terlaksana di seluruh pelosok tanah air meskipun sumber daya sangat terbatas pada tahun 1950-an. Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang tergolong sangat lengkap, tetapi mengapa setelah 15 tahun dinilai tidak banyak menimbulkan perubahan dan/atau peningkatan dalam olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan terutama olahraga prestasi.

Maka kebijakan terkait pembangunan keolahragaan nasional bisa dipersepsi secara berbeda. Perbedaan penilaian terkait keberhasilan kebijakan juga dapat diakibatkan kriterianya berbeda dan mungkin juga prosedur penilaian, termasuk komponen yang dianggap esensial dan non-esensial. Premis inilah yang melandasi SDI menetapkan 9 komponen esensial yang dikumpulkan datanya terkait kebijakan nasional dalam bidang keolahragaan. Kebijakan nasional makro bidang keolahragaan tidak lain adalah UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.



Kebijakan dalam keolahragaan nasional, perlu dipahami, pertama dan terutama adalah sebagai sebuah proses dinamis, dan lebih jauh lagi, selalu dalam hubungan yang dinamis dengan konteks sejarah, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Setiap domain olahraga, mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berbeda proses dan keluarannya. Seperti halnya kebijakan olahraga pendidikan tentu sangat spesifik terkait implementasi kurikulum dan sistem pendukung serta keluarannya. Kriteria kemajuan dan pencapaian olahraga prestasi juga sangat spesifik sesuai dengan karakteristiknya yang sangat terstruktur kelembagaannya dan bersifat kompetitif untuk mengejar prestasi, rekor, dan medali. Dengan demikian terkait SDI 2021, isu krusialnya adalah apa kriteria dan komponen yang representatif untuk menilai pencapaian tujuan kebijakan keolahragaan nasional terkait tujuan jangka panjang yang pada hakikatnya berisi tujuan majemuk, mencakup aspek fisik, intelektual, sosial, moral terkait konteks ekonomi dan

politik sebagai jbaran dari UUD 1945 dan Pancasila yang merupakan paradigma pembangunan nasional.

Seiring dengan pengumpulan data SDI 2021, kami telah menyurvei 278 responden yang merupakan pejabat di Dispora Provinsi dan Kabupaten/Kota (lihat gambar 2.2). Dari latar belakang pendidikan, 63% responden berpendidikan sarjana dan 23% berpendidikan magister. Dari aspek pengalaman, 56% berpengalaman menangani olahraga 0-5 tahun dan 44% berpengalaman lebih dari 5 tahun. Dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan dan diadaptasi berdasarkan konsep SPLISS (De Bosscher, Shibli, Westerbeek, & Van Bottenburg, 2015), kinerja olahraga dipersepsi pada angka 6,1 dari skala 1-10. Angka tersebut masih tergolong rendah, hanya satu digit di atas rata-rata. Aspek yang dipersepsi relatif baik adalah capaian olahraga, manajemen, dan sumberdaya manusia. Sementara itu, yang masih dipersepsi rendah bertalian dengan kesejahteraan dan penerapan *sports science*.

Boleh saja kita tidak setuju dengan hasil penilaian tersebut. Jika kemudian diskusi atau mungkin disebut debat tidak berkesudahan, hal ini karena dalam kenyataannya tidak semua kepentingan dapat terwakili secara setara. Jadi berbagai wacana akan diposisikan secara berbeda dalam kebijakan yang mencerminkan bahwa isu krusial selalu muncul sebagai subjek interpretasi, hingga akhirnya diperoleh resultante dari semua ide, bukan siapa yang paling unggul berteori. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi yaitu penyelesaian perbedaan melalui musyawarah dan mufakat, khas budaya Indonesia, yang bermakna “dialog interaktif, saling menginformasikan apa yang dipikir dan dirasakan tentang hal-hal esensial (Joesoef, 2014), yang di negara-negara Skandinavia dikemas dalam ungkapan *consensus democracy*—semua isu diperdebatkan, didiskusikan hingga tuntas diperoleh kesepakatan solusi (Heinemann, 2003). Konsesus yang menjadi tujuannya adalah ekspresi dari suatu keinginan bersetuju secara bebas, suatu kemauan bebas untuk mengatasi semua perbedaan yang lahir dari kehendak hidup bersama dalam komunitas.

Dengan mengapresiasi kompleksitas kebijakan menjadi jelas bahwa kompromi adalah tema sentral lebih lanjut dari kebijakan dalam bidang keolahragaan. Apa yang muncul sebagai kebijakan pada waktu atau tempat tertentu akan selalu merupakan hasil kompromi antara kepentingan yang bersaing di dalam dan untuk subjek. Sekali lagi, politik merupakan bagian integral dari kebijakan. Siapa yang dapat berbicara, di mana, kapan, dan dengan otoritas apa menjadi sangat penting untuk dipahami dalam pengembangan kebijakan bidang keolahragaan. Akhirnya, perlu direnungkan

bagaimana kebijakan pembangunan keolahragaan yang paling sesuai, dan menjadi bagian integral pembangunan nasional, yang mengarah kepada kemungkinan perubahan yang lebih baik di masa mendatang.

Terkait kajian SDI 2021, laporan ini menyatakan bahwa wacana pembentukan modal manusia amat mendasar, dan kegiatan olahraga dalam makna luas sangat berpotensi untuk membina komponennya, mencakup modal fisik, sosial, emosional, intelektual, individual, dan finansial. Karena itu hakikat pembangunan olahraga adalah mula pertama tertuju pada dimensi manusianya yang menjadi sasaran pembinaan olahraga. Mereka harus dibina sebaik mungkin agar tidak menjadi beban, tetapi ikut serta mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Intervensi Program Berbasis Data

SDI tidak akan berhenti pada diperolehnya data, tetapi dengan berdasarkan data tersebut intervensi program dapat dilakukan. Intervensi yang didasarkan pada data diharapkan lebih memberikan arah dan dampaknya bisa lebih terukur. Praktek baik di sejumlah negara dapat dijadikan pembelajaran dalam merumuskan intervensi berdasarkan tema tertentu. Penentuan tema kebijakan kedudukannya sangat esensial dan menentukan bagi pemecahan masalah umum yang dirasakan oleh publik. Ada delapan tema kebijakan pembangunan olahraga yang dikenal dan sudah diterapkan sesuai prioritas di suatu negara.

- (1) *Olahraga untuk memecahkan masalah sosial dan pembangunan.* Tidak kurang dari 130 program olahraga diluncurkan oleh PBB di Afrika ketika Kofi Annan sebagai Sekjen PBB dan Adolf Ogi sebagai pembantu khusus bidang olahraga untuk mengatasi konflik, dan penanggulangan masalah gizi. Adolf Ogi, mantan presiden Swiss-- dalam logat Jerman yang kental-- selalu mengatakan, tidak perlu lagi dilakukan riset, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri dampak positif olahraga, seperti untuk memperkokoh integrasi sosial, memecahkan konflik dan memperdayakan peranan wanita.
- (2) *Olahraga untuk mengatasi masalah kesehatan.* Tema ini akar sejarahnya cukup panjang dan penerapannya tergolong langgeng di sepanjang masa. Bahkan kini bangkit sebagai tema yang menjadi prioritas di negara-negara maju yang mengalami prevalensi obesitas tinggi seperti di AS. Pada tahun 1875 di Inggris, misalnya, diterbitkannya *UU Kesehatan Publik* sebagai reaksi terhadap lahan-lahan kosong yang tertutup bagi

umum, di samping sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi kehidupan di kota besar dan kecil yang kurang perhatian terhadap olahraga. Taman bermain dijadikan tempat berolahraga seperti sepakbola, kriket dan rugby. Di Kanada pemerintah mengalokasikan dana sebesar \$ 5 juta per tahun untuk mengatasi masalah kesehatan melalui UU Kebugaran dan Olahraga Amatir 1961.

- (3) *Olahraga sebagai alat integrasi sosial.* Mengambil cuplikan dari pemberlakuan UU Pendidikan 1918 di Inggris, isinya menekankan pejabat lokal untuk menyediakan fasilitas olahraga untuk pembinaan fisik dan sosial. Laporan Albermarle (1960) berisi isu kenakalan anak remaja akibat kurangnya kesempatan untuk melakukan rekreasi aktif secara fisik. Dewan Olahraga Inggris meluncurkan UU Olahraga yang isinya menempatkan para pemimpin olahraga di lingkungan masyarakat guna mendorong integrasi di kalangan kelompok yang sering berseteru. Program inilah yang menginspirasi diluncurkannya program *Community Sport Development (CSD)* di 25 kota dan kabupaten pada tahun anggaran 2002 semasa olahraga dikelola oleh Ditjen Olahraga. Olahraga digunakan sebagai alat untuk mengukuhkan sendi-sendi sosial.
- (4) *Olahraga dan nasionalisme.* Tema ini sangat populer di kalangan negara-negara yang baru bangkit dari penjajahan seperti di Afrika dan Asia. Olahraga digunakan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, menciptakan identitas bangsa. Terselenggaranya Asian Games sejak pertama di New Delhi, India, tahun 1950 dilatarbelakangi oleh kebangunan bangsa-bangsa Asia. Sesuai dengan zamannya, oleh Bung Karno tema ini diterapkan dan olahraga diintegrasikan dengan ideologi pembangunan.
- (5) *Olahraga dan ketahanan nasional.* Pembinaan olahraga, termasuk *fitness* erat kaitannya dengan kebutuhan untuk membangun kekuatan militer, seperti dialami bangsa-bangsa yang terlibat dalam PD II. Di Inggris, misalnya, untuk mendukung UU Latihan Jasmani dan Rekreasi atau disebut *the Physical Training and Recreation Act*, pemerintah menganggarkan dana dua juta poundsterling untuk mencapai tujuan kaum muda siap terjun membela negara. Di Rusia, olahraga bertujuan untuk membina dan mendukung pertahanan negara. Selama pemerintahan Soeharto, olahraga selain untuk mencapai tujuan pembangunan nasional juga untuk memperkuat ketahanan nasional.

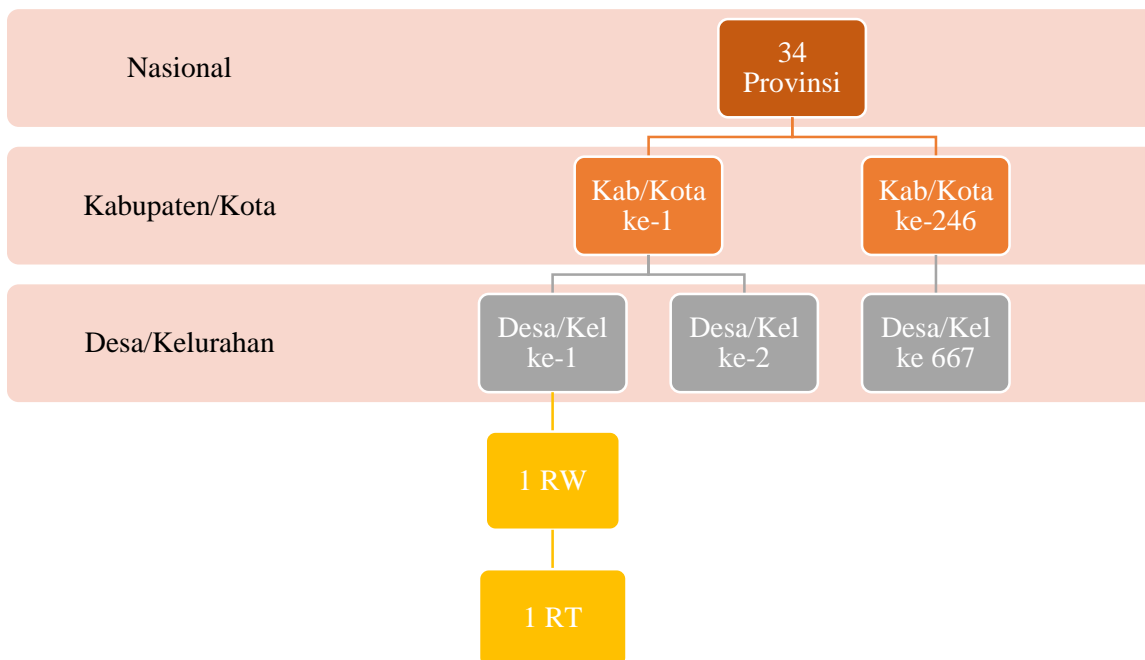
- (6) *Olahraga dan prestise bangsa*. Tema ini sangat populer pada tahun 1960-an, dan bahkan kini bangkit kembali. Selama Perang Dingin antara kubu ideologi komunis dan ideologi liberal pada tahun 1950-an, usai PD II, olahraga dan prestasi yang dicapai digunakan sebagai simbol keberhasilan sistem politik dan ekonomi masing-masing kubu. Di Kanada pada awal tahun 1960-an, pemerintah didesak untuk mengundang dukungan terhadap atlet elit. Dua tujuan dari UU Olahraga Amatir dan Kebugaran tahun 196: meningkatkan derajat kebugaran jasmani penduduk Kanada pada umumnya dan untuk membangkitkan prestise nasional selain prestasi atlet. Pada tahun 1984 di Perancis, pengelolaan olahraga secara administratif berada pada satu ätap yaitu pada Kementerian Olahraga.
- (7) *Olahraga sebagai alat diplomasi*. Beberapa contoh tentang olahraga sebagai alat diplomasi, misalnya, yang dikenal sebagai ‘diplomasi pingpong’ menyertai kunjungan Menlu AS Henry Kissinger ke China dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara kedua negara. Perdana Menteri Australia mendorong Bidang pengawasan Kriket untuk melakukan kunjungan tim kriket ke West Indies pada pertengahan tahun 1950-an guna meningkatkan posisi Australia di lingkungan negara-negara Persemakmuran.
- (8) *Olahraga dan perkembangan ekonomi*. Tema olahraga dan perkembangan ekonomi mulai berkembang dan terkelola dengan baik semenjak penyelenggaraan Olimpiade Los Angeles tahun 1984 ketika even antarbangsa itu dikelola oleh swasta. Pola ini selanjutnya menjadi rujukan pada setiap penyelenggaraan olimpiade. Perkembangan selanjutnya, tema penyelenggaraan even besar seperti olimpiade adalah untuk pengembangan ekonomi dan perkotaan diungkap dalam istilah *economic development and urban regeneration*. Olimpiade London 2012 memilih tema ini untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk berolahraga.

Metodologi Pengkajian

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana data SDI 2021 dikumpulkan dan dianalisis. Sebagai sebuah data nasional, SDI diupayakan mencerminkan kondisi penduduk Indonesia yang semestinya mendapatkan layanan dari kebijakan keolahragaan nasional. Mengacu hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa (BPS, 2021) yang tersebar

di 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, dan 82.820 Desa/Kelurahan. Target SDI 2021 adalah penduduk usia 10-60 tahun. Jumlah penduduk pada kategori usia tersebut sekitar 73% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 197,246 juta jiwa. Pengumpulan data SDI tidak dilakukan melalui sensus, melainkan diambil secara sampling dengan teknik *multistage random sampling*. Teknik ini pada dasarnya adalah gabungan antara *stratified random sampling* dengan *cluster sampling* (lihat gambar 2.3). Stratifikasi diperlukan untuk menjawab kondisi daerah dan/atau masyarakat Indonesia yang memang sangat heterogen. Dengan menggunakan metode ilmiah dan parameter statistik, diharapkan dapat menjamin bahwa sampel yang diambil representatif untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan karakteristik wilayah yang ada di Indonesia. Adapun *cluster sampling* digunakan untuk mengurangi biaya akibat tingkat penyebaran sampel yang meluas. Komponen *cluster* yang dijadikan dasar untuk melakukan random adalah kabupaten/kota dan desa/kelurahan.

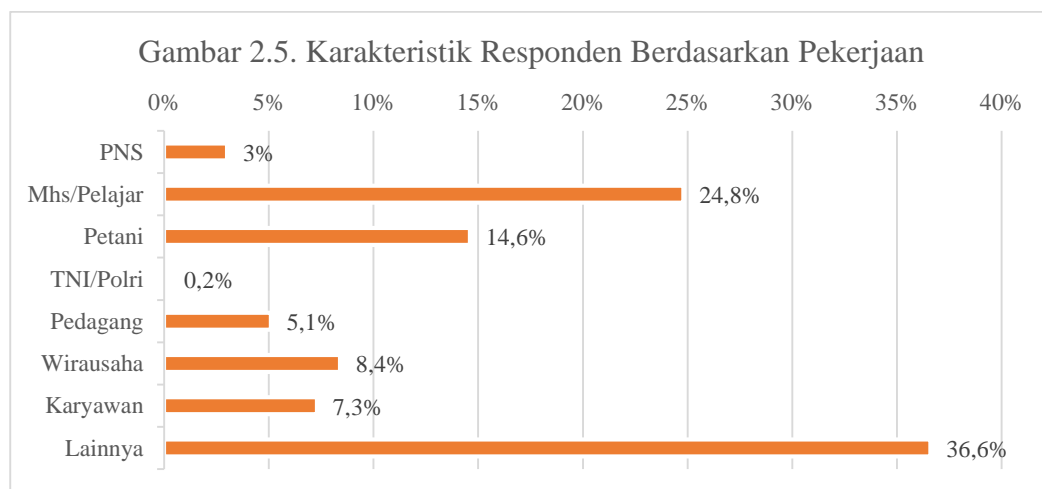
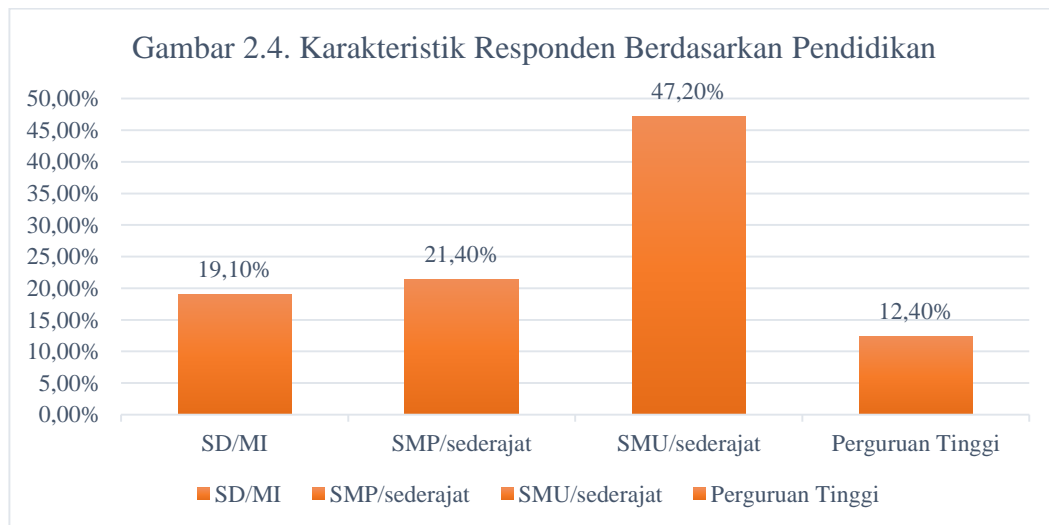
Gambar 2.3. Strategi Pengambilan Sampel SDI 2021



Dengan menggunakan *margin of error* <0,05, maka ditetapkan 246 kabupaten/kota dan 667 desa/kelurahan yang menjadi target pengumpulan data. Penentuan nama kabupaten/kota dan desa/kelurahan yang menjadi sampel dilakukan secara random oleh Tim SDI nasional. Dari setiap

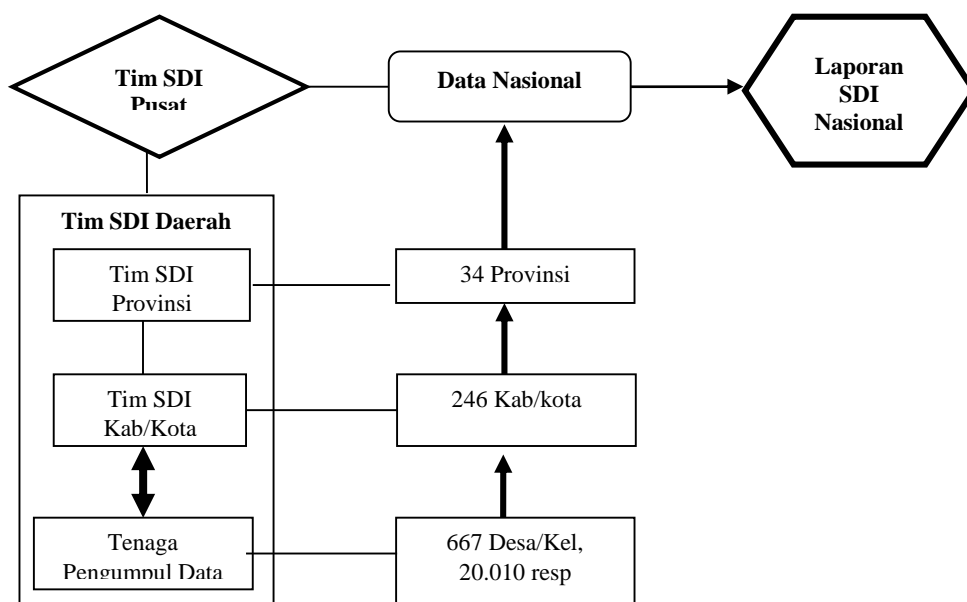
desa/kelurahan terpilih diambil 1 RW secara random, dan dari RW terpilih tersebut diambil 1 RT secara random. Penentuan RW dan RT terpilih dilakukan secara random oleh Tim SDI Kabupaten/Kota bersama tenaga pengumpul data setempat. Pada RT yang terpilih secara random tersebut diambil 30 responden, dengan kategori usia 10-19 tahun sebanyak 6 orang yang mencakup 3 laki-laki dan 3 perempuan, usia 20-44 tahun sebanyak 16 orang yang mencakup 8 laki-laki dan 8 perempuan, dan usia 45-60 tahun sebanyak 8 orang yang mencakup 4 laki-laki dan 4 perempuan.

Total responden seluruh Indonesia sebanyak 20.010 orang, terdiri dari 50,8% laki-laki dan 49,2% perempuan. Dari aspek pendidikan, 19,1% responden berpendidikan SD, sebanyak 21,4% berpendidikan SMP, 47,2% berpendidikan SMA, dan 12,4% berpendidikan perguruan tinggi (lihat gambar 2.4). Dari segi pekerjaan, 24,8% adalah mahasiswa/pelajar, 14,6% petani, 8,4% wirausaha, 7,3% karyawan, 5,1% pedagang, dan 3% merupakan pegawai negeri sipil (lihat gambar 2.5).

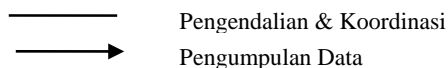


Pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus-Oktober 2021. Sangat disadari bahwa dalam kurun waktu tersebut pandemi Covid-19 belum surut, interaksi dengan responden yang merupakan target pengumpulan data tidak mudah dilakukan, termasuk pertemuan secara *face to face*. Keselamatan tetap menjadi pertimbangan utama, dan karena itu, protokol kesehatan niscaya untuk diterapkan. Ada 2.561 orang yang ikut terlibat dalam proses pengumpulan data. Mereka terdiri dari penanggung jawab SDI di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan tenaga teknis di tingkat Desa/Kelurahan. Pelatihan terhadap tenaga pengumpul data dilakukan secara daring, mengingat pada bulan Juni-Juli 2021 angka penularan Covid-19 mengalami puncaknya di Indonesia.

Gambar 2.6. Alur Pengumpulan Data SDI



Keterangan :



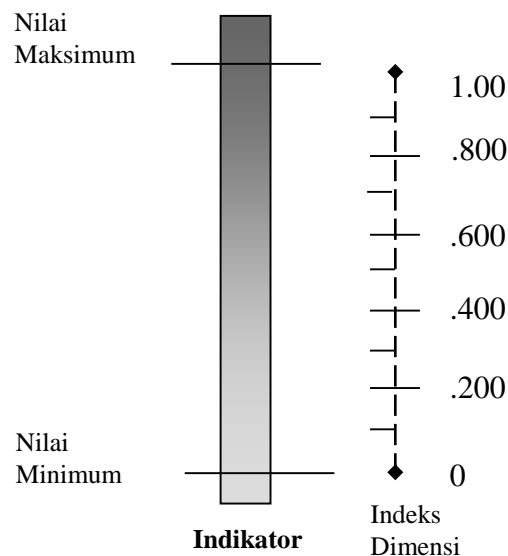
Pengumpulan data SDI dikelola terintegrasi secara nasional dengan pelibatan secara intensif Tim SDI Pusat, Tim SDI provinsi, dan Tim SDI kabupaten/kota (lihat gambar 2.6). Tim tersebut merupakan satu kesatuan yang penugasannya dikoordinasikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Satuan terkecil pengumpulan data ada pada wilayah kabupaten/kota. Data kabupaten/kota tersebut dihimpun berdasarkan pengumpulan data di tingkat desa/kelurahan, yang

berasal dari RW dan RT terpilih. Selanjutnya, gabungan data kabupaten/kota dihimpun menjadi data provinsi, dan gabungan data provinsi dikumpulkan menjadi data nasional. Dengan alur yang demikian, maka data SDI pada dasarnya dikelola dengan pendekatan *bottom-up* mulai dari tingkat daerah hingga nasional.

Dalam pengumpulan data, ada tiga model instrumen yang digunakan, yakni metode tes performa, format isian terbuka, dan skala/angket. Metode tes performa digunakan untuk mengumpulkan data kebugaran. Instrumen yang digunakan adalah MFT (*Multistage Fitness Test*), sebuah tes lapangan untuk menaksir kapasitas aerobik maksimal (vo_{2max}) seseorang, baik pada usia anak, remaja, maupun dewasa, termasuk pada atlet (Léger, Mercier, Gadoury, & Lambert, 1988). Untuk mengumpulkan data SDM olahraga, ruang terbuka, dan performa digunakan format isian terbuka. Sementara untuk mengumpulkan data 5 dimensi yang lain, yakni literasi fisik, partisipasi, perkembangan pribadi, kesehatan, dan ekonomi digunakan skala/angket. Keseluruhan instrumen tersebut sudah diuji validitas, reliabilitas, dan aplikabilitasnya melalui serangkaian ujicoba di lapangan (T.C. Mutohir, Lutan, Maksum, Kristiyanto, & Akbar, 2020a).

Penentuan indeks untuk masing-masing dimensi dilakukan dengan menggunakan skala sebagaimana tampak pada gambar berikut.

Gambar 2.7. Model skala penentuan indeks



Untuk menentukan skala tersebut di atas memerlukan beberapa besaran (yaitu: nilai aktual, nilai maksimum, dan nilai minimum) untuk kemudian dikonversi ke dalam indeks dimensi. Besarnya koefisien yang mencerminkan indeks dimensi berkisar antara 0 dan 1 yang dihasilkan dari formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks dimensi} = \frac{\text{nilai aktual} - \text{nilai minimum}}{\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}}$$

Nilai aktual adalah skor nyata yang diperoleh berdasarkan patokan yang telah ditetapkan. Misalnya, patokan angka partisipasi menggunakan nilai minimum nol dan maksimum 100, patokan angka ruang terbuka menggunakan nilai minimum nol dan nilai maksimum 3,5, dan patokan angka kebugaran menggunakan nilai minimum 20,1 dan nilai maksimum 52,1. Setelah semua indeks dimensi ditemukan, maka proses penghitungan dilanjutkan untuk menghasilkan SDI dengan cara menghitung rata-rata indeks gabungan dari setiap dimensi. Dengan demikian, penghitungan SDI dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks SDI} = \frac{\text{Indeks (D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8 + D9)}}{9}$$

Keterangan: D1= Dimensi SDI pertama, D2= Dimensi SDI kedua, dst

Adapun norma yang dipakai untuk mengkategorisasikan indeks SDI adalah sebagai berikut.

- 0,800 – 1 = Kategori tinggi
- 0,500 – 0,799 = Kategori menengah
- 0 – 0,499 = Kategori rendah

Agar bisa mendapatkan data nasional yang mudah, cepat dan terkendali, maka sistem pengumpulan data dibantu sistem informasi berbasis web yang disebut dengan SISDI. Sistem aplikasi tersebut digunakan untuk memasukkan dan menghimpun data dari unit terkecil mulai dari desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Data tersebut dikumpulkan secara berjenjang oleh Tim SDI daerah dan Tim SDI Pusat. Dengan SISDI tersebut diharapkan, pengumpulan maupun validasi data mudah diakses dengan perangkat yang ada hanya dengan menggunakan aplikasi browser dan tidak menggunakan aplikasi lainnya yang menyulitkan bagi pengguna.

Verifikasi data dilakukan pada setiap tingkatan untuk memastikan kebenaran data. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dan telah diverifikasi/divalidasi akan diakumulasi menjadi data SDI. Untuk mendukung keakuratan data, maka dalam sistem pengambilan data diberikan data input dalam bentuk format yang ditentukan besarannya maupun pilihannya sedemikian rupa sehingga tingkat kesalahan dalam memasukkan data dapat dihindari. Untuk menjamin kebenaran, sebuah input data harus disertai bukti otentik berupa foto atau dokumen digital yang didapatkan lewat rekaman langsung. Sebelum data dimasukkan atau di entri perlu dilakukan konfirmasi terhadap data yang diperoleh untuk memastikan apakah data yang telah dimasukkan sudah benar dan/atau dari sumber data yang benar atau tidak. Kemudian penanggung jawab pengumpul data harus memastikan bahwa data yang diterima tersebut sudah diverifikasi/validasi, dengan cara membuat berita acara yang ditanda tangani.

Kesimpulan

1. Sebagai sebuah ukuran, SDI sudah diterapkan kurun waktu 2003-2007 yang mencakup 4 dimensi, yakni SDM olahraga, ruang terbuka, partisipasi, dan kebugaran. Seiring perubahan paradigma pembangunan olahraga dan tuntutan publik, maka dimensi SDI disempurnakan menjadi menjadi 9 dimensi, dengan menambahkan literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, performa, dan ekonomi.
2. SDI merupakan model evaluasi komprehensif terhadap pembangunan olahraga dengan menggunakan instrumen yang terukur dan valid. Keberhasilan pembangunan olahraga tidak dapat dinilai gagal atau berhasil, bahkan tidak dapat diperbaiki apabila tidak ada ukuran yang jelas untuk menilai. Perbaikan hanya mungkin dilakukan melalui kebijakan dan intervensi program berbasis data – *evidence based policy*.
3. Pengumpulan data SDI 2021 menyasar 34 Provinsi, 246 Kabupaten/Kota, 594 Kecamatan, 667 Desa/Kelurahan, dan 20.010 responden yang berusia 10-60 tahun dengan proporsi 50,8% laki-laki dan 49,2% perempuan.
4. Manajemen pengumpulan data SDI 2021 dilakukan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan membentuk Tim SDI, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan tenaga teknis di lapangan. Total tenaga pengumpul data sebanyak 2.561 orang. Untuk menjamin kecepatan dan kualitas data, pengorganisasian data SDI dilakukan dengan berbasis pada elektronik.

Bab 3 Pilar Utama Pembangunan Olahraga

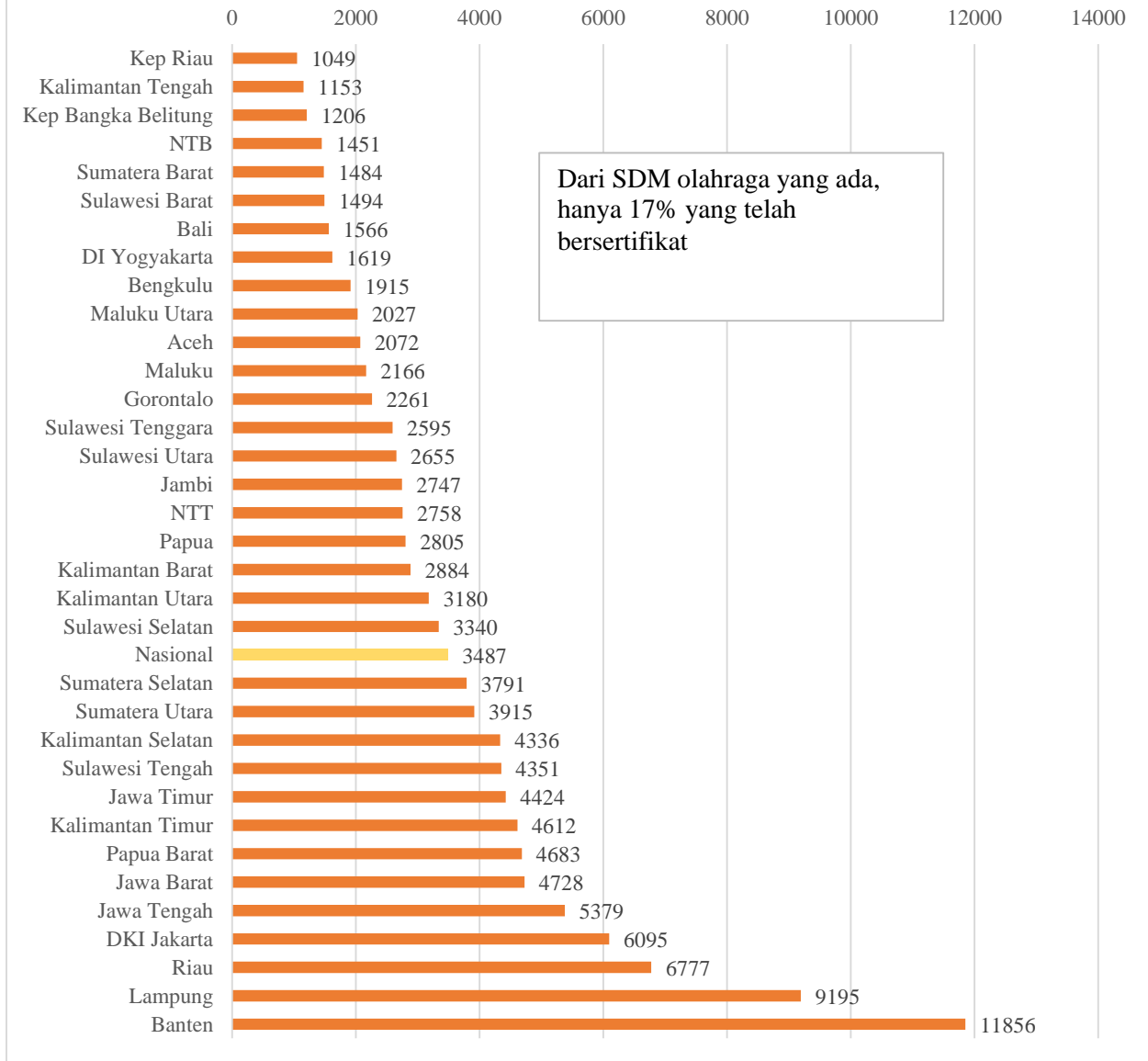
SDM Olahraga

Ketersediaan sumberdaya manusia dalam pembangunan olahraga merupakan sebuah keniscayaan. Mengapa? Karena merekalah yang akan mengedukasi, menggerakkan, dan memberikan layanan pelatihan kepada masyarakat. Dalam konteks olahraga pendidikan di sekolah, maka guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang selanjutnya disebut dengan guru olahraga menjadi ketenagaan utama. Dalam konteks olahraga rekreasi di masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan kebugaran dan kesenangan, maka keberadaan instruktur dan sukarelawan menjadi urgen. Hal yang sama juga terjadi pada olahraga prestasi yang mengedepankan pencapaian performa tinggi, maka peran pelatih menjadi dominan.

Laporan ini memaparkan bahwa rasio SDM olahraga dan jumlah penduduk usia ≥ 5 tahun secara nasional adalah 1:3487 (lihat gambar 3.1). Artinya, satu orang tenaga keolahragaan melayani 3487 penduduk. Rasio tertinggi ada pada Provinsi Lampung dengan perbandingan 1:9195, sementara rasio terendah ada pada provinsi Kepulauan Riau dengan perbandingan 1:1049. Secara nasional, angka tersebut menunjukkan kesenjangan yang terlalu tinggi antara ketersediaan SDM olahraga dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sebagai perbandingan dapat digambar profesi yang lain. Polisi, misalnya, rasio polisi dan jumlah penduduk di Indonesia sebesar 1:411 atau 243 per 100 ribu penduduk. Demikian juga rasio dokter dan jumlah penduduk di Indonesia sebesar 1:2500 atau 0,4 per 1000 penduduk. Padahal interaksi kedua profesi terakhir tersebut tidak setinggi SDM olahraga seperti guru olahraga dan pelatih. Guru olahraga dan instruktur olahraga sekurang-kurangnya 1 kali/minggu berinteraksi dengan mereka yang dilayani. Sementara itu, profesi dokter dan polisi, belum tentu dalam satu tahun orang yang sama akan menerima layanan.

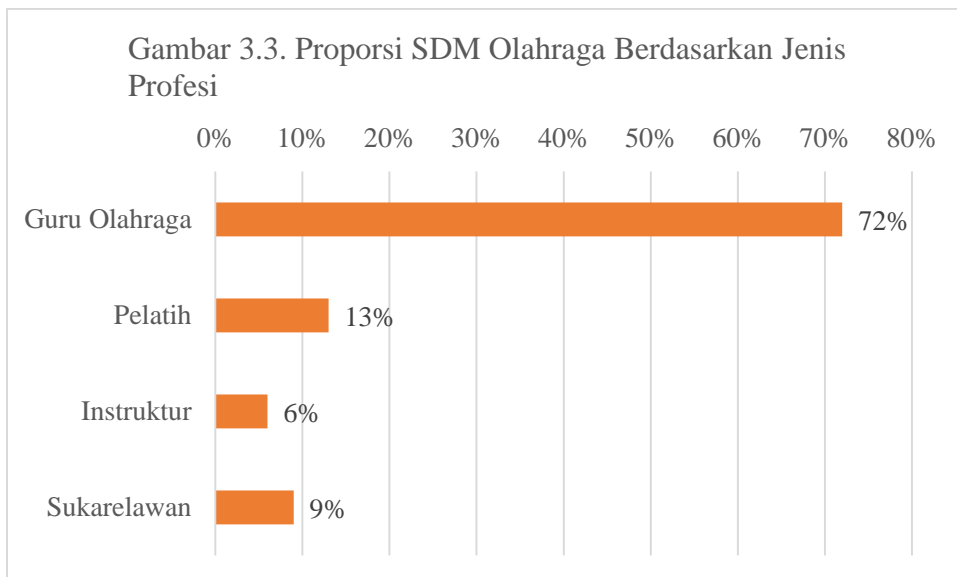
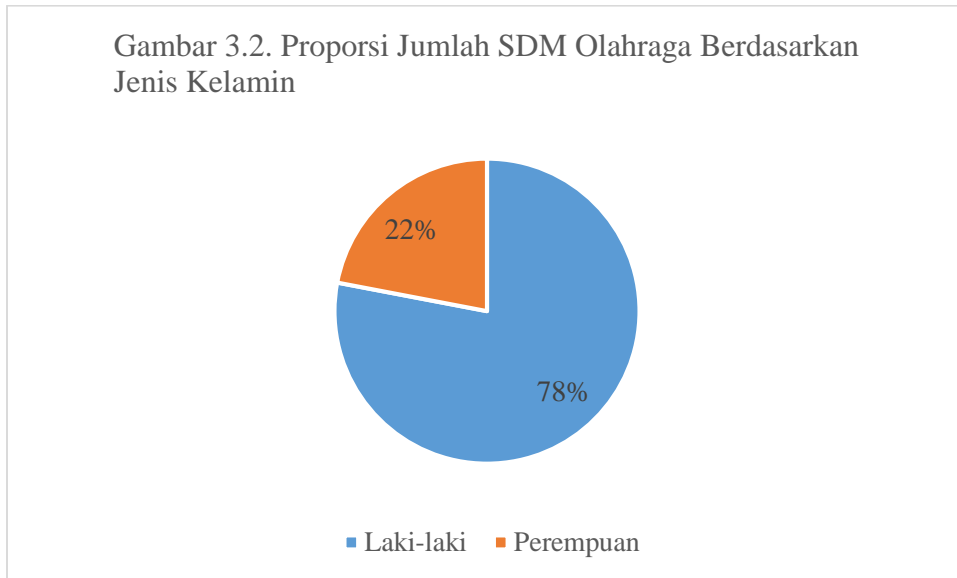
Dilihat dari aspek jenis kelamin, 78% ketenagaan olahraga masih didominasi oleh laki-laki. Sementara itu, perempuan hanya 22% (lihat gambar 3.2). Data tersebut menunjukkan bahwa peran perempuan dalam olahraga belum seperti yang diharapkan. Seolah ada kesan kuat bahwa olahraga adalah dunia laki-laki yang cenderung merepresentasikan kekuatan dan kecepatan. Sebaliknya, perempuan lebih diimajinasikan sebagai makhluk yang lemah-lembut. Konstruksi sosial yang demikian harus diubah dalam rangka memberikan akses yang setara bagi perempuan pada domain publik, termasuk olahraga.

Gambar 3.1. Rasio Layanan SDM Olahraga dengan Jumlah Penduduk



Dilihat dari jenis profesi, sebagian besar (72%) SDM olahraga merupakan guru olahraga, baru diikuti pelatih, sukarelawan, dan instruktur (lihat gambar 3.3). Data tersebut menunjukkan bahwa ada relasi yang sangat kuat antara bidang keolahragaan yang merupakan portofolio Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan bidang pendidikan yang merupakan kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pembinaan karir guru olahraga ada pada Kementerian Pendidikan. Sementara itu, secara substansi pekerjaannya sangat berkaitan dengan

dengan Kementerian Olahraga. Relasi tersebut semakin intens dalam konteks Sekolah Olahraga dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar yang tersebar di seluruh Indonesia.



Ada hal menarik terkait dengan data SDM olahraga, yakni munculnya sukarelawan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang serius. Sukarelawan adalah tenaga keolahragaan yang melibatkan diri dalam kegiatan olahraga selain guru, pelatih, dan instruktur. Jumlahnya pun cukup fantastik, sebanyak 9% dari total SDM olahraga. Di sejumlah negara maju, sukarelawan olahraga berkembang dan dikelola dengan baik. Di Australia, misalnya, diperkirakan 3,1 juta

orang Australia berpartisipasi dalam olahraga rekreasi setiap tahun. Lebih dari 90% dari mereka (2,9 juta) adalah sukarelawan. Relawan berkontribusi pada nilai sosial dan ekonomi olahraga, terutama di tingkat masyarakat. Banyak olahraga dan organisasinya tidak akan dapat berjalan tanpa relawan yang mengisi banyak peran penting, seperti pelatih, pejabat, manajer, administrator, dewan, dan anggota komite. Relawan juga mendukung acara-acara besar, seperti Olimpiade, Paralimpiade, dan Commonwealth Games. Mereka menyumbangkan waktu dan energinya untuk klub olahraga dan rekreasi komunitas. Perkiraan nilai input tenaga kerja oleh sukarelawan sektor olahraga di Australia adalah \$4 miliar per tahun (Australasian Sport Information Network, 2021).

Meskipun ketersediaan SDM olahraga yang tercermin dalam rasionya dengan jumlah penduduk adalah penting, tetapi itu saja belum cukup. Kuantitas harus diimbangi dengan kualitas SDM olahraga itu sendiri. Laporan ini memaparkan bahwa dari jumlah SDM olahraga yang tersedia, hanya 17% dari mereka yang telah bersertifikat. Artinya, jika sertifikat dianggap sebagai indikator mutu, maka kualitas SDM olahraga Indonesia masih jauh dari harapan. SDM yang tidak bermutu pada gilirannya tidak memiliki daya ubah terhadap lingkungannya. Hasil kajian yang lebih dalam menunjukkan bahwa ketersediaan SDM olahraga dalam jumlah tidak berkorelasi dengan literasi fisik dan partisipasi berolahraga masyarakat di sekitarnya.

Tabel 3.1. Hasil Uji Korelasi antara SDM, Literasi Fisik, dan Partisipasi

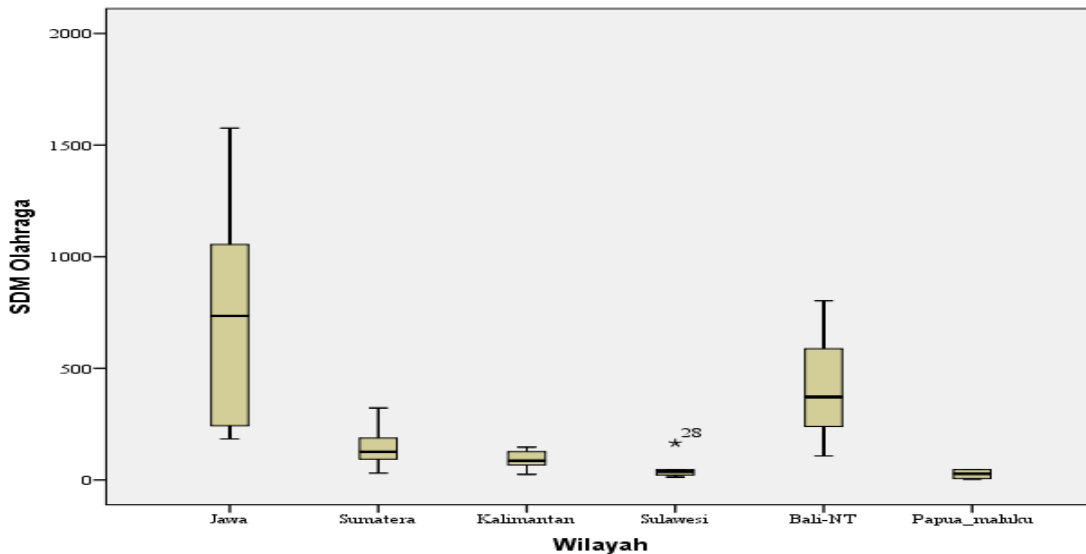
		SDM Olahraga	Literasi fisik	Partisipasi
SDM Olahraga	Pearson Correlation	1	-.234	-.267
	Sig. (2-tailed)		.183	.127
	N	34	34	34
L_fisik	Pearson Correlation		1	.645**
	Sig. (2-tailed)			.000
	N			34
Partisipasi	Pearson Correlation			
	Sig. (2-tailed)			
	N			

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kondisi tersebut analog dengan ketersediaan tenaga guru di Indonesia. Dari sisi jumlah, rasio guru dan siswa di Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia, mengalahkan Malaysia, Singapura, Korea, dan Jerman. Rasio guru-murid di Indonesia sebesar 1:18, sementara di Korea

1:30 dan Jerman 1:20. Namun demikian, soal mutu jauh panggang daripada api. Akibatnya, mutu pendidikan di Indonesia tetap saja rendah dibanding sejumlah negara yang lain (World Bank, 2015, 2020).

Gambar 3.4. Distribusi SDM Olahraga Berdasarkan Wilayah

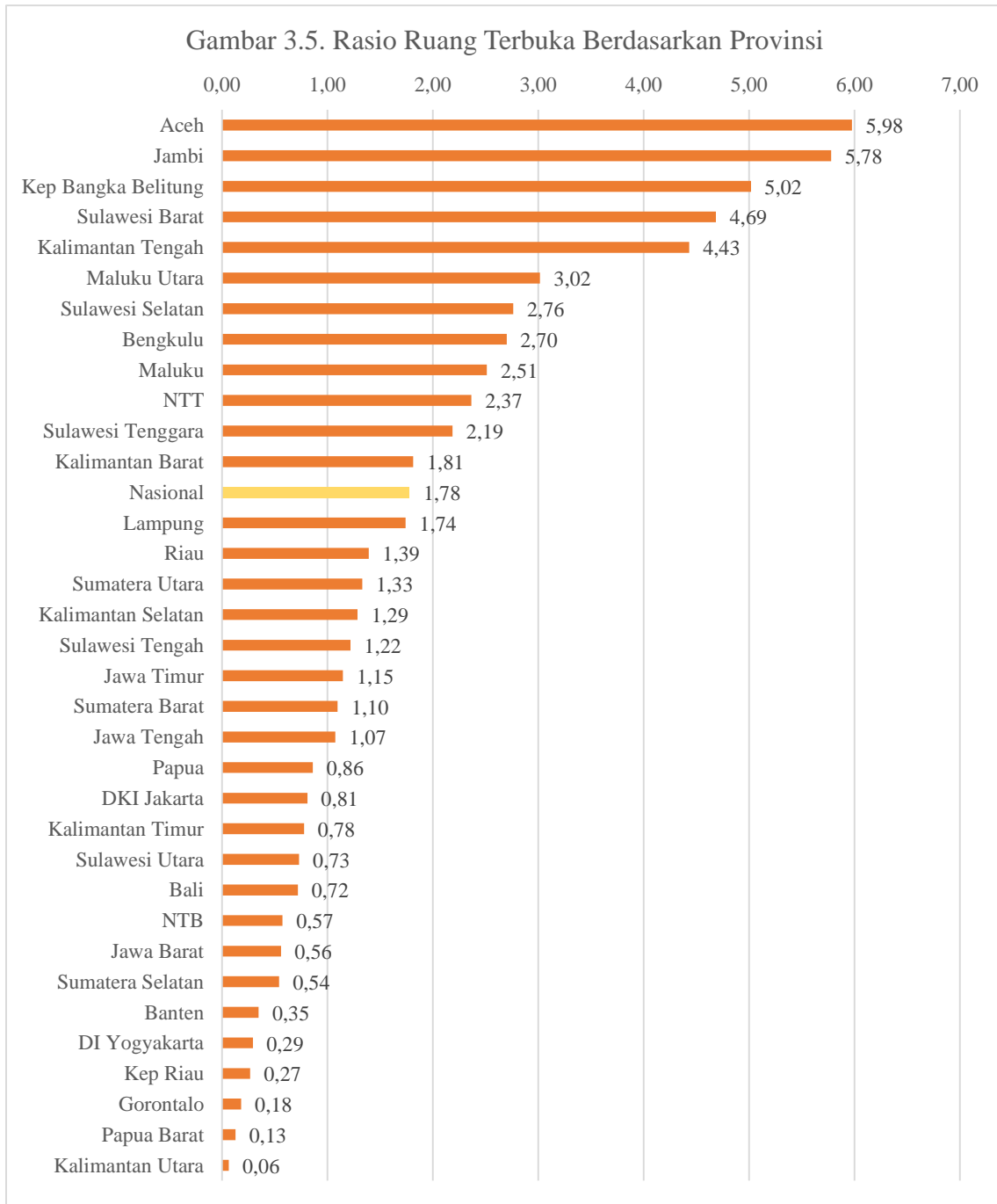


Penyebaran atau distribusi SDM olahraga juga merupakan masalah. Data yang dihimpun dalam laporan ini menunjukkan bahwa wilayah Jawa memiliki rerata yang jauh lebih tinggi dibanding di luar Jawa. Meskipun demikian perlu diingat bahwa banyaknya SDM olahraga tidak serta merta dapat dianggap provinsi di Jawa memiliki kemewahan dalam ketenagaan olahraga. Dalam beberapa kasus, provinsi di luar Jawa seperti Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat memiliki rasio layanan yang lebih baik dibandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa Barat.

Infrastruktur Olahraga

Infrastruktur yang dimaksud di sini adalah prasarana dasar berupa ruang terbuka olahraga, baik *indoor* maupun *outdoor*, yang dibangun oleh pemerintah, swasta, maupun perseorangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berolahraga. Ruang terbuka merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik. Keberadaan ruang terbuka olahraga yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat dapat mendorong terciptanya suatu masyarakat yang gemar berolahraga atau beraktivitas fisik. Sayangnya, dewasa ini masyarakat sudah semakin sulit mendapatkan ruang terbuka olahraga sehingga tidak heran apabila lahan parkir, taman, dan bahkan

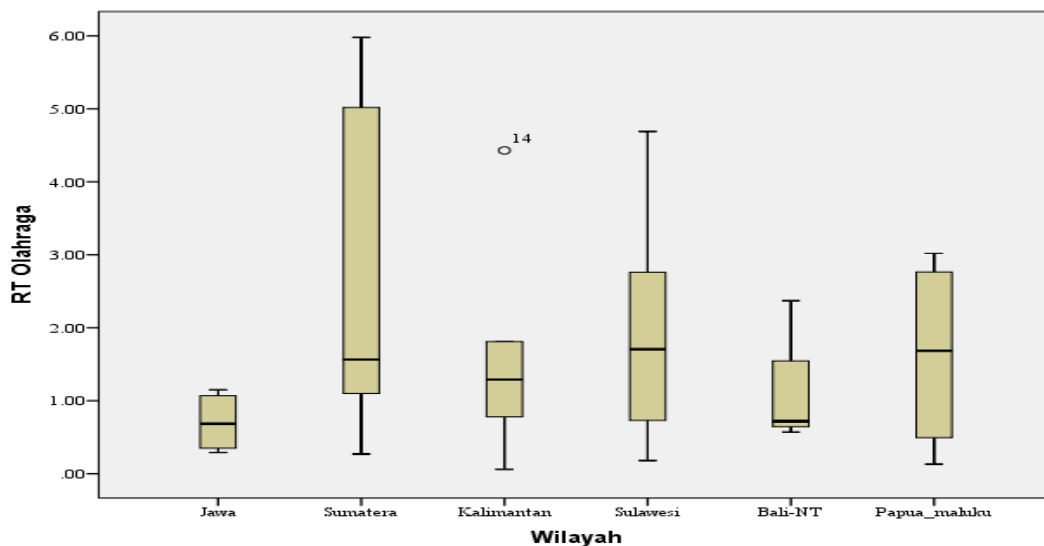
badan jalan digunakan untuk melakukan aktivitas olahraga seperti sepakbola. Pada sisi yang lain, kita menyaksikan pada hari minggu masyarakat memadati sejumlah lapangan utama seperti Gelora Senayan untuk berolahraga atau sekadar jalan-jalan. Mereka rela datang meskipun dari pinggiran kota mengingat di lingkungan tempat mereka sudah tidak ada lagi ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan.



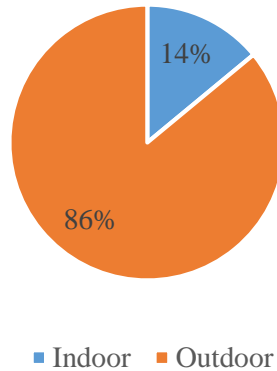
Idealnya, untuk dapat dikatakan sebagai ruang terbuka olahraga memenuhi syarat kelayakan. Pertama, didesain untuk kepentingan olahraga. Syarat ini merujuk pada pengertian bahwa prasarana yang ada memang sengaja dirancang untuk kegiatan olahraga. Banyak tempat yang digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga, tetapi sebenarnya tempat itu bukan didesain untuk kegiatan olahraga. Misalnya, taman-taman di perkotaan, badan jalan, lahan kosong di sekitar pemukiman, dan sebagainya. Aktivitas olahraga yang dilakukan bukan pada tempatnya, selain dapat merusak fungsi sebenarnya dari tempat tersebut, juga bisa jadi berbahaya bagi pelaku olahraga sendiri. Kedua, digunakan untuk olahraga. Syarat ini sangat jelas bahwa tempat yang disebut ruang terbuka tersebut digunakan untuk kegiatan olahraga. Pertanyaannya, apakah ada tempat yang didesain untuk olahraga tetapi tidak digunakan untuk olahraga? Jawabannya ada, yaitu tempat olahraga yang telah beralih fungsi. Meskipun secara fisik tidak berubah, tetapi tempat tersebut lebih banyak digunakan untuk kegiatan selain olahraga. Misalnya, untuk kegiatan jual-beli atau pasar, tempat parkir.

Ketiga, bisa diakses oleh masyarakat luas. Syarat ini pada hakikatnya melekat pada makna dari ruang terbuka itu sendiri. Artinya, tempat tersebut harus dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta dapat diakses oleh berbagai kondisi fisik manusia. Dengan syarat ini, tempat-tempat olahraga seperti lapangan golf, kolam renang pribadi, dan *jogging track* pribadi yang tidak dapat diakses olah masyarakat luas tidak termasuk dalam definisi ruang terbuka.

Gambar 3.6. Peta Ruang Terbuka Olahraga Berdasarkan Wilayah

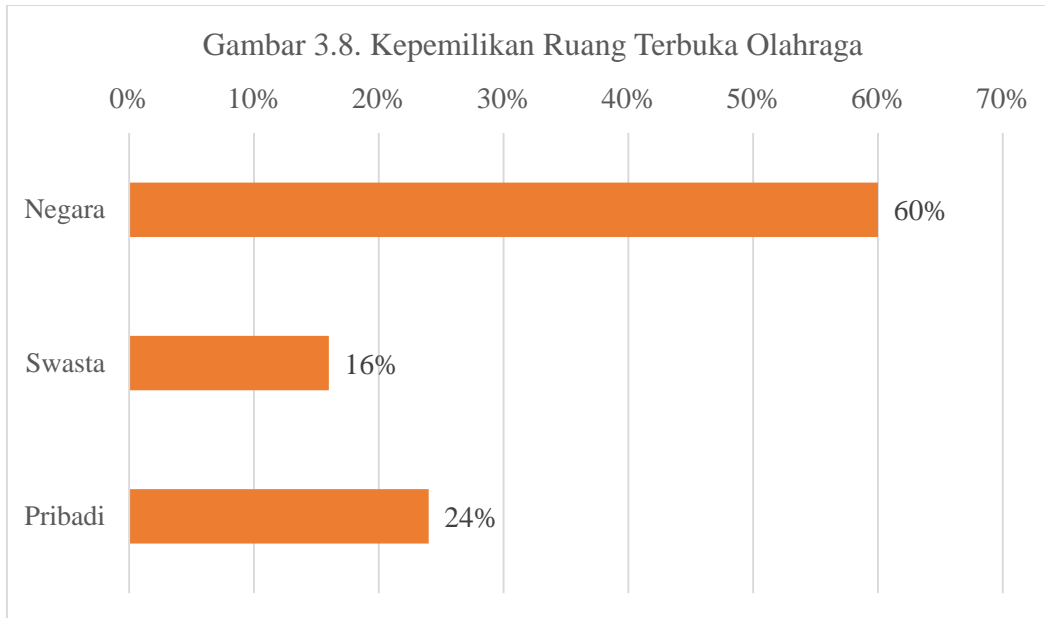


Gambar 3.7. Proporsi Ruang Terbuka Olahraga Berdasarkan Jenisnya



Dalam laporan ini, ruang terbuka didefinisikan sebagai suatu tempat yang digunakan untuk kegiatan berolahraga oleh sejumlah orang dalam bentuk bangunan (*indoor*) dan/atau lahan (*outdoor*), yang dapat diakses oleh masyarakat. Bangunan atau lahan tersebut bisa berbentuk lapangan yang standar maupun tidak. Ruang terbuka yang memadai, bahkan menjadi syarat terbentuknya partisipasi dalam aktivitas olahraga. Terpenuhinya kebutuhan akan ruang terbuka menjadi jaminan yang menstimulasi partisipasi dalam olahraga. Sebaliknya, ruang terbuka yang kurang memadai ketersediaannya akan menjadi alasan partisipasi masyarakat yang rendah dalam berolahraga.

Laporan ini memberikan data bahwa secara nasional rasio ruang terbuka dengan jumlah penduduk sebesar $1,78\text{m}^2$. Artinya, satu orang memiliki ruang gerak sebesar $1,78\text{m}^2$. Angka tersebut masih jauh dari standar, yakni sebesar $3,5\text{m}^2$. Terdapat lima provinsi yang keberadaan ruang terbuka olahraganya melebihi standar, yakni Aceh, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah. Seluruh provinsi yang berada di Jawa, yang meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, ruang terbuka olahraganya berada di bawah rerata nasional. Secara umum, wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Papua memiliki ruang terbuka olahraga yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah lain.



Dilihat dari jenisnya, 86% ruang terbuka olahraga berbentuk lahan atau hamparan, dan hanya 14% yang berbentuk bangunan gedung. Dari perspektif pengadaan, ruang terbuka yang berbentuk lahan memang lebih murah karena tidak membutuhkan infrastruktur gedung. Selain itu, model lahan terbuka juga lebih multifungsi. Masyarakat yang ingin bermain sepakbola, bolavoli, dan bahkan hanya sekadar jogging dan senam ringan dapat melakukannya di ruang terbuka dalam bentuk lahan.

Ditinjau dari aspek kepemilikan, sebagian besar (60%) dimiliki oleh negara, dalam hal ini pemerintah daerah, baik pada level provinsi, kabupaten/kota, hingga ke desa/kelurahan. Meskipun demikian, perlu diapresiasi terkait keterlibatan masyarakat, dalam hal ini swasta dan pribadi, dalam menyediakan ruang terbuka. Orang pribadi menyumbang 24% dari ketersediaan ruang terbuka olahraga. Karena kepemilikan pribadi, ada kemungkinan seiring waktu dan kebutuhan akan mengalami alih fungsi. Hal yang demikian perlu diantisipasi.

Sebagai ruang terbuka, prasarana yang dikembangkan harus mampu memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat untuk berolahraga, seperti anak-anak, remaja, orang tua, bahkan para manula dan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, baik pria maupun wanita. Dari pengamatan, sarana prasarana dan semua fasilitas lainnya yang ada saat ini masih menunjukkan keberpihakan pada sekelompok masyarakat yang secara fisik dan motorik mampu, atau bagi sekelompok masyarakat yang secara ekonomi mampu melakukan olahraga di tempat itu. Misalnya penggunaan lapangan olahraga yang hanya dapat digunakan oleh sebagian masyarakat yang menghendaki dan dapat memperoleh prestasi olahraga yang tinggi. Ukuran-

ukuran lapangan yang standar menurut peraturan olahraga kompetitif. Banyak sarana dan prasarana olahraga milik swasta yang harus disewa dengan harga yang relatif mahal, seperti pusat-pusat kebugaran atau sanggar-sanggar senam. Di samping itu, suasana atau nuansa pelaksanaan olahraga yang dimotori oleh sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan gerak yang lebih cenderung bernuansa kompetitif, sehingga sebagian masyarakat yang kebetulan ditakdirkan oleh Tuhan kurang memiliki kemampuan gerak yang lebih, tidak dapat melakukan olahraga sesuai dengan kemampuannya.

Tabel 3.2. Hasil Uji Korelasi antara RT Olahraga, Partisipasi, dan Kebugaran

		RT Olahraga	Partisipasi	Kebugaran
RT Olahraga	Pearson Correlation	1	.129*	.150*
	Sig. (2-tailed)		.043	.018
	N		246	246
Partisipasi	Pearson Correlation		1	.265**
	Sig. (2-tailed)			.000
	N			246
Kebugaran	Pearson Correlation			1
	Sig. (2-tailed)			
	N			

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka berkorelasi dengan tingkat partisipasi dan kebugaran masyarakat di sekitarnya. Semakin banyak ruang terbuka olahraga yang tersedia, maka semakin meningkatkan partisipasi dan kebugaran masyarakat.

Anggaran

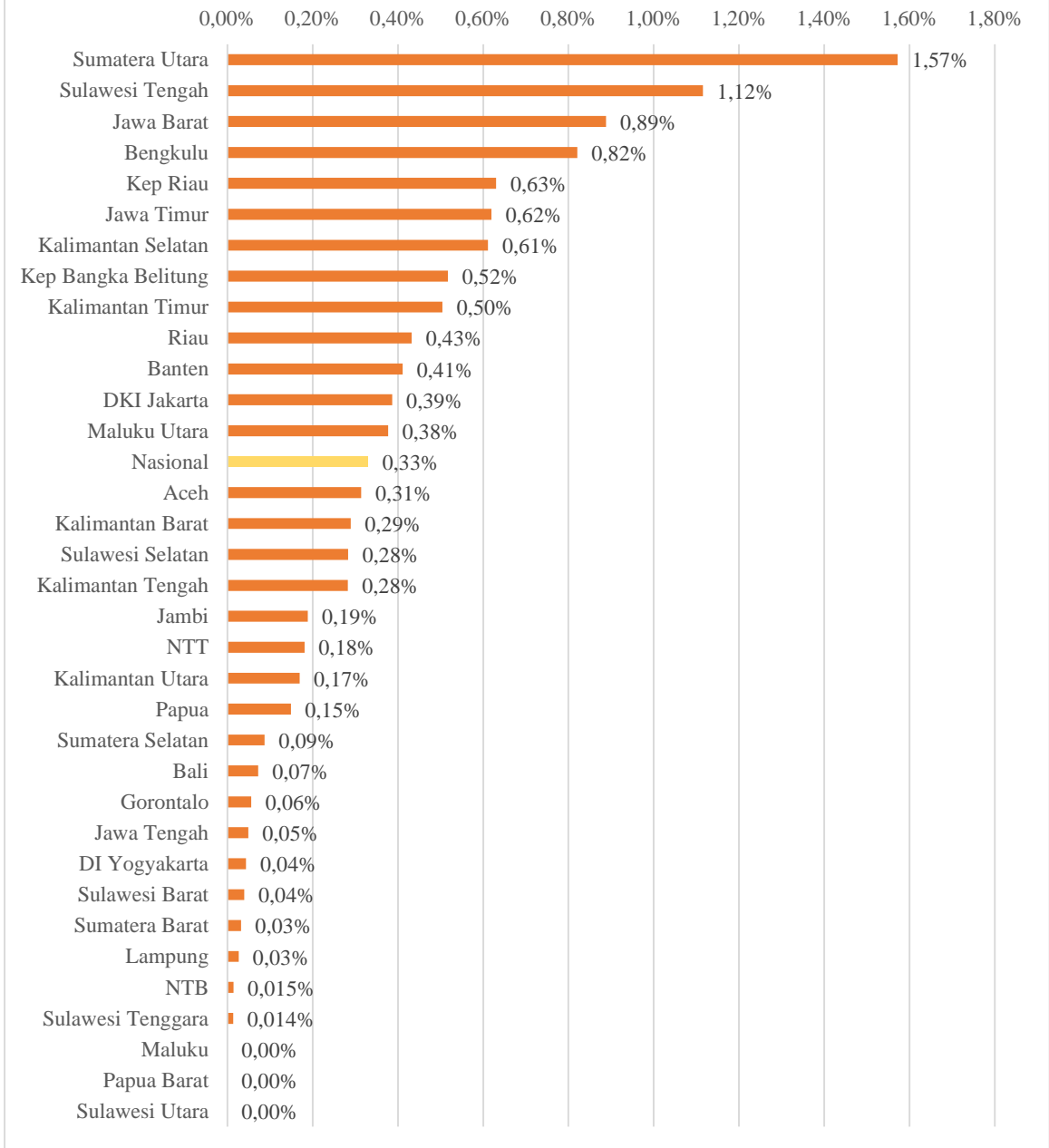
Anggaran merupakan “darah” bagi berkembangnya olahraga, terlebih pada olahraga prestasi. Gejala ini mulai menguat ketika olahraga bukan lagi sekadar menyalurkan hobi yang bersifat kesukarelaan, namun telah berubah menjadi aktivitas yang bernilai ekonomi. Fenomena ini ditandai dengan perubahan logika penyelenggaraan olahraga menjelang tahun 1980-an, ketika IOC mengalami krisis keuangan dan biaya penyelenggaraan Olimpiade semakin mahal dan bahkan meninggalkan utang, misalnya Olimpiade Munhen 1972 dan Olimpiade Montreal 1976, maka

logika penyelenggaraan multieven Olimpiade berubah dari logika politik ke logika ekonomi. Maka untuk menyelenggarakan Olimpiade 1984, hanya kota Los Angeles AS yang mengajukan diri sebagai tuan rumah. IOC berada di persimpangan jalan, dan presiden IOC Juan Antonio Samaranch yang berlatar belakang pendidikan ekonomi dengan berat hati sebenarnya untuk menyetujui proposal Peter Ubertoth bahwa Olimpiade dilaksanakan dengan pendekatan ekonomi. Pola penyelenggaraan Olimpiade yang dirintis di LA tahun 1984 inilah yang diteruskan hingga sekarang sehingga makin ketat kompetisi dalam memenangkan *bidding* yang *notabene* membutuhkan biaya besar, meskipun belum tentu terpilih.

Perubahan yang amat mendasar adalah olahraga melalui pengembangan industri olahraga berubah total, struktur dan wataknya menjadi sebuah komoditi. Komoditas adalah barang ekonomi, dibeli dan dijual di pasar. Dengan demikian semua komoditas memiliki nilai tukar ekonomi. Komodifikasi adalah proses dimana benda atau kegiatan, seperti olahraga, menjadi barang ekonomi, diproduksi bukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan produsen, tetapi untuk dibeli dan dijual di pasar guna melayani kepentingan konsumen.

Istilah komodifikasi banyak digunakan oleh sosiolog olahraga untuk menggambarkan efek proses komersialisasi pada olahraga (Stewart, 2007). Ini mungkin melibatkan perubahan aturan, format atau penjadwalan acara olahraga, atau meningkatnya penggunaan tontonan dan sandiwara. Proses komodifikasi telah dievaluasi dengan cara yang berbeda. Kaum Marxis seperti Bero Rigauer (teori korespondensi; Marxisme) berpendapat bahwa bukti ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa olahraga secara langsung tumbuh dari proses sosial kapitalis. Lainnya, yang mungkin dicap budayawan populer, berpendapat bahwa olahraga yang dikomodifikasi hanyalah keinginan dan ekspresi masyarakat – olahraga mengambil bentuk ini karena itulah yang diinginkan masyarakat. Mereka yang menganjurkan teori kritis menanggapi dengan argumen bahwa karena begitu sedikit alternatif yang ada untuk olahraga modern yang dikomodifikasi, selera populer kurang informasi dan dibatasi dan dengan demikian orang tidak bebas untuk membuat pilihan 'nyata'. Mereka lebih lanjut berpendapat bahwa, sementara olahraga pernah menjadi kritik parsial kapitalisme - nonutilitarian, membebaskan dan menawarkan ruang lingkup untuk perlawanan sosial - olahraga sekarang ditentukan oleh nilai tukar. Akibatnya, olahraga telah kehilangan 'konten atau bentuk intrinsiknya. Olahraga sudah berubah sifat dan wataknya, hilang keindahannya yang sejati karena yang diutamakan prestasi, kompetisi dan hadiah. Atlet diperlakukan seperti mesin.

Gambar 3.9. Persentase Anggaran Olahraga dari APBD Menurut Provinsi



Fenomena sistem penghargaan dalam PON XX 2021 Papua mengubah persepsi publik terkait partisipasi dalam olahraga prestasi dengan bonus fantastis yang bakal mengubah pola partisipasi atlet bukan karena dorongan motivasi intrinsik untuk memperlihatkan keunggulan melebihi batas kemampuan, tetapi untuk memperoleh tujuan di luar kegiatan itu yakni hadiah uang yang melimpah.

Laporan ini memaparkan bahwa rerata nasional anggaran olahraga sebesar 0,33% dari APBD 2020. Tiga provinsi tertinggi anggaran olahraga adalah Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Barat, yang masing-masing mengalokasikan 1,57%, 1,12%, dan 0,89% dari APBD. Sementara itu, tiga provinsi yang anggaran olahraganya terendah adalah Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung, yang masing-masing sebesar 0,014%, 0,015%, dan 0,03%. Rerata nasional besaran anggaran olahraga sebesar 51 milyar, tepatnya 51.107.742.863 rupiah. Anggaran olahraga tertinggi dimiliki oleh Jawa Barat dengan besaran 409 milyar, tepatnya 409.308.221.512 rupiah. Sementara itu, untuk anggaran olahraga terendah dimiliki Sulawesi Tenggara dengan besaran 791 juta, atau tepatnya 791.150.000 rupiah. Ada korelasi yang signifikan antara besarnya APBD dengan anggaran olahraga yang dialokasikan.

Tabel 3.1. Ringkasan APBD dan Anggaran Olahraga Provinsi Tahun 2020

No	APBD 2020		Keterangan	Anggaran Olahraga		Keterangan
1	Rerata	11.087.266.337.877		Rerata	51.107.742.863	
2	Tertinggi	62.230.000.000.000	DKI Jakarta	Tertinggi	409.308.221.512	Jawa Barat
3	Terendah	1.885.315.912.263	Gorontalo	Terendah	791.150.000	Sulawesi Tenggara

Ambisi untuk meraih keunggulan yang ditandai dengan perolehan medali membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebagai ilustrasi, dalam persiapan menuju Olimpiade 2004, pemerintah Inggris mengalokasikan anggaran sebesar £70 juta atau sekitar 1,3 trilyun rupiah. Dalam olimpiade tersebut, Inggris mendapatkan 30 medali, 9 diantaranya merupakan medali emas. Jika dihitung, maka harga setiap medali sekitar £2,3 juta atau sekitar 43 milyar rupiah (Houlihan & Green, 2008). Pada konteks nasional seperti PON, kita bisa pelajari dari Jawa Barat. Dalam persiapan PON 2016, Jawa Barat mengalokasikan dana sebesar 461 milyar. Dalam PON tersebut, Jawa Barat meraih 531 medali, terdiri dari 217 emas, 157 perak, dan 157 perunggu. Jika dihitung, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk 1 medali sebesar 868 juta atau mendekati 1 milyar.

Determinasi anggaran dalam pencapaian olahraga elit sangat terasa. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ketika variabel anggaran, tingkat partisipasi, dan tingkat kebugaran dimasukkan sebagai prediktor performa, terbukti kontribusi variabel anggaran sangat besar.

Tabel 3.2. Analisis Regresi antara Anggaran, Partisipasi, VO2_max dan Performa

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.786 ^a	.618	.576	62.895	

a. Predictors: (Constant), VO2_max, Anggaran Olahraga, Partisipasi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	196.914	172.066		1.144	.262
	Anggaran Olahraga	7.726E-10	.000	.734	5.797	.000
	Partisipasi	-.371	1.529	-.035	-.243	.810
	VO2_max	-5.690	6.885	-.116	-.826	.416

a. Dependent Variable: Performa

Sekali lagi, olahraga membutuhkan biaya besar. Karena itu, keinginan untuk memberikan *mandatory spending* sebesar 2% dalam RUU SKN bisa dipahami (DPR RI, 2020), meski tidak mudah untuk diwujudkan. Anggaran olahraga yang ada di Kemenpora tahun 2021 sebesar 1,8 triliun (0,067% dari APBN). Jika ditingkatkan menjadi 2%, maka anggaran olahraga akan menjadi 55 triliun rupiah. Pihak pertama yang paling keberatan terkait usulan tersebut adalah Kementerian Keuangan dan Pemda. Mengapa? Karena kebijakan tersebut selain tidak berbasis kinerja juga akan menjerat kaki pemerintah, fleksibilitas penganggaran tidak bisa dilakukan. Mengingat sudah terlalu banyak kebijakan *mandatory spending* dalam Undang-Undang, yakni bidang pendidikan 20%, kesehatan 10%, dana desa 10%, dana transfer umum 25%, dan belum termasuk dana otonomi khusus. Secara keseluruhan sudah sekitar 70% yang menjadi *mandatory spending* dalam APBN.

Dalam praktik penganggaran olahraga, yang dibutuhkan sejatinya bukan sekadar *mandatory spending*, tetapi komitmen kolektif pemangku kepentingan. Sangat boleh jadi, dengan visi, program, dan target yang jelas, seperti yang kita berharap dari DBON, maka penganggaran bisa berbasis kinerja dan anggarannya lebih dari 2%. Keberhasilan Indonesia dalam Asian Games 1962 dan 2018, bukan karena mematok anggaran. Demikian juga yang terjadi di luar negeri seperti Amerika, Jepang, dan Australia.

Pembiayaan olahraga tidak mungkin sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, meski dalam negara komunis sekalipun. Sebelum tahun 1990, pemerintah China membiayai olahraga untuk kepentingan menegakkan ideologi. Namun pasca 1990, pembiayaan sudah bergeser kepada swasta melalui sponsorship (Hallmann, Kirstin and Petry, 2013). Di negara-negara maju yang termasuk negara kaya sekalipun memperoleh dana olahraga dari tiga sumber: (1) pemerintah, (2) swasta-korporat, dan (3) toto, kecuali AS, yang sepenuhnya dari pihak swasta-korporat. Artinya, industri olahraga harus terus diupayakan melalui penciptaan ekosistem yang kondusif. Dengan demikian, dunia olahraga akan bisa menghidupi dirinya sendiri.

Kesimpulan

1. SDM olahraga menjadi bagian terpenting dan strategis dari pembangunan olahraga, karena merekalah yang mengonstruksi, mengoperasikan, mendinamisasi, dan mengevaluasi kebijakan dan program. Berdasarkan analisis data, laporan ini menyatakan bahwa rasio SDM olahraga dengan jumlah penduduk berusia ≥ 5 tahun sebesar 1:3487. Dari jumlah SDM yang ada, 78% laki-laki dan 22% perempuan, dan terdiri dari 72% guru, 13% pelatih, 6% instruktur, dan 9% sukarelawan.
2. Dari jumlah SDM olahraga yang tersedia, hanya 17% dari mereka yang telah bersertifikat. Artinya, kualitas SDM olahraga Indonesia masih jauh dari harapan. SDM yang tidak bermutu tidak memiliki daya ubah terhadap lingkungannya. Hasil analisis membuktikan bahwa ketersediaan SDM olahraga dalam jumlah tidak berkorelasi dengan literasi fisik dan partisipasi berolahraga masyarakat di sekitarnya.
3. Rasio ruang terbuka olahraga dengan jumlah penduduk berusia ≥ 5 tahun sebesar 1,78m². Dari ruang terbuka yang ada, 86% berbentuk *outdoor* dan 14% berbentuk *indoor*. Dilihat dari status kepemilikan, 60% milik negara, 16% milik swasta, dan 24% milik pribadi. Hasil analisis membuktikan bahwa ruang terbuka berkorelasi dengan tingkat partisipasi dan kebugaran.
4. Dari keseluruhan Provinsi, rasio anggaran olahraga tahun 2020 terhadap APBD 2020 sebesar 0,33% atau sebesar Rp 51.107.742.863. Anggaran olahraga tertinggi dimiliki oleh Jawa Barat dengan besaran Rp 409.308.221.512. Sementara itu, untuk anggaran olahraga terendah dimiliki Sulawesi Tenggara dengan besaran Rp 791.150.000.

Bab 4 Literasi fisik, Partisipasi, dan Kebugaran

Kualitas hidup adalah istilah generik yang merujuk pada mutu berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Kualitas hidup juga merupakan standar yang diharapkan individu atau masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang baik. Harapan tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai, tujuan, dan konteks sosial budaya di mana individu tersebut berada. Itu sebabnya, organisasi kesehatan dunia (WHO) mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu tentang posisi kehidupan mereka dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka hidup dan dalam kaitannya dengan tujuan mereka (World Health Organization, 2004). Sebagai sebuah konsep yang komprehensif, WHO menjelaskan bahwa kualitas hidup dapat dilihat dari empat aspek, yakni kesehatan, psikologis, sosial, dan lingkungan. (The WHOQOL Group, 1998; World Health Organization, 2012) Keempat dimensi tersebut menjadi ukuran penting dalam melihat kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu negara, terutama dari aspek kesehatan.

Pembangunan, apapun bentuknya, akan bermuara pada perbaikan kualitas hidup manusia, bukan semata pada pertumbuhan ekonomi. Amartya Sen, peraih nobel ekonomi 1998, berpendapat bahwa hakikat pembangunan bukan pada pertumbuhan ekonomi, melainkan pada kebebasan setiap orang untuk mendapatkan akses memperoleh kehidupan yang lebih baik, berkualitas, dan berlangsung lama (Miletzki & Broten, 2017). Untuk apa pertumbuhan ekonomi suatu negara tinggi, tetapi angka harapan hidup warganya relatif pendek. Untuk apa pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi banyak anggota masyarakat yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Pembangunan harus bermanfaat dan dapat dirasakan oleh setiap warga negara. Itulah mengapa, HDI (*Human Development Index*) yang digagas oleh Amartya Sen bersama Mahbub ul Hag, tidak menggunakan GDP (*Gross Domestic Product*) dan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai indikator (Anand & Sen, 1994; Morse & Morse, 2019).

Sejumlah hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang positif antara keterlibatan dalam olahraga dengan kondisi kesehatan seseorang (Booth, Roberts, & Laye, 2012; Kasser & Zia, 2020; Oliveria, Kohl, Trichopoulos, & Blair, 1996). Aktivitas fisik yang dilakukan secara regular mampu menurunkan tekanan darah bagi mereka yang memiliki resiko tekanan darah tinggi (C. J. Huang et al., 2013; Kasser & Zia, 2020; Miragaya, 2017). Penelitian serupa juga menunjukkan bahwa seseorang yang tidak melakukan olahraga memiliki resiko dua kali terkena penyakit kanker daripada seseorang yang aktif melakukan olahraga (Booth et al., 2012; Fuchs, 2015). Meta analisis yang dilakukan terhadap 31 penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara tingginya

aktivitas fisik dengan peningkatan derajat kesehatan. Individu yang melakukan aktivitas fisik secara regular memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan aktivitas fisik (Wu et al., 2017). Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian yang kami lakukan terhadap 480 responden berusia 18-55 tahun di Surabaya, Malang, Kediri, dan Madiun. Aktivitas olahraga yang dilakukan secara teratur terbukti meningkatkan kualitas hidup yang dicerminkan dengan tiga indikator, yaitu *subjective well-being*, *medical symptoms and vitality*, dan *pro-social behavior* (Maksum, Mahardika, & Indahwati, 2004).

Aktivitas fisik dianggap sebagai langkah paling penting dalam meningkatkan kesehatan, tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi seluruh populasi. Kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko penyakit kronis seperti diabetes, depresi, penyakit kardiovaskular, dan stroke. Jika kita terlibat secara teratur dalam aktivitas fisik, dan bahkan dalam jumlah minimal, itu dapat mengurangi risiko banyak penyakit. Penelitian yang dilakukan terhadap 410 responden yang berusia 65-70 tahun di Serbia, Swiss, dan Yunani menunjukkan bahwa aktivitas fisik memiliki pengaruh positif pada kualitas hidup lansia yang lebih baik, yaitu berkontribusi pada kesehatan dan hubungan interpersonal (Samouilidu et al., 2016).

Aktivitas olahraga juga berhubungan erat dengan kesehatan psikis pelakunya (Booth et al., 2012; González-Muniesa et al., 2017; Zubala et al., 2017). Mereka yang terlibat aktif dalam kegiatan olahraga menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak aktif berolahraga. Ketika para remaja terlibat dalam olahraga kompetitif, ternyata mereka menunjukkan konsep diri yang lebih positif dibanding mereka yang tidak terlibat dalam olahraga kompetitif. Konsep diri yang positif tampak tidak hanya dalam dimensi fisik, tetapi juga sosial; dan yang lebih mengesankan adalah pengaruhnya pada perkembangan intelektual. Olahraga juga mampu meningkatkan ketahanan terhadap stress (Fuchs, 2015; C. J. Huang et al., 2013). Hasil studi membuktikan bahwa remaja yang terlibat dalam aktivitas fisik lebih memiliki ketahanan dan mampu mengatasi stressor dari lingkungannya. Sebagaimana dimaklumi bahwa kehidupan remaja sangat rentan terhadap persoalan-persoalan psiko-sosial, seperti godaan terhadap penggunaan obat-obat terlarang, minuman keras, pergaulan bebas, dan penyakit sosial lainnya.

Meski diyakini bahwa olahraga atau aktivitas fisik sebagai cara murah dan efektif untuk meningkatkan kesehatan, tetapi mengapa tidak banyak orang yang melakukannya. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara maju seperti Amerika,

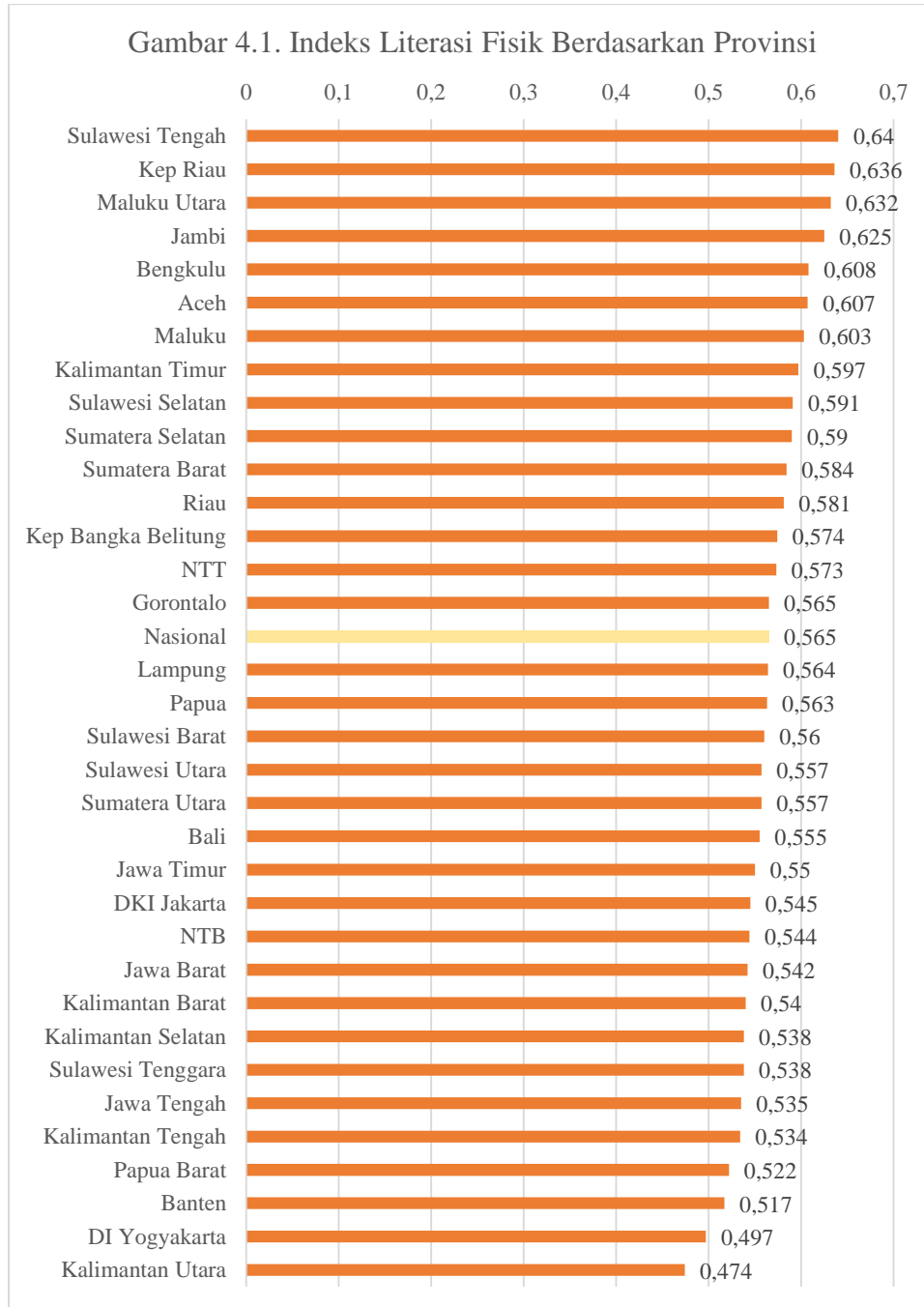
Inggris, dan Australia (Australian Government, 2010; Ng et al., 2014; Sport England, 2016). Partisipasi individu dalam aktivitas fisik menurun seiring bertambahnya usia. Penelitian di Victoria Australia yang melibatkan 520.102 responden menyebutkan bahwa sebagian besar mereka (64,1%) yang aktif berolahraga adalah berusia kurang dari 20 tahun. Hampir sepertiga (27,6%) dari di antara mereka berusia 10-14 tahun, diikuti oleh kelompok usia 5-9 tahun (19,9%). Partisipasi menurun dengan cepat selama masa remaja. Proporsi laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan adalah anak-anak (4–7 tahun) atau dewasa muda 18–29 tahun. Pola ini terbalik di antara anak usia 8-17 tahun. Proporsi yang lebih tinggi dari peserta metropolitan terlibat antara usia 4-13 dan 19-29, sedangkan proporsi yang lebih tinggi dari peserta non-metropolitan bermain selama masa remaja (14-18 tahun) dan selama masa dewasa (>30 tahun).

Data tersebut membuktikan bahwa tingkat partisipasi tertinggi ada pada usia 10-14 tahun di mana perkembangan fisik terjadi secara optimal (Papalia, Olds, & Feldman, 2007; Santrock, 2017), dan penurunan tingkat partisipasi justru terjadi pada usia di mana fungsi organ dan metabolisme tubuh sudah mulai berkurang. Padahal pada usia tersebut sangat dibutuhkan aktivitas fisik guna menjaga daya tahan tubuh dan meminimalkan gangguan kesehatan. Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran berharga bahwa risiko kematian tertinggi ada pada usia 50 tahun ke atas, apalagi jika memiliki penyakit penyerta (komorbid) seperti jantung, hipertensi, dan diabetes (Driggin et al., 2020; Handayani et al., 2020). Pemahaman terhadap pola aktivitas fisik tersebut menjadi penting, terutama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lain, dalam rangka memberikan intervensi yang tepat.

Literasi Fisik

Istilah literasi fisik begitu populer dalam wacana internasional pada dekade terakhir seiring kampanye aktivitas fisik sebagai cara murah dan efektif untuk memperoleh kesehatan (Cairney, Kiez, Paul Roetert, & Kriellaars, 2019; Corbin, 2016; Durden-Myers et al., 2018). Konsep ini berkembang pesat di Inggris dan Kanada, mereka mempelopori dibentuknya *International Physical Literacy Association* (IPLA), sebuah organisasi yang didedikasikan untuk mempromosikan program literasi fisik dan penelitian. Belakangan, *Society of Health and Physical Educators* (SHAPE) Amerika mengadopsi istilah “physically literate person” untuk menggantikan istilah yang telah lebih dulu populer “physically educated person” dalam kurikulum pendidikan jasmani (Roetert, 2019). Secara harfiah, literasi berarti terdidik atau terbudaya. Secara definisi,

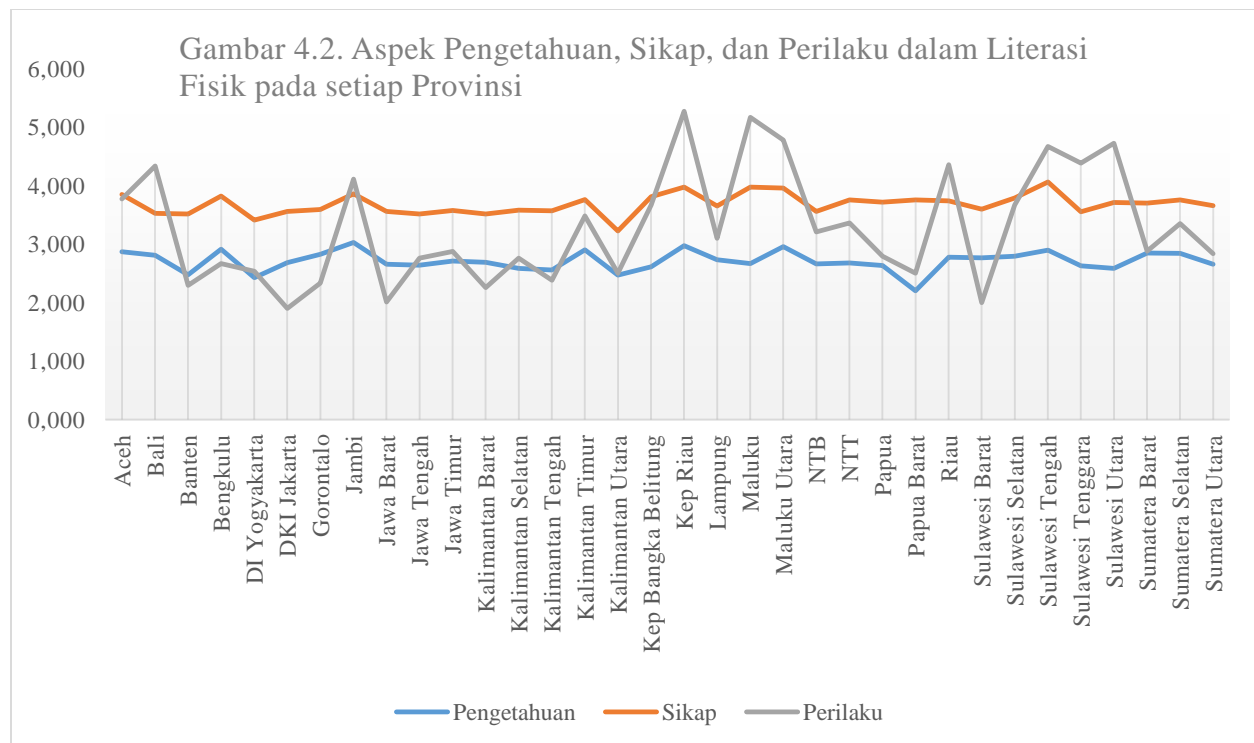
literasi fisik adalah motivasi, kepercayaan diri, kompetensi fisik, pengetahuan dan pemahaman untuk menghargai dan menerima tanggung jawab guna terlibat dalam aktivitas fisik sepanjang hayat (Whitehead, 2013).



Dari definisi tersebut, terdapat empat elemen utama literasi fisik, yakni (1) motivasi dan kepercayaan diri, (2) kompetensi fisik, (3) pengetahuan dan pemahaman, dan (4) keterlibatan.

Motivasi dan kepercayaan diri mengacu pada antusiasme, kenikmatan, dan kepercayaan diri individu dalam mengadopsi aktivitas fisik sebagai bagian integral dari kehidupan. Kompetensi fisik mengacu pada kemampuan individu untuk mengembangkan keterampilan dan pola gerakan serta kemampuan untuk mengalami berbagai intensitas dan durasi gerakan. Kompetensi fisik yang ditingkatkan memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas dan pengaturan fisik. Pengetahuan dan pemahaman mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan hal-hal penting yang mempengaruhi gerak, memahami manfaat kesehatan dari gaya hidup aktif, dan menghargai keselamatan terkait dengan aktivitas fisik dalam berbagai pengaturan dan lingkungan. Keterlibatan dalam aktivitas fisik seumur hidup mengacu pada individu yang mengambil tanggung jawab pribadi untuk bebas dan aktif bergerak sebagai bagian integral dari gaya hidupnya.

Laporan ini menyatakan bahwa indeks literasi fisik secara nasional sebesar 0,565. Artinya tingkat pencapaian literasi fisik sebesar 56%, berada pada batas bawah kategori sedang. Ada relasi antara pengetahuan, sikap, dan perilaku. Individu yang memiliki pengetahuan literasi fisik yang baik cenderung memiliki sikap yang baik terhadap olahraga dan aktivitas fisik dan kemudian diikuti dengan perilakunya.



Tabel 4.1. Relasi antara Literasi Fisik, Partisipasi, dan Kebugaran

		Literasi Fisik	Partisipasi	VO2_max
Literasi fisik	Pearson Correlation	1	.645**	.501**
	Sig. (2-tailed)		.000	.003
	N	34	34	34
Partisipasi	Pearson Correlation		1	.522**
	Sig. (2-tailed)			.002
	N		34	34
VO2_max	Pearson Correlation			1
	Sig. (2-tailed)			
	N			34

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil analisis statistik membuktikan bahwa ada korelasi yang kuat antara variabel literasi fisik, tingkat partisipasi, dan kebugaran. Korelasi literasi fisik dan partisipasi sebesar 0,64 pada $p < .01$ dan terhadap variabel kebugaran yang diukur dengan vo2_max sebesar 0,50 pada $p < .01$. Dengan demikian, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh terkait literasi fisik yang jalur utamanya melalui olahraga pendidikan di sekolah, dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kebugaran masyarakat.

Partisipasi dalam Olahraga

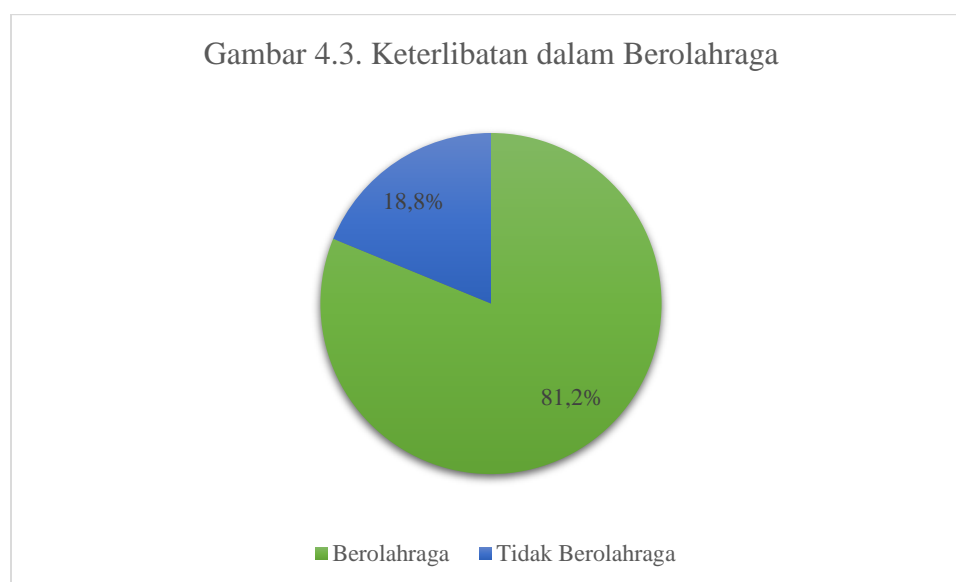
Dalam melakukan aktivitas fisik, perlu diperhatikan prinsip latihan yang sering disebut dengan FIT - *frequency, intensity, time* (Ayers & Sariscsany, 2011; Billinger, Boyne, Coughenour, Dunning, & Mattlage, 2014; O’Riordan, Clifford, Van De Ven, & Nelson, 2014). Frekuensi mengacu pada seberapa sering seseorang melakukan aktivitas fisik dalam seminggu. Pada latihan yang berjenis kardio, biasanya dijadwalkan lebih sering, apalagi untuk tujuan menurunkan berat badan. Frekuensi dilakukan selama 5 kali atau lebih dalam seminggu dengan intensitas sedang atau 3 kali per minggu dengan intensitas tinggi. Untuk latihan yang berjenis kekuatan, misalnya melatih otot-otot tertentu, frekuensi yang disarankan 2-3 kali per minggu secara berturut-turut (American College of Sports Medicine, 2009; Medicine, 2016).

Intensitas merujuk pada seberapa keras seseorang berlatih selama melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Secara umum, untuk latihan berjenis kardio disarankan melakukan dengan intensitas sedang. Intensitas tinggi dapat dilakukan dengan periode yang lebih singkat, misalnya

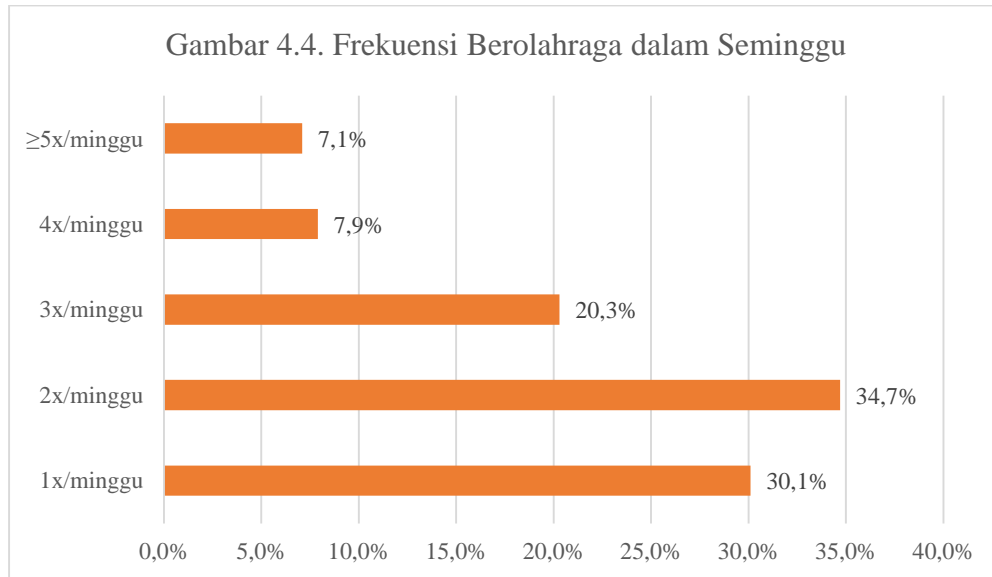
dengan model latihan interval. Kombinasi latihan kardio dengan intensitas rendah, sedang, dan tinggi diperlukan guna merangsang sistem energi yang berbeda dan menghindari latihan yang berlebihan. Untuk jenis latihan kekuatan, intensitas latihan menggunakan parameter yang berbeda, yakni jenis latihan, jumlah beban, repetisi, dan set. Sebagai pemula yang ingin membentuk stabilitas dan ketahanan otot, disarankan menggunakan beban yang lebih ringan dan dilakukan lebih sedikit set dengan pengulangan tinggi: dua atau tiga set dengan 12 hingga 20 repetisi. Untuk tujuan menumbuhkan otot, lakukan jumlah set yang lebih banyak dengan jumlah pengulangan sedang, misalnya, empat set masing-masing 10 hingga 12 repetisi. Jika ingin membentuk kekuatan, gunakan beban berat untuk melakukan lebih banyak set dengan repetisi lebih sedikit, misalnya lima set masing-masing tiga repetisi. Intensitas bisa diukur berdasarkan detak jantung, aktivitas yang dirasakan, tes bicara, monitor detak jantung, atau kombinasi dari langkah-langkah tersebut.

Sementara itu, durasi merujuk pada seberapa lama seseorang melakukan aktivitas fisik dalam setiap kali latihan. Sejatinya tidak ada ukuran yang pasti terkait dengan durasi, tergantung pada tingkat kebugaran dan jenis latihan yang dilakukan. Pada jenis latihan kardio, durasi yang disarankan adalah 30-60 menit. Bagi pemula disarankan memulai dengan latihan selama 15 hingga 20 menit. Jika sudah terbiasa, durasi berolahraga bisa selama 30-60 menit. Jika melakukan latihan interval dan berlatih dengan intensitas tinggi, durasi latihan menjadi lebih singkat, sekitar 20-30 menit. Melakukan berbagai latihan dengan intensitas dan durasi yang berbeda akan memberikan dampak yang lebih baik dan seimbang.

Gambar 4.3. Keterlibatan dalam Berolahraga



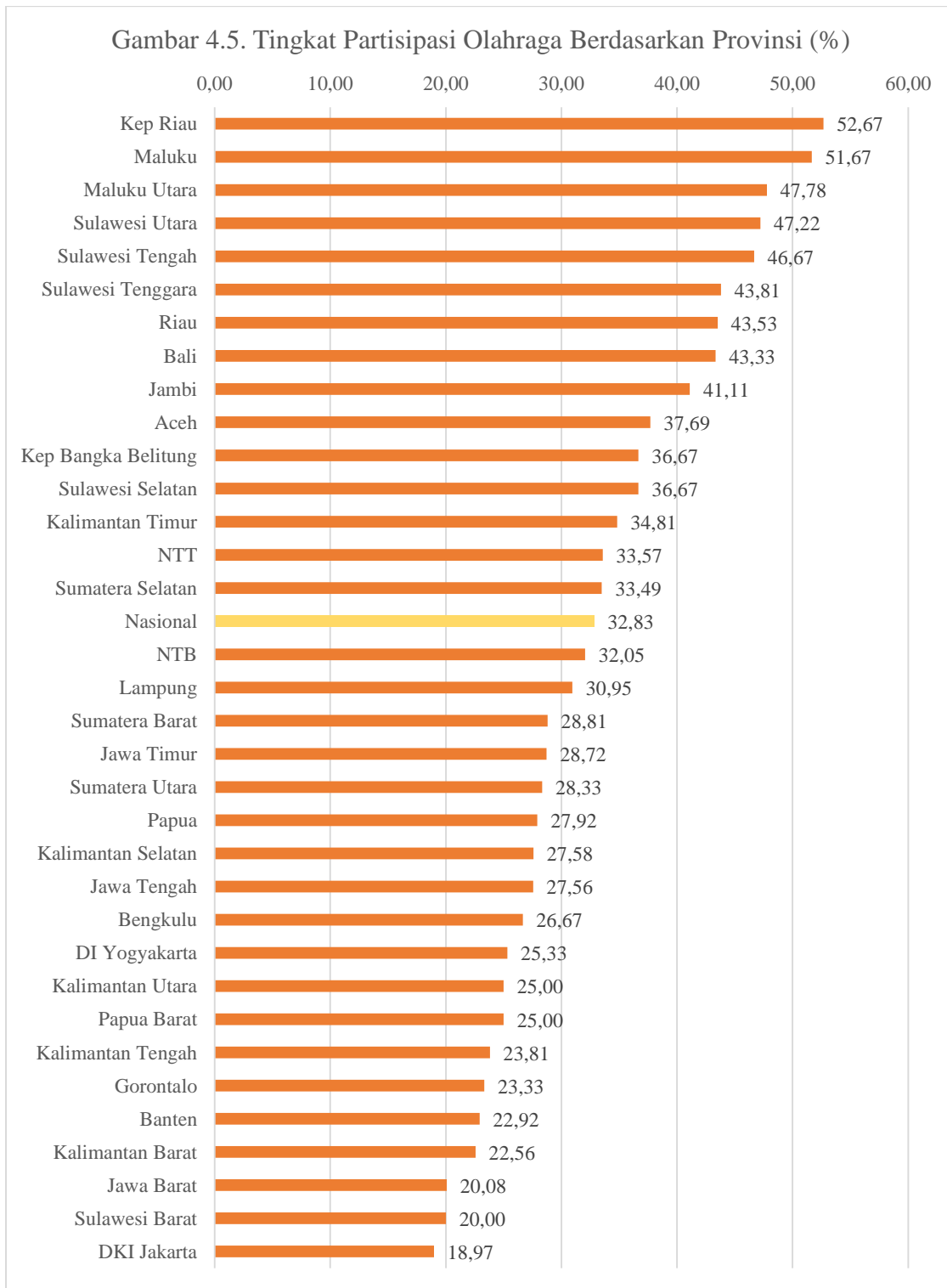
Laporan ini menyatakan bahwa dari dimensi partisipasi olahraga, ketika responden ditanyakan apakah dalam satu minggu terakhir ybs melakukan olahraga/aktivitas fisik, 81,2% menyatakan “ya” dan 18,8% menyatakan “tidak”. Dari mereka yang berpartisipasi tersebut, 30,1% melakukan olahraga 1 kali per minggu, 34,7% melakukan olahraga dua kali per minggu, dan sebanyak 35,2% yang berpartisipasi 3 kali atau lebih per minggu.



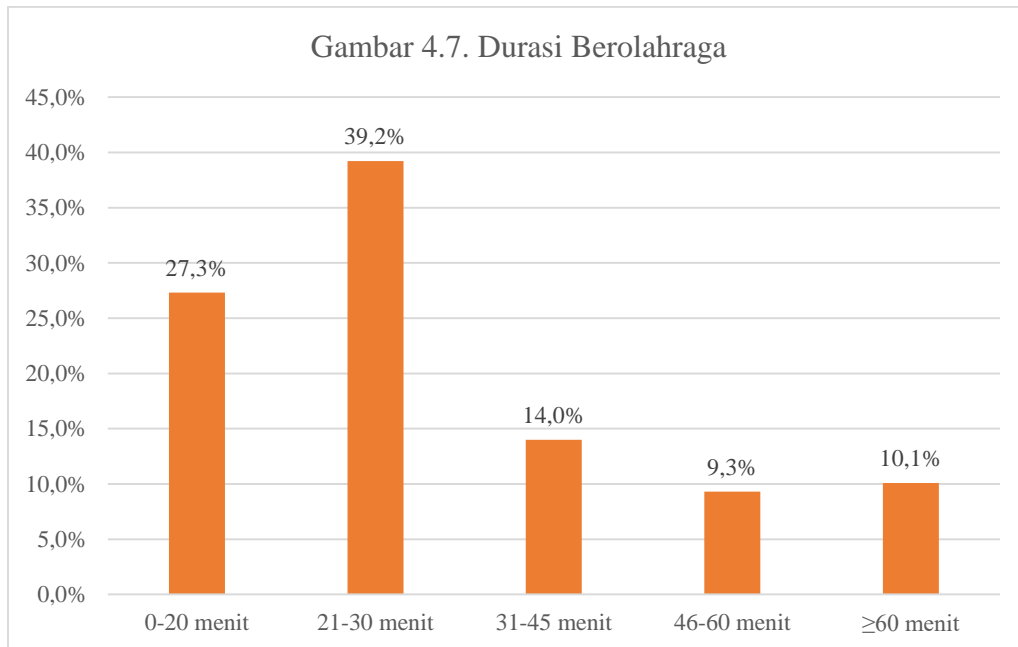
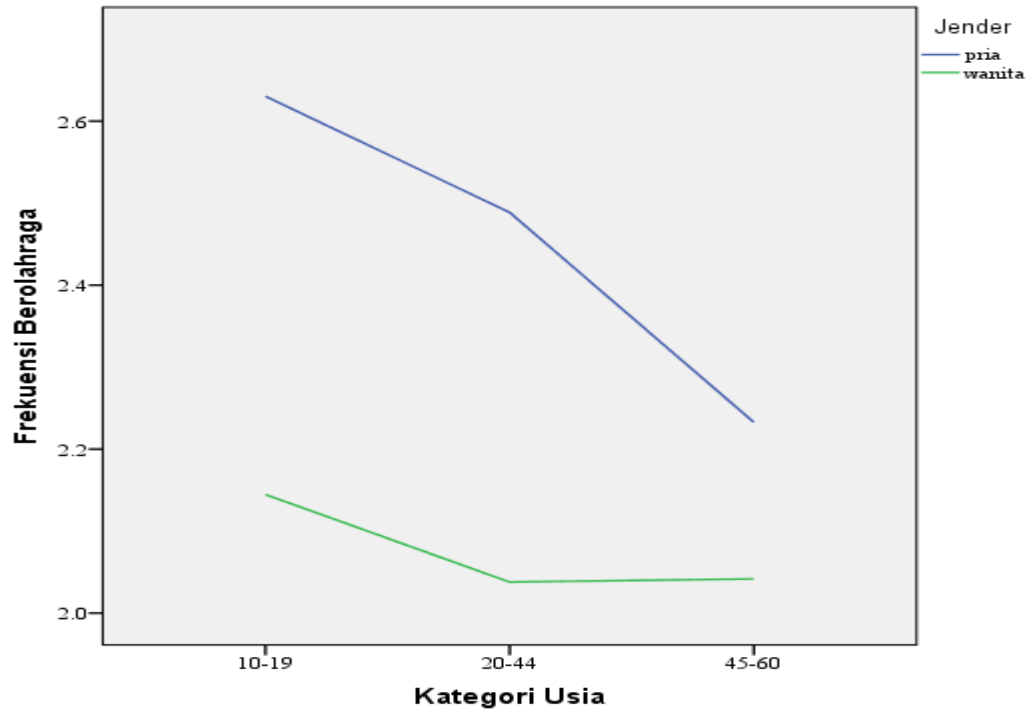
Secara nasional, angka partisipasi aktif berolahraga sebesar 32,83%. Tiga provinsi teratas dalam partisipasi masing-masing ditempati oleh Kepulauan Riau, Maluku, dan Maluku Utara. Sementara itu, tiga provinsi dengan tingkat partisipasi terendah adalah Sulawesi Barat, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Terkait dengan tingkat partisipasi tersebut, belum ada data pembandingan yang relatif memadai, terutama dari aspek metodologi dan kemitakhiran data, mengingat survei nasional partisipasi belum pernah dilakukan secara komprehensif dan mendalam. Data SDI 2006 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi aktif berolahraga sebesar 42% (T.C. Mutohir & Maksum, 2007). Jika dibandingkan dengan data tersebut, maka telah terjadi penurunan 9,17%. Sangat boleh jadi, penurunan tersebut akibat pandemi Covid-19 di mana pergerakan orang sangat dibatasi.

Dilihat dari jenis kelamin, ada kesenjangan tingkat partisipasi yang cukup lebar antara laki-laki dan perempuan. Seperti biasa, tingkat partisipasi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dari aspek usia, tingkat partisipasi tertinggi ada pada kelompok 10-19 tahun,

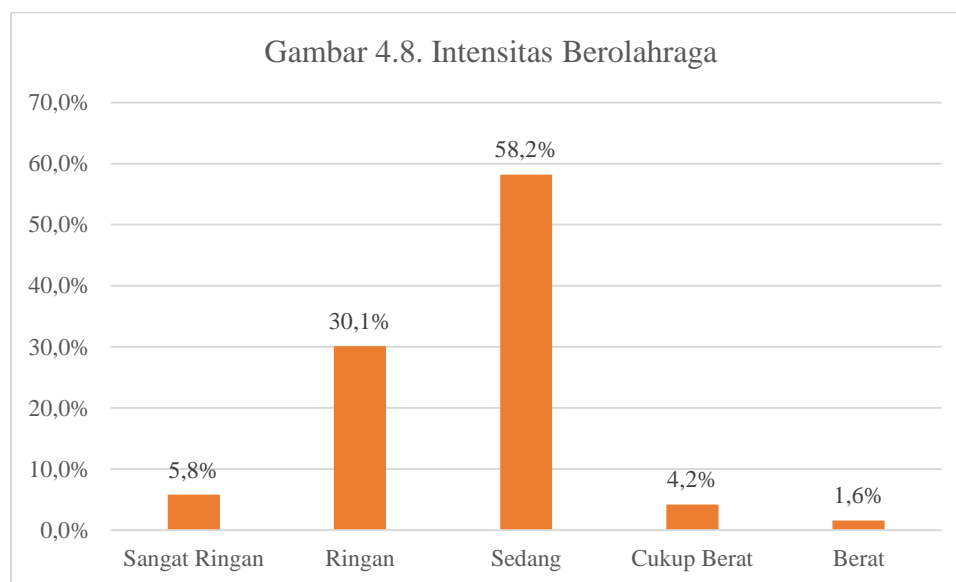
kemudian diikuti kelompok usia 20-44 tahun dan 45-60 tahun. Dari data ini dapat dibaca bahwa seiring usia, tingkat partisipasi dalam berolahraga cenderung menurun.



Gambar 4.6. Pola Partisipasi Olahraga Berdasarkan Kategori Usia dan Jender



Dilihat dari aspek durasi, sebagian besar (39,2%) melakukan olahraga selama 21-30 menit, 27,3% melakukannya selama ≤ 20 menit, dan selebihnya melakukan olahraga lebih dari 30 menit. Dari aspek intensitas, 58,2% melakukan olahraga dengan intensitas sedang, 4,2% melakukannya dengan cukup berat dan 1,6% melakukannya dengan intensitas berat.

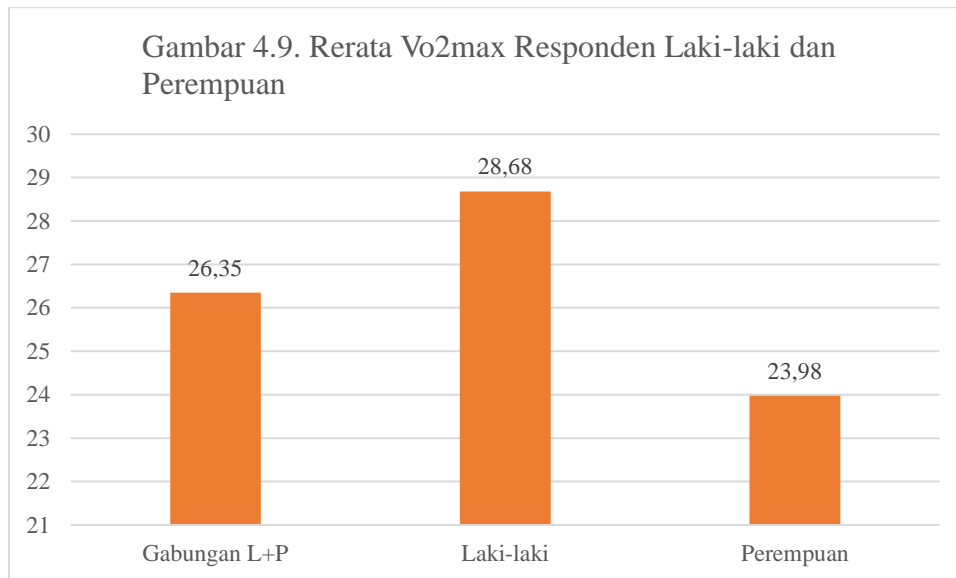


Kebugaran Jasmani

Pada tataran yang paling azasi, membugarkan masyarakat merupakan misi strategis keolahragaan, karena membangun masyarakat bugur itu menjadi fondasi utama serta pilar penegak yang diandalkan untuk implementasi gerakan *sport for all*. Masyarakat yang bugur adalah masyarakat yang memiliki modal kuat untuk membangun, termasuk membangun prestasi olahraga dan juga prestasi-prestasi lain di segala bidang. Kesadaran kolektif tentang perlunya budaya bugur perlu ditingkatkan juga terkait dengan kecenderungan semakin maraknya penyakit degeneratif yang disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat serta kurang gerak. Kecenderungan meningkatnya penyakit hipertensi, obesitas, diabetes, jantung koroner, dan lain-lain tentunya harus menjadi penggugah betapa kebugaran jasmani itu sangat vital. Kebugaran jasmani berhubungan dengan kesehatan, performa, produktivitas, dan kualitas hidup.

Persoalan umum budaya kurang gerak dan perilaku *sedentary* menjadi telaah kekinian terkait dengan mekanisme adaptasi tumbuh kembang masyarakat pada umumnya dengan situasi baru.

Situasi baru tersebut terkait dengan nilai-nilai baru kehidupan dan perikehidupan yang berdampak pada bentuk relasi sosial baru. Lahirnya generasi teknologi baru menimbulkan eksis hidup yang semakin mudah. Pada satu sisi teknologi menjadikan hidup lebih efisien dan efektif, tetapi pada sisi lain menimbulkan ekses, yang diantaranya adalah fenomena kekurangan gerak secara fisik. Semua pihak pantas khawatir terhadap ancaman proses pembesaran populasi masyarakat yang kurang gerak.

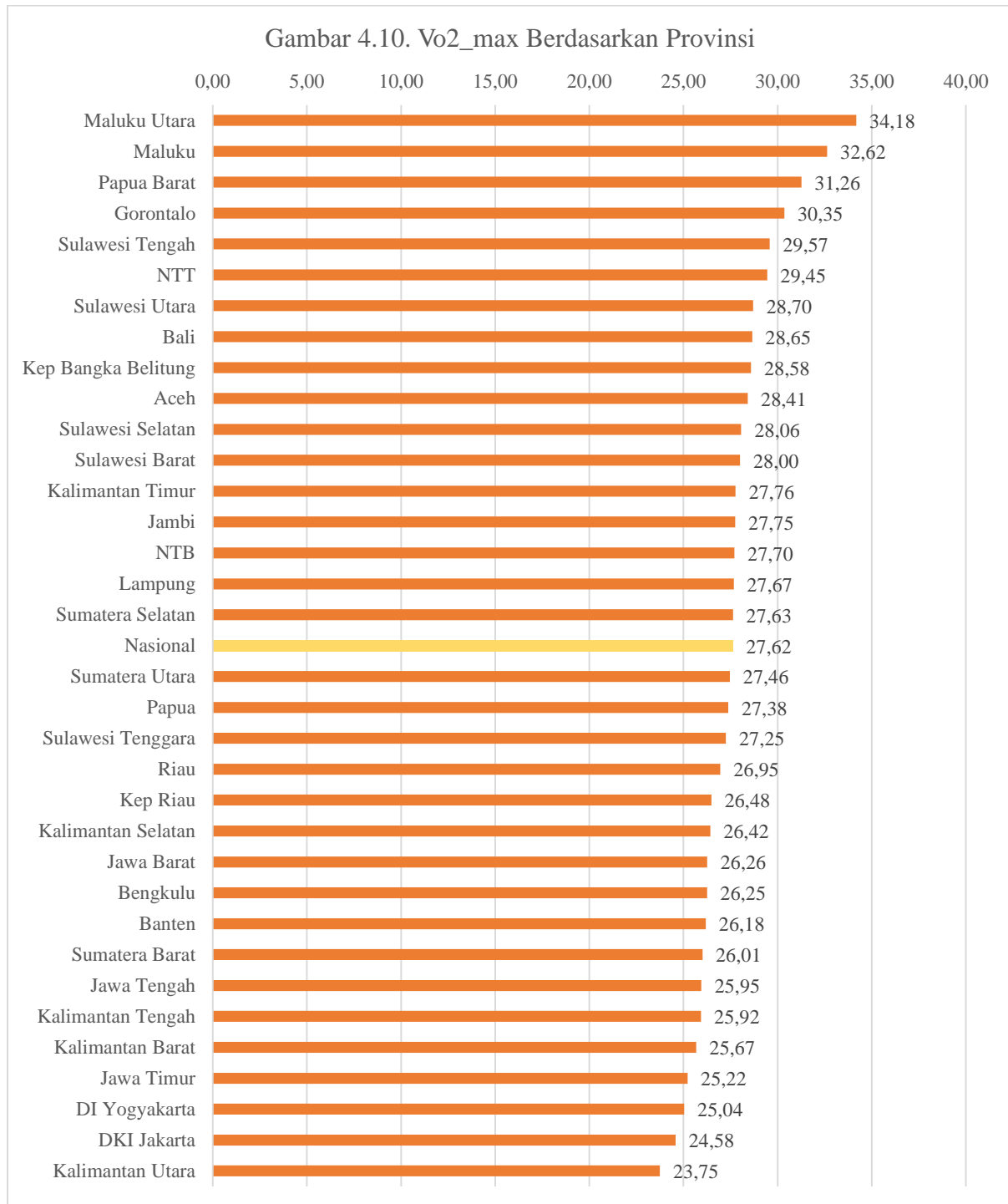


Laporan ini menyatakan bahwa rerata vo2_max sebesar 26,35 ml/kg/min. Pada partisipan laki-laki vo2_max sebesar 28,68 ml/kg/min, sementara untuk perempuan sebesar 23,98 ml/kg/min. Data yang lebih rinci dapat dikemukakan dengan mempertimbangkan kategori usia, termasuk jenis kelamin. Secara berurutan, kebugaran jasmani usia 10-19 tahun menduduki peringkat tertinggi, baru kemudian diikuti usia 20-24 tahun dan 45-60 tahun.

Tabel 4.2. Besaran VO2max Berdasarkan Kategori Usia

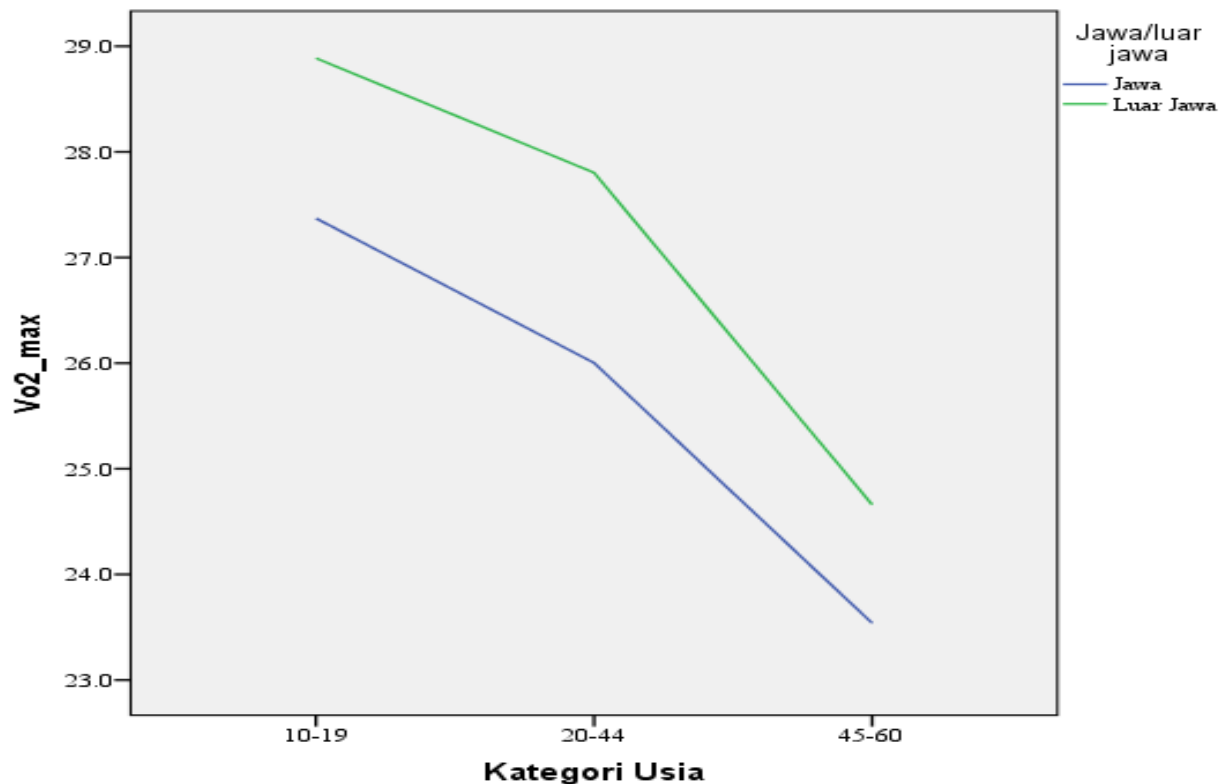
Jenis Kelamin	Kategori Usia	Rerata Vo2max
Laki-laki	10-19	30,33
	20-44	29,56
	45-60	25,44
Perempuan	10-19	25,56
	20-44	24,0
	45-60	22,52

Secara nasional berdasarkan data 34 Provinsi, angka vo2_max sebesar 27,62 ml/kg/min. Ada tiga Provinsi dengan vo2_max tertinggi, yakni Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat. Sementara itu, untuk Provinsi dengan vo2_max terendah adalah Kalimantan Utara, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.

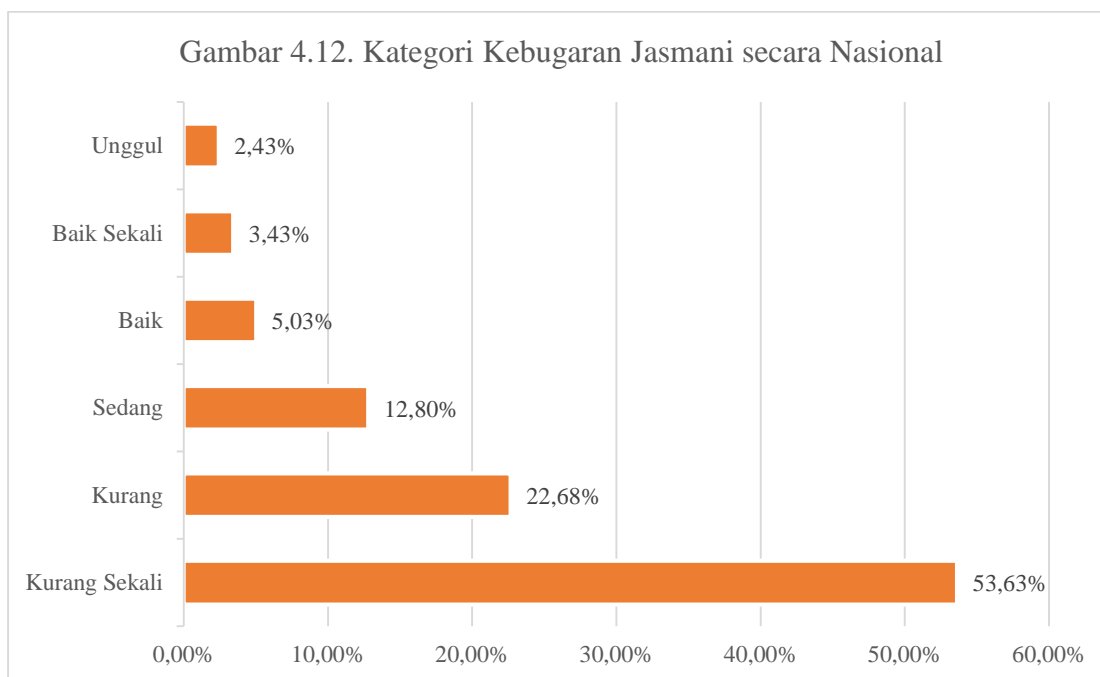


Di lihat dari perbandingan wilayah, secara umum partisipan dari luar Jawa memiliki vo2_max yang lebih tinggi dibandingkan dengan partisipan dari Jawa. Kondisi tersebut terjadi pada semua kategori usia. Temuan tersebut konsisten dengan data SDI 2006. Ada beberapa penjelasan yang dapat dikemukakan. Pertama, wilayah luar Jawa memiliki ruang terbuka olahraga yang lebih memadai dibandingkan dengan wilayah Jawa sehingga memberikan keleluasaan dalam melakukan aktivitas fisik. Kedua, gaya hidup sehari-hari orang-orang di luar Jawa lebih banyak menggunakan aktivitas fisik daripada mereka yang berada di Jawa.

Gambar 4.11. Perbandingan Tingkat Kebugaran antara Wilayah Jawa dan Luar Jawa



Lalu, bagaimana dengan kategori tingkat kebugaran? Dari analisis data ditemukan bahwa tingkat kebugaran dengan kategori kurang sekali sebesar 53,63%, kategori kurang sebanyak 22,68%, dan hanya 5,86% yang masuk kategori baik sekali dan unggul. Jika dibandingkan dengan data SDI 2006, maka secara umum sejatinya belum ada perubahan yang signifikan. Meski ada peningkatan pada kategori baik dan baik sekali, tetapi pada kategori kurang sekali justru mengalami peningkatan.



Memperhatikan data tersebut tentu sangat memprihatinkan. Ancaman atas gagalnya perwujudan generasi yang bugar, aktif, dan produktif tidak berlebihan manakala dikaitkan dengan berbagai faktor penopang yang mendasar yang sekarang ini semakin tampak kontra produktif. Kondisi dirupsi teknologi yang bersanding dengan semakin berkurangnya sarana dan prasarana publik untuk berolahraga, termasuk budaya *gadget* yang memamalkan orang, yang semuanya melalaikan dan menjadikan sebagian besar masyarakat (terutama generasi milenial) memilih untuk meminimalkan gerak. Dalam hitungan jangka panjang hal ini akan menjadi persoalan yang serius. Semua pihak tentu khawatir atas kecenderungan generasi masa depan yang menuju “malas, kurang gerak, dan instan penikmat secara hedonis”. WHO pernah mengingatkan secara keras dan tegas bahwa gaya hidup sedentari, rendahnya tingkat kebugaran, dan obesitas menjadi pemicu banyak penyakit kronis (WHO, 2008).

Kesimpulan

1. Indeks literasi fisik secara nasional sebesar 0,565. Artinya tingkat pencapaian literasi fisik sebesar 56%, berada pada batas bawah kategori sedang. Ada relasi antara pengetahuan, sikap, dan perilaku. Individu yang memiliki pengetahuan literasi fisik yang baik cenderung memiliki sikap yang baik terhadap olahraga dan aktivitas fisik. Hasil analisis juga membuktikan bahwa ada korelasi yang kuat antara variabel literasi fisik, tingkat partisipasi, dan kebugaran.

2. Secara nasional, olahraga/aktivitas fisik dilakukan oleh 81,2% dari anggota masyarakat. Dari mereka yang berpartisipasi tersebut, 30,1% melakukan olahraga 1 kali per minggu, 34,7% melakukan olahraga dua kali per minggu, dan sebanyak 35,2% yang berpartisipasi 3 kali atau lebih per minggu. Jika dilihat dari angka partisipasi aktif, maka tingkat partisipasi berolahraga sebesar 32,83%.
3. Ada kesenjangan tingkat partisipasi yang cukup lebar antara laki-laki (35,7%) dan perempuan (21,4%). Dari aspek usia, tingkat partisipasi tertinggi ada pada kelompok 10-19 tahun, kemudian diikuti kelompok usia 20-44 tahun dan 45-60 tahun. Artinya, seiring usia, tingkat partisipasi dalam berolahraga cenderung menurun.
4. Dilihat dari aspek durasi, sebagian besar (39,2%) melakukan olahraga selama 21-30 menit, 27,3% melakukannya selama ≤ 20 menit, dan selebihnya melakukan olahraga lebih dari 30 menit. Dari aspek intensitas, 58,2% melakukan olahraga dengan intensitas sedang, 4,2% melakukannya dengan cukup berat dan 1,6% melakukannya dengan intensitas berat.
5. Secara nasional, rerata $vo2_max$ sebesar 26,35 ml/kg/min, pada partisipan laki-laki $vo2_max$ sebesar 28,68 ml/kg/min dan untuk perempuan sebesar 23,98 ml/kg/min. Dari analisis data ditemukan bahwa tingkat kebugaran dengan kategori kurang sekali sebesar 53,63%, kategori kurang sebanyak 22,68%, dan hanya 5,86% yang masuk kategori baik sekali dan unggul.
6. Dilihat dari perbandingan wilayah, secara umum partisipan dari luar Jawa memiliki $vo2_max$ yang lebih tinggi dibandingkan dengan partisipan dari Jawa pada semua kategori usia. Kuat dugaan hal ini terjadi karena wilayah luar Jawa memiliki ruang terbuka olahraga yang lebih memadai dibandingkan dengan wilayah Jawa sehingga memberikan keleluasaan dalam melakukan aktivitas fisik. Selain itu, gaya hidup sehari-hari orang-orang di luar Jawa lebih banyak menggunakan aktivitas fisik daripada mereka yang berada di Jawa.

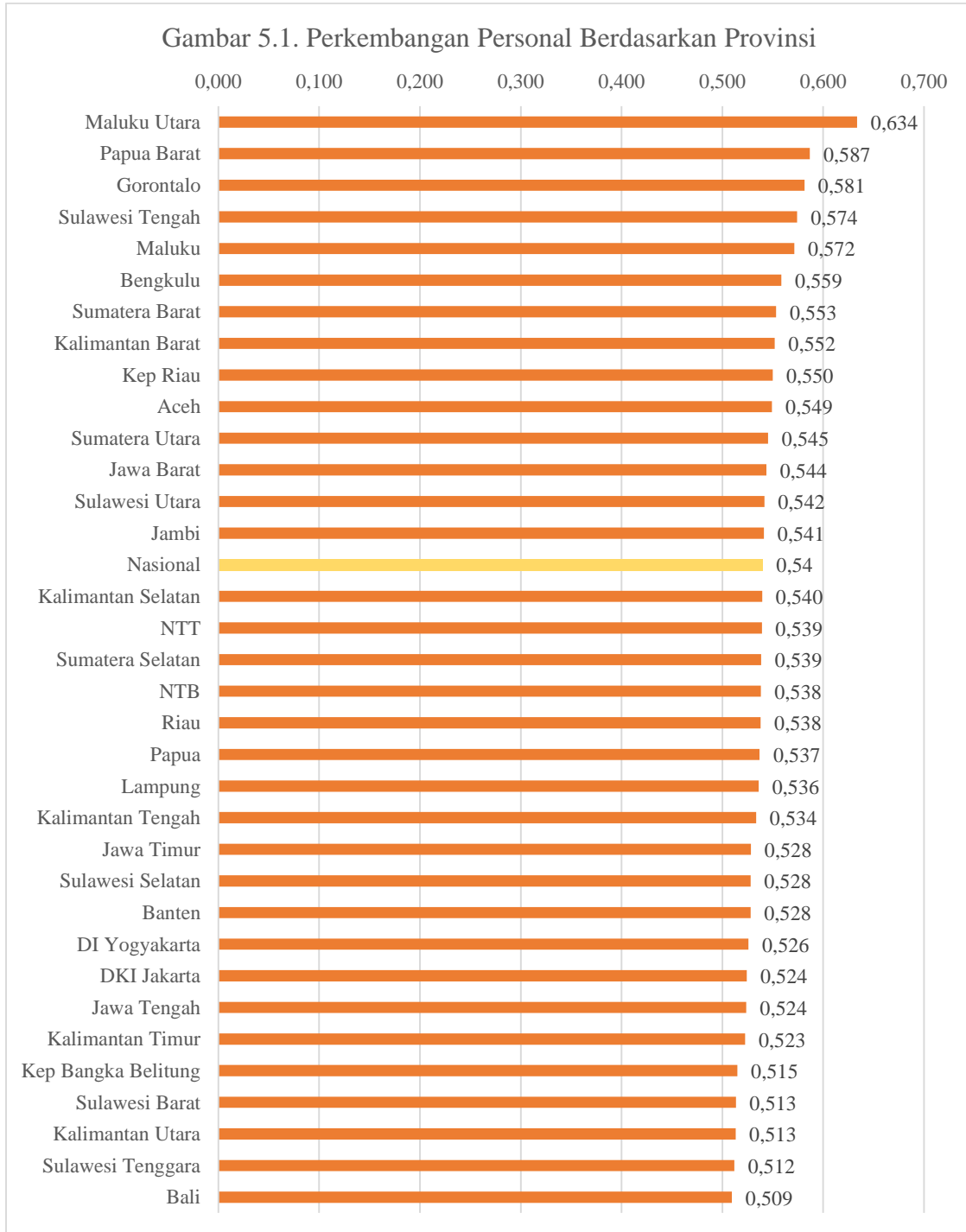
Bab 5 Olahraga dan Perkembangan Personal

Berolahraga bukan sekadar mendapatkan manfaat kesehatan yang bersifat fisik, tetapi lebih dari itu, berolahraga yang didalamnya ada permainan, juga mengajarkan karakter, mengajarkan pemikiran analitis dan strategis, keterampilan kepemimpinan, penetapan tujuan dan sebagainya (Rasmussen & Laumann, 2014). Olahraga memegang peranan penting dalam perkembangan kepribadian manusia. Semua olahraga dan permainan tentu bermanfaat baik untuk pikiran maupun tubuh serta menciptakan disiplin, kerjasama, dan kepercayaan diri. Keterlibatan seseorang dalam olahraga akan membantu mereka menjadi lebih aktif dan juga mengembangkan kepribadian yang lebih sehat. Secara fisik pelaku olahraga mengembangkan kekuatan, kecepatan, keterampilan, stamina dan fleksibilitas tetapi juga pada saat yang sama meningkatkan harga diri, membangun keterampilan sosial dan kepemimpinan, meningkatkan ketahanan dan menanamkan nilai-nilai (Coulter, Mallett, Singer, & Gucciardi, 2016).

Ketika kita sedang stres karena masalah pribadi atau pekerjaan, berolahraga membantu melepaskan tekanan dan ketegangan dengan cara yang sehat dan terkendali. Pelaku olahraga harus belajar untuk tidak kehilangan kesabaran dan moral mereka bahkan dalam menghadapi kekalahan karena dia perlu menjadi tenang dan kemudian mencoba dan tampil lebih baik di lain waktu. Pemain tahu bahwa kemenangan dan kekalahan adalah dua aspek dari mata uang yang sama. Ada lebih banyak kegembiraan dalam bermain daripada hasil akhirnya. Olahraga melatih seseorang untuk menerima kekalahan dengan anggun, tidak berputus asa, dan terus maju. Mereka belajar bahwa menang dan kalah adalah bagian dari kehidupan, tidak seharusnya merasa tertekan dan berkecil hati karena kalah, tetapi terus maju dan berusaha lebih keras di lain waktu.

Anak-anak yang berolahraga mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang dengan minat yang sama dan mendapatkan teman baru, ini meningkatkan kepercayaan diri mereka. Anak-anak bermain bersama sebagai sebuah tim, berbagi dan merayakan bersama. Ini memiliki efek positif pada psikologi dan perilaku anak. Anak yang aktif berolahraga kecil kemungkinannya untuk menjadi egois ketika mereka dewasa. Mereka peduli dan siap bekerja sebagai tim dan bergaul lebih baik dengan orang lain. Dibutuhkan ketahanan fisik, mental dan emosional untuk bersaing dan anak-anak belajar motivasi, tekad dan manfaat jangka panjang dari pelatihan dan bekerja mencapai tujuan. Perasaan dari pencapaian saat mereka bekerja untuk membangun keterampilan bermain mereka meningkatkan harga diri, sifat kepribadian yang penting dalam menghadapi tantangan lain dalam hidup.

Bermain dalam olahraga tim membantu pemain terikat satu sama lain. Hal ini membutuhkan kerjasama dengan orang lain, belajar bermain adil dan bersenang-senang dengan orang lain sambil bekerja menuju tujuan bersama. Pemain mengembangkan rasa kompetisi yang sehat dengan rekan satu tim. Ini memberi anak-anak keterampilan yang lebih baik untuk berinteraksi dengan orang lain di sekolah dan di rumah.



Belajar untuk mengatasi pasang surut emosi dalam hidup dengan cara yang sehat adalah hal yang berharga bagi perkembangan kepribadian anak-anak dan orang dewasa. Bermain olahraga memberi orang pengalaman emosi, kegembiraan setelah menang dan kesedihan atau frustrasi setelah kekalahan. Olahraga memberikan pengalaman kepada anak-anak dalam situasi yang terorganisir dan lingkungan yang terstruktur di mana pelatih dan anggota tim dapat memberikan dorongan dan bantuan membangun ketahanan diri atau resilien.

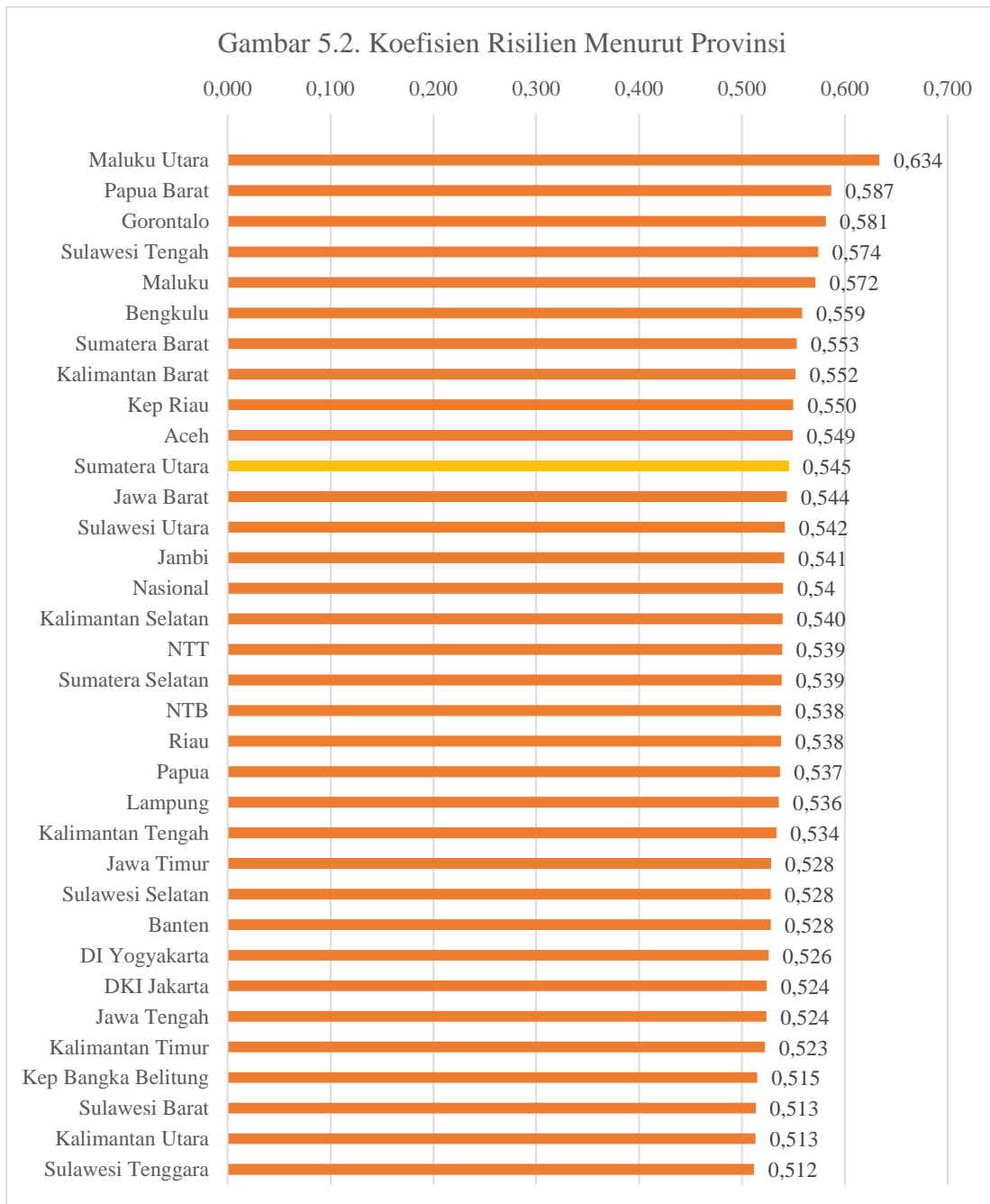
Laporan ini menyatakan bahwa secara nasional, indeks perkembangan personal masyarakat Indonesia sebesar 0,54, termasuk dalam kategori menengah rendah. Ada tiga provinsi yang menduduki peringkat teratas, yakni Maluku Utara, Papua Barat, dan Gorontalo. Sementara itu, tiga provinsi yang menempati posisi terendah adalah Bali, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara. Sepintas data tersebut bisa jadi mengejutkan, tetapi jika didalami akan didapatkan penjelasan yang dapat dipahami. Dalam laporan ini, indeks perkembangan personal diukur dengan dua konsep dasar, yakni resilien dan modal sosial. Esensi resilien adalah kemampuan seseorang beradaptasi terhadap perubahan, ketangguhan menghadapi kesulitan, dan kecepatan bangkit dari keterpurukan (Connor & Davidson, 2003; Luthans et al., 2004). Sementara itu, esensi modal sosial adalah perasaan bersama sebagai komunitas dan kepercayaan satu sama lain (Degenne, 2004). Meski terdapat variasi, temuan tersebut sejalan dengan data indeks kebahagiaan yang diterbitkan oleh BPS. Dalam laporan tersebut, ada tiga Provinsi yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi, yakni Maluku Utara, Maluku, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, tiga Provinsi dengan indeks kebahagiaan terendah adalah Papua, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (BPS-Statistics Indonesia, 2017).

Dari aspek pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan, sangat boleh jadi DKI Jakarta memiliki keunggulan dibandingkan dengan wilayah yang lain. Namun dalam aspek ketangguhan menghadapi perubahan dan tekanan, serta hubungan sosial seperti kepercayaan satu sama lain sebagai sebuah komunitas menjadi persoalan.

Olahraga dan Resilien

Secara sederhana, resilien didefinisikan sebagai kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan. Seperti diketahui bahwa hidup tidak datang dengan peta jalan yang pasti, tetapi setiap orang akan mengalami liku-liku, dari tantangan

sehari-hari hingga peristiwa traumatis dengan dampak yang lebih bertahan lama, seperti kematian orang yang dicintai, kecelakaan yang mengubah hidup, atau penyakit serius. Setiap perubahan mempengaruhi orang secara berbeda, membawa ragam pemikiran yang unik, emosi yang kuat dan ketidakpastian. Namun orang pada umumnya beradaptasi dengan baik dari waktu ke waktu terhadap situasi yang mengubah hidup dan situasi yang penuh tekanan sebagian berkat ketahanan.



Laporan ini menyebutkan bahwa secara nasional, angka resiliensi sebesar 3,37 dari skala 1-5. Tiga provinsi yang memiliki resiliensi tertinggi adalah Papua Barat, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat. Sementara itu, untuk provinsi dengan resiliensi terendah adalah Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat.

Ada perbedaan yang signifikan antara mereka yang berolahraga dan tidak. Koefisien resiliensi mereka yang melakukan olahraga sebesar 3,36, sementara mereka yang tidak berolahraga sebesar 3,33 dari skala 1-5. Ada perbedaan 0,03 poin. Hasil uji Anova membuktikan bahwa nilai F sebesar 8,65 pada $p < 0,01$.

Tabel 5.1. Hasil Uji Perbedaan Resiliensi antara Mereka yang Berolahraga dan Tidak

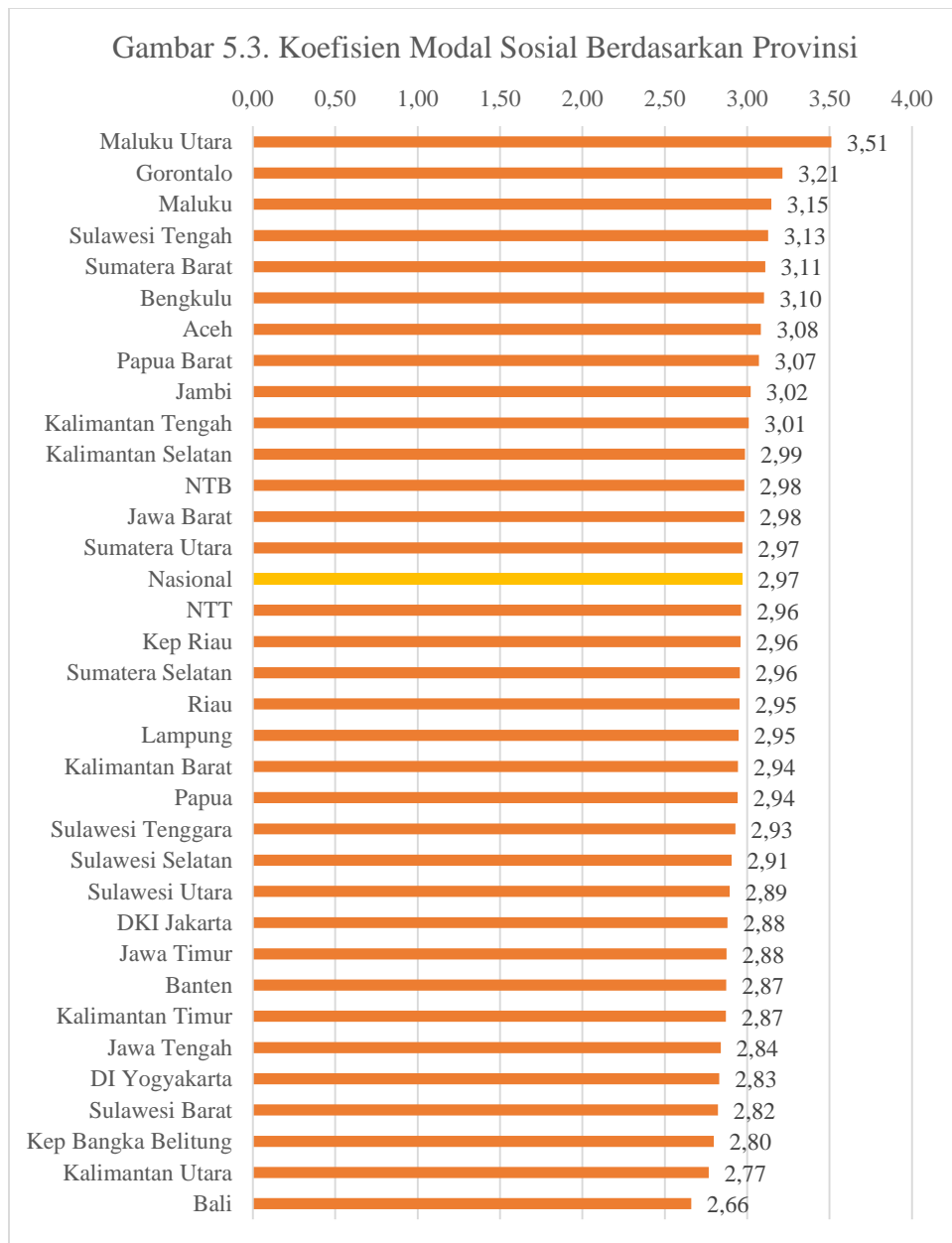
ANOVA					
Resiliensi	Sum of				
	Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1.807	1	1.807	8.653	.003
Within Groups	4177.689	20008	.209		
Total	4179.495	20009			

Olahraga dan Modal Sosial

Secara sederhana, modal sosial dapat didefinisikan sebagai perasaan bersama sebagai warga bangsa yang memungkinkan mereka percaya satu sama lain. Modal sosial memainkan peran penting dalam elemen pembangunan masyarakat. Modal sosial bertalian dengan kepercayaan, solidaritas, dan timbal balik yang ada dalam komunitas yang berfungsi dengan baik. Hal ini dihasilkan oleh interaksi sosial dengan orang lain, dari sekadar mengangguk ke tetangga di jalan hingga terlibat dalam klub sepak bola lokal atau kelompok drama amatir atau bergabung dengan skema pengawasan lingkungan. Ini memberikan tingkat dasar kepercayaan dan mutualitas yang memungkinkan orang untuk bekerja sama memecahkan masalah atau menjalankan aktivitas serta memberikan rasa memiliki dan komunitas (Skinner, Zakus, & Cowell, 2008).

Modal sosial penting untuk kelompok yang kurang beruntung atau miskin karena mereka tidak dapat menggunakan uang untuk memecahkan masalah mereka. Orang-orang dengan tingkat modal sosial yang tinggi memungkinkan mereka lebih bahagia, lebih sehat, lebih aman, dan lebih

mungkin untuk bekerja lebih nyaman. Secara umum, tempat-tempat dengan tingkat modal sosial yang tinggi lebih aman, diatur dengan lebih baik, dan lebih sejahtera daripada mereka yang memiliki tingkat modal sosial yang rendah. Dalam kaitan tersebut, olahraga dapat berkontribusi positif terhadap modal sosial masyarakat, meskipun tidak dapat diasumsikan bahwa olahraga selalu meningkatkan modal sosial setiap saat. Ada situasi di mana olahraga dapat mendorong perpecahan, persaingan berlebihan, dan praktik tidak sehat di antara orang-orang dan komunitasnya.



Laporan ini menyatakan bahwa secara nasional, koefisien modal sosial sebesar 2,97 dari skala 1-5. Tiga provinsi teratas yang memiliki modal sosial yang tinggi adalah Maluku Utara, Gorontalo, dan Maluku. Sementara itu, tiga provinsi dengan modal sosial terendah adalah Bali, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung. Ada perbedaan yang signifikan dalam hal modal sosial antara mereka yang berolahraga dan tidak. Koefisien modal sosial mereka yang berolahraga sebesar 2,94, sementara yang tidak berolahraga sebesar 2,88 dari skala 1-5. Ada perbedaan 0,06 poin.

Tabel 5.2. Hasil Uji Perbedaan Modal Sosial antara Mereka yang Berolahraga dan Tidak

ANOVA					
Modal Sosial					
	Sum of		Mean Square	F	Sig.
	Squares	df			
Between Groups	8.297	1	8.297	23.177	.000
Within Groups	7162.871	20008	.358		
Total	7171.168	20009			

Berpartisipasi dalam olahraga memiliki potensi untuk menghasilkan nilai sosial yang cukup besar di masyarakat setempat. Salah satu manfaat sosial penting dari olahraga tersebut adalah pengembangan modal sosial (Zhou & Kaplanidou, 2018). Hasil penelitian yang relevan mengungkapkan bahwa modal ikatan dikembangkan oleh semua partisipan olahraga. Ada empat hasil positif dari modal sosial yang dapat diidentifikasi: sikap dan perilaku yang mendukung, pengaruh positif pada orang lain, perilaku prososial, dan peningkatan sosialisasi sehari-hari (Allen, Drane, Byon, & Mohn, 2010; Coalter, 2010). Dengan menghasilkan hasil positif di antara para partisipan, modal sosial memiliki potensi untuk berkontribusi pada pengembangan dan kesejahteraan masyarakat. Laporan ini memberikan perspektif tentang bagaimana modal sosial yang berasal dari partisipasi olahraga dapat mengarah pada pengembangan masyarakat dalam jangka panjang.

Kesimpulan

1. Berolahraga bukan sekadar mendapatkan manfaat kesehatan yang bersifat fisik, tetapi lebih dari itu, berolahraga yang didalamnya ada permainan, juga mengajarkan karakter, pemikiran analitis dan strategis, dan keterampilan sosial.

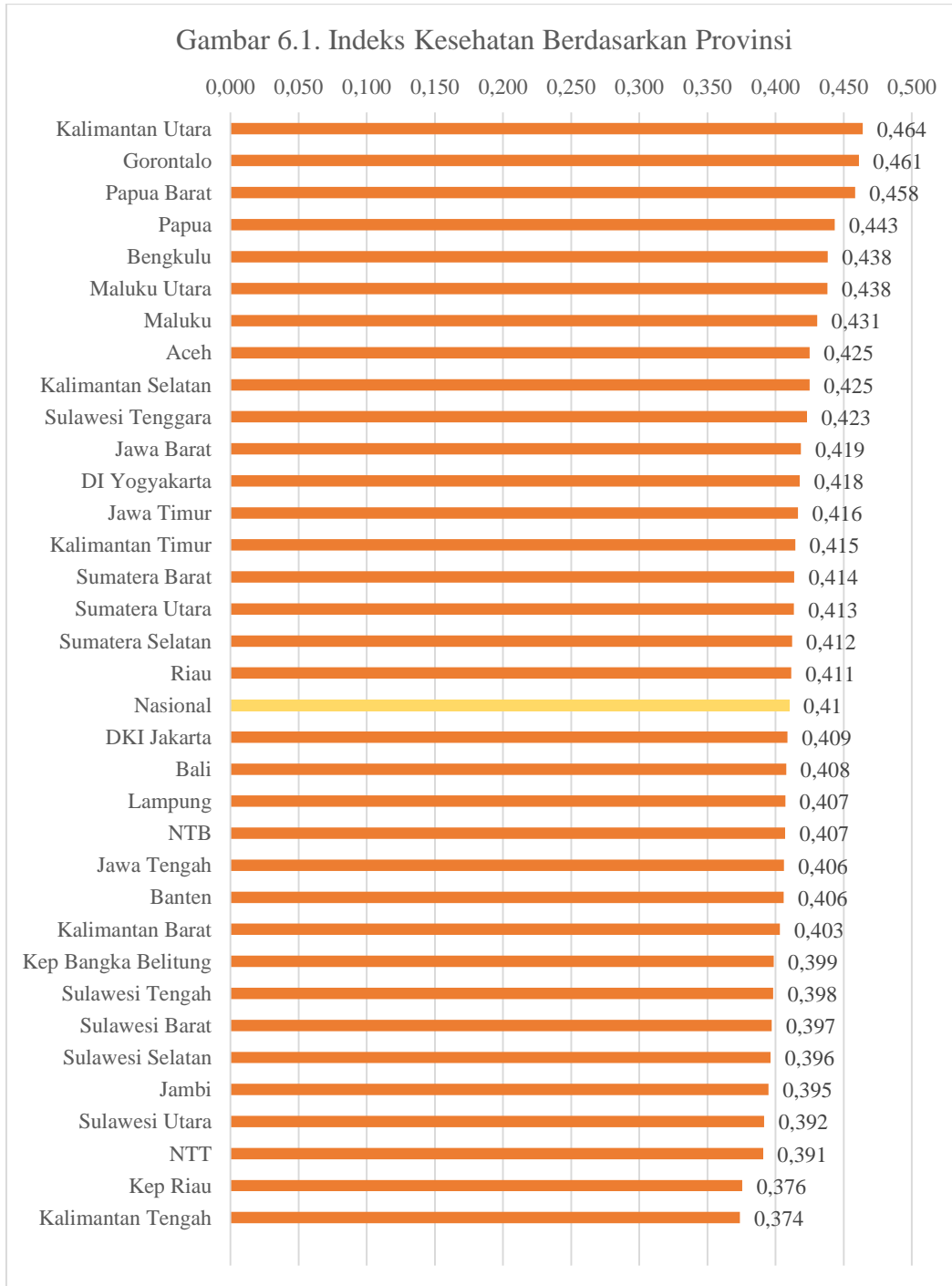
2. Indeks perkembangan personal masyarakat Indonesia sebesar 0,41, termasuk dalam kategori rendah. Dalam laporan ini, indeks perkembangan personal diukur dengan dua konsep dasar, yakni resilien dan modal sosial. Esensi resilien adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, ketangguhan menghadapi kesulitan, dan kecepatan bangkit dari keterpurukan. Esensi modal sosial adalah perasaan bersama sebagai komunitas dan bangsa serta kepercayaan satu sama lain.
3. Secara nasional, angka resilien sebesar 3,37 dari skala 1-5. Ada perbedaan yang signifikan antara mereka yang berolahraga dan tidak. Koefisien resilien mereka yang melakukan olahraga sebesar 3,36, sementara mereka yang tidak berolahraga sebesar 3,33. Ada perbedaan sebesar 0,03 poin.
4. Koefisien modal sosial secara nasional sebesar 2,97 dari skala 1-5. Ada perbedaan yang signifikan dalam hal modal sosial antara mereka yang berolahraga dan tidak. Koefisien modal sosial mereka yang berolahraga sebesar 2,94, sementara yang tidak berolahraga sebesar 2,88. Ada perbedaan sebesar 0,06 poin.

Bab 6 Olahraga dan Kesehatan

Dalam benak para politisi dan publik pada umumnya, olahraga acap kali dikonosasikan dengan pergulatan menang-kalah untuk memperoleh medali. Padahal, esensi olahraga jauh lebih mulia dan strategis daripada sekedar kemenangan dan medali. Jika ditelusuri sejumlah dokumen yang ditulis oleh para ilmuwan olahraga, banyak manfaat yang diperoleh dari keterlibatan individu dalam olahraga. Siedentop, misalnya, mengemukakan tiga tujuan utama olahraga, yakni tujuan keunggulan performa, tujuan kesehatan masyarakat, dan tujuan pendidikan (D. Siedentop, 1998; D. L. Siedentop, 2009). Demikian pula, Côté et al. menyebut tujuan olahraga bagi pemuda dengan 3P - *participation, personal development, and performance* (Côté & Hancock, 2016). Sejumlah lembaga internasional yang relevan, seperti PBB, IOC, WHO, dan UNDP menjadikan olahraga sebagai instrumen pembangunan manusia, baik untuk tujuan kesehatan fisik, kesejahteraan psikis, penanaman nilai-nilai keadaban, membangun solidaritas sosial, kerjasama multinasional, dan manfaat ekonomi (Giulianotti, 2012; Hoye, Parent, Darnell, & Marchesseault, 2016; IOC, 2017; Zubala et al., 2017). Olahraga dianggap sebagai cara murah dan efektif untuk meningkatkan derajat kualitas hidup manusia.

Praktik baik di sejumlah negara bisa dijadikan pembelajaran. Di Inggris, misalnya, melalui Kementerian Olahraga telah menetapkan *outcomes* olahraga mencakup 5 hal, yakni kesejahteraan fisik, kesejahteraan psikis, perkembangan individu, perkembangan sosial dan komunitas, dan perkembangan ekonomi (Sport England, 2016). Meski Inggris sadar bahwa olahraga prestasi telah melambungkan namanya, melalui penyelenggaraan Olympiade, kejuaraan dunia, dan keikutsertaan di kejuaraan internasional, kesadaran baru tumbuh bahwa dampak olahraga terhadap kesehatan fisik dan mental menunjukkan kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan bangsa yang lebih bugar, lebih sehat, dan lebih bahagia. Meningkatnya obesitas dan diabetes, termasuk masalah kesehatan mental dan kondisi lain yang terkait dengan kurang gerak telah merugikan negara sebesar £7,4 milyar setiap tahun. Itu semua harus dicegah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berolahraga. Terbukti, peningkatan partisipasi olahraga berdampak pada ekonomi, terutama terkait ketersediaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan di dalam negeri dan ekspor ke luar negeri. Aktivitas fisik berkontribusi £39 milyar ke ekonomi Inggris setiap tahun dan setengahnya berasal dari keterlibatan individu dalam olahraga akar rumput. Semakin banyak orang yang aktif secara fisik, semakin sukses ekonomi. Melalui

sektor swasta, pusat kebugaran berbiaya rendah atau teknologi baru yang menghembuskan kehidupan baru ke dalam olahraga akar rumput hingga transformasi dramatis dari daerah tertinggal menuju berkemajuan menunjukkan bahwa olahraga adalah pusat kesuksesan ekonomi.



Pengalaman Australia juga menarik untuk disimak. Meski berhasil dalam Olimpiade Sydney 2000, menempati peringkat keempat dengan 16 medali emas, kebijakan olahraga Australia dianggap menghadapi persoalan serius (Australian Government, 2010). Kebijakan olahraga yang berfokus pada pencapaian performa tinggi melalui pendekatan “top-down” telah mengangkat Australia di panggung internasional, tetapi tantangan baru dihadapi seiring banyaknya warga Australia yang berpotensi mengidap *non-communicable diseases*. Menurut Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Australia ada di tingkat kelima tertinggi obesitas dewasa di negara maju. Survei Kesehatan Nasional 2007-2008 menemukan bahwa 68% pria dewasa Australia dan 55% wanita dewasa kelebihan berat badan atau obesitas. Selanjutnya, 17% anak Australia usia 5-17 tahun mengalami kelebihan berat badan dan hampir 8% mengalami obesitas (Australian Government, 2010). Untuk menghidupkan kembali keterlibatan dalam olahraga di antara warga dan untuk mendapatkan kembali keunggulan kompetitif, Australia melakukan refleksi dan reorientasi kebijakan olahraganya. Reorientasi diarahkan dengan menempatkan fokus strategis pada kolaborasi, reformasi, dan investasi di seluruh jalur olahraga secara “bottom-up”. Pendekatan yang lebih komprehensif, yang mengawinkan pendekatan elit dan massal, sangat penting untuk meningkatkan partisipasi olahraga untuk kepentingan kesehatan dan produktivitas sekaligus memberikan kontribusi dan mempertahankan kesuksesan internasional.

Laporan ini menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa indeks kesehatan masyarakat Indonesia sebesar 0,41, artinya masuk dalam kategori rendah. Terdapat tiga Provinsi yang masuk urutan tertinggi, yakni Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Papua Barat. Sementara itu, tiga Provinsi yang masuk kategori rendah adalah Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Timur. Dari uji Anova membuktikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara mereka yang berolahraga dan tidak dengan nilai F sebesar 588,929 pada $p < 0,01$. Mereka yang berolahraga memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak berolahraga. Dari perspektif jenis kelamin, laki-laki memiliki kesehatan yang baik dibandingkan dengan perempuan.

Olahraga dan Kesehatan Fisik

Sehat menurut definisi WHO adalah “*a state of complete physical, mental, and social well-being not merely the absence of disease ...*”. Orang yang sehat tidak hanya orang yang terbebas dari penyakit, tetapi juga sehat secara psikis, sosial, dan spiritual. Kesehatan yang optimal dapat

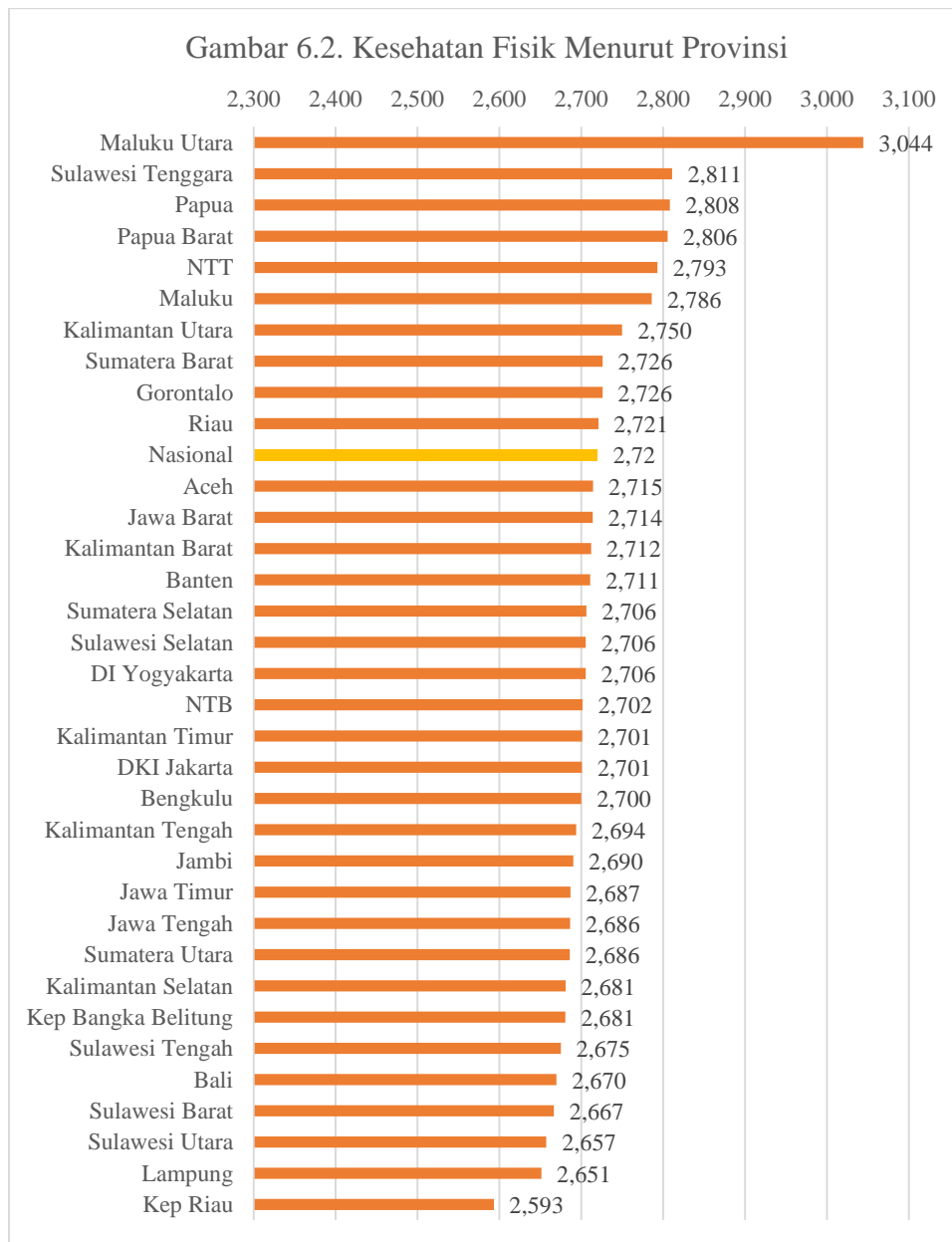
terjadi apabila ada keseimbangan antara kesehatan fisik, emosi, sosial, spiritual, dan intelektual. Kelima aspek tersebut, berjaln berkelindan membentuk sebuah totalitas kesehatan individu secara paripurna. Hal ini sekaligus memberikan sebuah penegasan bahwa pembangunan kesehatan tidak cukup didekati hanya dari perspektif medis belaka, melainkan bersifat multi-perspektif seperti psikologis dan olahraga.

Orang sering terlupakan akan makna penting kesehatan. Ia baru menyadari pentingnya kesehatan ketika dirinya didera suatu penyakit – yang dengan penyakit tersebut menyebabkan dirinya kehilangan kesempatan dan pilihan-pilihan yang dilakukan. Karena itu, tidak mengherankan bila UNDP memberikan penegasan bahwa kapasitas dasar pembangunan manusia adalah ketika seseorang bisa hidup sehat dan panjang umur, memiliki pengetahuan dan akses terhadap sumberdaya yang diperlukan guna memenuhi standar hidup dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat. Tanpa itu, tidak banyak pilihan yang tersedia dan banyak kesempatan tidak dapat diperoleh (UNDP, 2015).

Cukup banyak penelitian yang membuktikan bahwa aktivitas fisik berdampak positif terhadap kesehatan. Aktivitas fisik yang dilakukan secara regular mampu menurunkan tekanan darah bagi mereka yang memiliki resiko tekanan darah tinggi. Seseorang yang tidak melakukan olahraga memiliki resiko dua kali terkena penyakit kanker daripada seseorang yang aktif melakukan olahraga. Olahraga berpotensi mencegah terjadinya osteoporosis secara dini dan juga berdampak positif terhadap *psychological well-being* seseorang. WHO menyatakan bahwa 70% dari kematian yang terjadi di dunia umumnya disebabkan karena rendahnya kualitas hidup dari orang yang bersangkutan, termasuk akibat kurang gerak. Artinya 70% morbiditas dan mortalitas yang terjadi sebenarnya bisa dicegah atau setidaknya dapat dikurangi. Secara ekonomis, jika pencegahan dapat dilakukan, maka dapat menghemat anggaran negara hingga 10%. Di Amerika Serikat, misalnya, anggaran kesehatan mencapai 14% dari total anggaran negara.

Bagaimana dengan Indonesia? Ada harapan besar bahwa kita ingin mewujudkan masyarakat Indonesia ke depan yang proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah terjadinya resiko penyakit, dan menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia, baik jasmani maupun rohani. Kebijakan tentang olahraga yang berujung pada peningkatan kualitas hidup sebenarnya bukan hal baru, bahkan panji olahraga “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat” telah dikumandangkan sejak

tahun 1982. Persoalannya kemudian, apakah kegiatan olahraga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Kiranya, kita semua sepakat bahwa manusia yang sehat merupakan prasyarat pembangunan. Mustahil kita menggerakkan roda pembangunan yang mengarah pada peningkatan produktivitas nasional tanpa ada kesiapan sumberdaya manusia yang sehat secara fisik dan mentalnya. Karena itu, upaya mewujudkan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rokhani menjadi urgen. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, budaya hidup aktif melalui olahraga perlu dimulai sejak usia dini hingga mencapai lanjut usia.



Laporan ini menyatakan bahwa secara nasional, koefisien kesehatan fisik sebesar 2,72 pada skala 1-5. Ada tiga Provinsi yang menduduki peringkat teratas, yakni Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Sementara itu, tiga Provinsi yang menempati urutan terendah adalah Kepulauan Riau, Lampung, dan Sulawesi Utara. Ada perbedaan kesehatan fisik yang signifikan antara mereka yang berolahraga dan tidak. Koefisien kesehatan fisik mereka yang berolahraga sebesar 3,99, sementara mereka yang tidak berolahraga sebesar 3,78. Ada perbedaan sebesar 0,21 poin.

Tabel 6.1. Hasil Uji Perbedaan Persepsi Kesehatan Fisik antara Mereka yang Berolahraga dan Tidak

ANOVA

Kesehatan fisik					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	140.727	1	140.727	656.940	.000
Within Groups	4286.025	20008	.214		
Total	4426.751	20009			

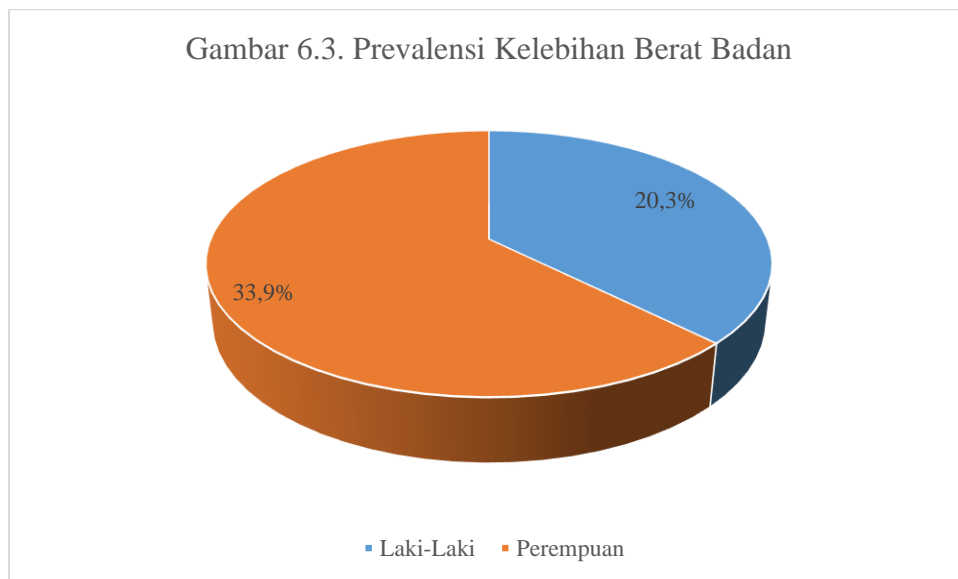
Obesitas, Penyakit Nonmenular, dan Beban Anggaran Kesehatan

Kegemukan dan obesitas didefinisikan sebagai akumulasi lemak abnormal atau berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Obesitas diukur dengan cara menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT), yakni berat badan dalam kilogram dibagi kuadrat tinggi badan dalam meter (kg/m^2). IMT adalah indeks sederhana yang umum digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. Menurut WHO, IMT lebih besar atau sama dengan 25 adalah kelebihan berat badan dan jika IMT lebih besar atau sama dengan 30 sudah termasuk dalam kategori obesitas (WHO, 2016). IMT memberikan ukuran tingkat populasi yang paling berguna untuk kelebihan berat badan dan obesitas karena sama untuk kedua jenis kelamin dan untuk semua usia orang dewasa. Namun, ini harus dianggap sebagai panduan kasar karena mungkin tidak sesuai dengan tingkat kegemukan yang sama pada individu yang berbeda.

Seiring dengan gaya hidup masyarakat yang kurang sehat, obesitas menjadi masalah yang sangat serius. Obesitas dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi salah satunya adalah karena kalori

masuk lebih besar dari pada kalori yang dikeluarkan, gaya hidup aktif menjadi pertanyaan dibalik munculnya fenomena obesitas di masyarakat. Studi di banyak negara menyebutkan bahwa kelebihan berat badan dan obesitas diperkirakan menyebabkan 3,4 juta kematian. Terdapat 3,9% dari tahun kehidupan yang hilang dan 3,8% dari tahun hidup yang terpaksa harus adaptif dengan kecacatan (Ng et al., 2014).

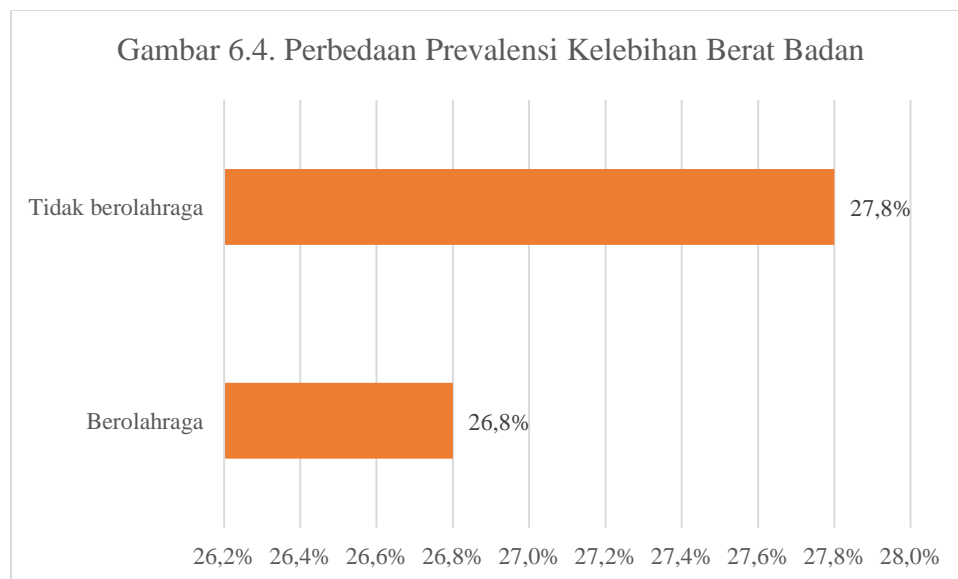
Peningkatan obesitas telah menyebabkan seruan luas untuk pemantauan rutin perubahan kelebihan berat badan dan prevalensi obesitas di semua negara. Informasi yang dapat dibandingkan dan terkini tentang tingkat dan tren sangat penting untuk mengukur efek kesehatan masyarakat dan untuk mendorong pembuat keputusan untuk memprioritaskan tindakan. Diperkirakan prevalensi global, regional, dan nasional kelebihan berat badan dan obesitas pada anak-anak dan orang dewasa terus meningkat. Proporsi orang dewasa dengan IMT 25 kg/m^2 atau lebih meningkat, dari 28,8% menjadi 36,9% pada pria, dan dari 29,8% menjadi 38,0% pada wanita. Prevalensi telah meningkat secara substansial pada anak-anak dan remaja di negara maju, 23,8% anak laki-laki dan 22,6% anak perempuan mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas juga meningkat pada anak-anak dan remaja di negara berkembang, dari 8,1% menjadi 12,9% untuk anak laki-laki dan dari 8,4% hingga 13,4% pada anak perempuan.



Pertanyaannya, bagaimana kondisi kegemukan di Indonesia? Laporan ini menyatakan bahwa angka prevalensi kelebihan berat badan (*overweight*) sebesar 27%, pada laki-laki sebesar 20,3%

dan pada perempuan sebesar 33,9%. Wanita lebih banyak mengalami kelebihan berat badan dibandingkan dengan pria. Data ini sejalan dengan data nasional yang menyebutkan bahwa prevalensi *overweight* dan obesitas wanita di Indonesia sebesar 15,1% dan 29,3% (Kemenkes, 2018). Sementara, pada kelompok pria prevalensi *overweight* dan obesitas sebesar 12,1% dan 14,5%. Kuat dugaan, ini terjadi karena kebiasaan sedentari dan pola makan dan minum dari wanita yang kurang sehat. Hal ini juga berkaitan dengan banyaknya wanita yang tinggal di rumah, mengurus masalah domestik. BPS mencatat bahwa kaum wanita usia produktif yang bekerja hanya 48,12%, sementara pada kaum pria sebesar 77,95% (BPS-Statistics Indonesia, 2018). Sebagian besar perempuan ada di sektor informal.

Dari aspek kategori usia, kelompok usia 10-19 tahun prevalensinya sebesar 8,8%, kelompok usia 20-44 tahun sebesar 29,5%, dan kelompok usia 45-60 tahun sebesar 37,5%. Tampaknya seiring usia, angka prevalensi kegemukan semakin besar. Selain itu, dari analisis data juga menunjukkan bahwa mereka yang melakukan aktivitas olahraga memiliki risiko kegemukan yang lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang tidak berolahraga. Angka prevalensi kegemukan pada mereka yang berolahraga sebesar 26,8%, sementara pada mereka yang tidak berolahraga sebesar 27,8%.



Persoalan kegemukan bukan sekadar berdampak pada kesehatan secara fisik, tetapi juga pada aspek ekonomi. Penelitian di beberapa negara berusaha menghitung beban ekonomi yang harus

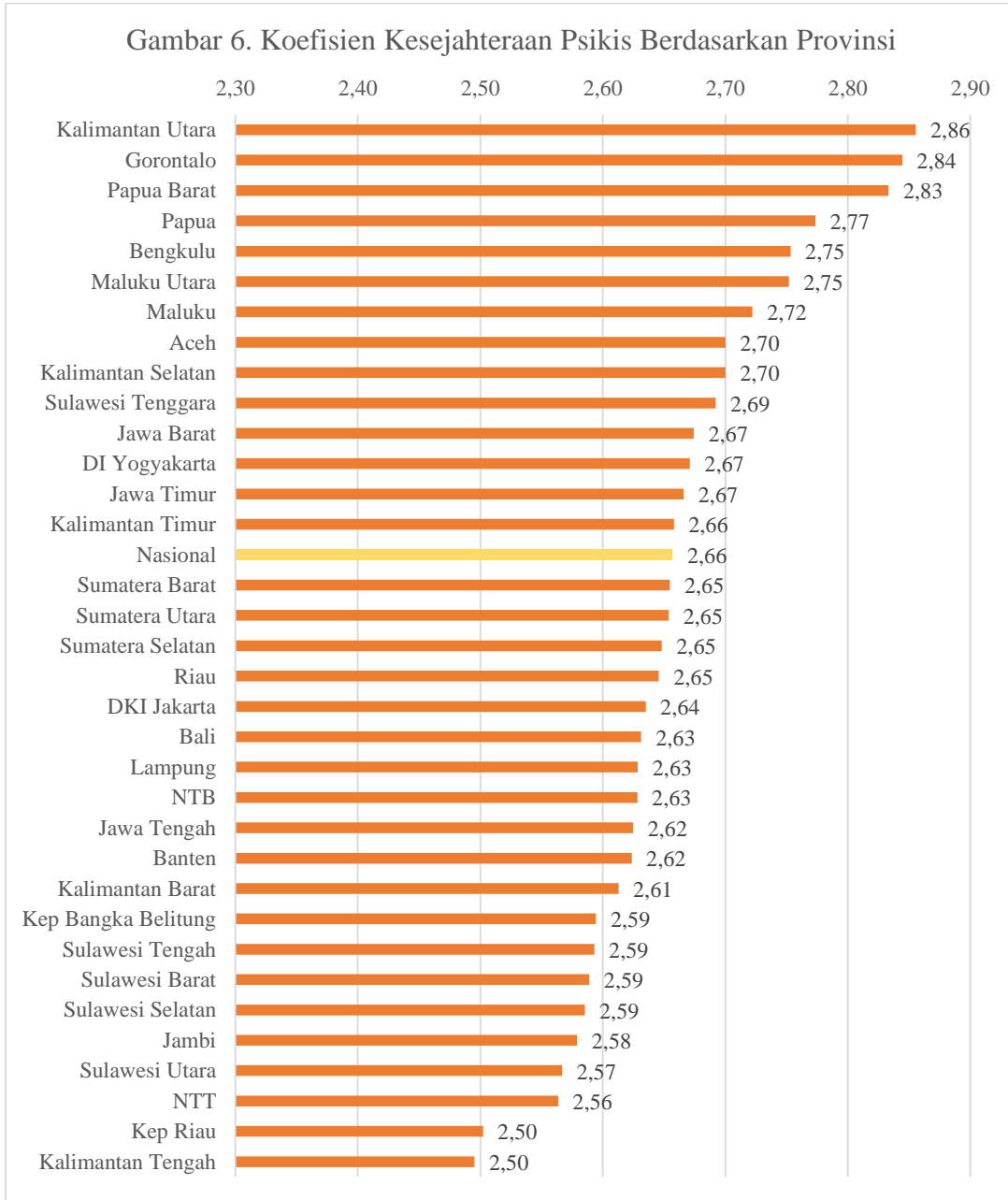
ditanggung negara akibat ketidakaktifan fisik. Di Inggris, misalnya, biaya langsung yang harus ditanggung pemerintah untuk mengobati kelebihan berat badan, obesitas, dan morbiditas pada tahun 1981 berkisar £479,3 juta dan menjadi £4,2 miliar pada tahun 2007 (Vuik, Lerouge, Guillemette, Feigl, & Aldea, 2019). Perkiraan biaya tidak langsung, yakni biaya yang timbul dari dampak obesitas pada yang lebih luas seperti hilangnya produktivitas, berkisar antara £2,6 miliar hingga £15,8 miliar. Proyeksi model teoretik menunjukkan bahwa biaya tidak langsung mencapai £27 miliar pada tahun 2015. Pada tahun 2006/2007, penyakit terkait obesitas diperkirakan menelan biaya £148 juta untuk rawat inap.

Di Skotlandia, total biaya sosial untuk obesitas dan kelebihan berat badan pada 2007/2008 diperkirakan antara £600 juta dan £ 1,4 miliar. Penelitian di Amerika Serikat terkait biaya kesehatan langsung yang harus ditanggung negara akibat ketidakaktifan fisik sebesar \$29 miliar pada tahun 1987 dan menjadi \$76.6 miliar pada tahun 2000 (U.S. Departement of Health and Human Services, 2003). Jika orang dewasa di Amerika melakukan aktivitas fisik secara regular meningkat 10%, maka diperkirakan dapat menghemat biaya \$5.6 miliar (U.S. Departement of Health and Human Services, 2003). Studi di China yang berusaha menghitung total beban ekonomi dari ketidakaktifan fisik, yang menggabungkan biaya medis dan non-medis dari lima penyakit nonmenular menunjukkan bahwa ketidakaktifan fisik berkontribusi 12% hingga 19% terhadap risiko penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, kanker, dan diabetes tipe 2. Ketidakaktifan fisik memaksakan beban ekonomi yang serius bagi China, karena menghabiskan lebih dari 15% dari biaya tahunan medis dan non-medis negara tersebut (Zhang & Chaaban, 2013).

Olahraga dan Kesejahteraan Psikis

Secara sederhana, kesejahteraan psikis adalah suatu kondisi di mana individu dapat bertindak secara otonom, dapat menerima kelebihan dan kekurangan dirinya, dan memiliki tujuan hidup yang jelas (Ryff & Singer, 1996). Kesejahteraan psikologis biasanya dikonseptualisasikan sebagai kombinasi keadaan afektif positif seperti kebahagiaan dan berfungsinya kehidupan individu dan sosial secara efektif. Dalam konteks pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, di mana orang dibatasi pergerakannya, kesejahteraan psikis menjadi faktor yang sangat penting. Olahraga dan aktivitas fisik banyak dikaitkan dengan peningkatan suasana hati, peningkatan kapasitas atensi, dan kapasitas kognitif. Sejumlah penelitian menemukan bahwa aktivitas fisik seperti menunggang

kuda, berjalan kaki, bersepeda, memancing, dan aktivitas konservasi di alam menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam harga diri dan mengatasi gangguan perasaan.



Laporan ini menyatakan bahwa secara nasional, koefisien kesejahteraan psikis mencapai 2,66 pada skala 1-5. Ada tiga Provinsi yang menduduki peringkat tertinggi dalam kesejahteraan psikis, yakni Kalimantan Utara dengan skor 2,86, Gorontalo dengan skor 2,84, dan Papua Barat dengan

skor 2,83. Sementara itu, tiga Provinsi dengan peringkat terendah adalah Kalimantan Tengah dengan skor 2,50, Kepulauan Riau dengan skor 2,50, dan Nusa Tenggara Timur dengan skor 2,56.

Tabel 6.2. Hasil Uji Perbedaan Kesejahteraan Psikis antara Mereka yang Berolahraga dan yang Tidak

ANOVA					
Kesejahteraan Psikis					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	62.102	1	62.102	182.485	.000
Within Groups	6808.935	20008	.340		
Total	6871.037	20009			

Ada perbedaan yang signifikan dalam hal kesejahteraan psikis antara mereka yang berolahraga dan yang tidak. Mereka yang berolahraga memiliki koefisien sebesar 3,75, sementara yang tidak berolahraga memiliki koefisien sebesar 3,60 pada skala 1-5. Jadi ada perbedaan sebesar 0,15 poin.

Kesimpulan

1. Indeks kesehatan masyarakat Indonesia sebesar 0,41, masuk dalam kategori rendah. Mereka yang berolahraga memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak berolahraga. Dari perspektif jenis kelamin, laki-laki memiliki kesehatan yang baik dibandingkan dengan perempuan.
2. Secara nasional, koefisien kesehatan fisik sebesar 2,72 pada skala 1-5. Ada perbedaan kesehatan fisik yang signifikan antara mereka yang berolahraga dan tidak. Koefisien kesehatan fisik mereka yang berolahraga sebesar 3,99, sementara mereka yang tidak berolahraga sebesar 3,78. Ada perbedaan sebesar 0,21 poin.
3. Angka prevalensi kelebihan berat badan (*overweight*) secara nasional sebesar 27%, pada laki-laki sebesar 20,3% dan pada perempuan sebesar 33,9%. Perempuan cenderung memiliki kelebihan berat badan daripada laki-laki dengan perbedaan sebesar 13,6%. Kelompok usia 10-

19 tahun prevalensinya sebesar 8,8%, kelompok usia 20-44 tahun sebesar 29,5%, dan kelompok usia 45-60 tahun sebesar 37,5%.

4. Secara nasional, koefisien kesejahteraan psikis mencapai 2,66 pada skala 1-5. Ada perbedaan yang signifikan dalam hal kesejahteraan psikis antara mereka yang berolahraga dan yang tidak. Mereka yang berolahraga memiliki koefisien sebesar 3,75, sementara yang tidak berolahraga memiliki koefisien sebesar 3,60 pada skala 1-5. Jadi ada perbedaan sebesar 0,15 poin.

Bab 7 Olahraga, Performa Tinggi, dan Identitas

Performa Tinggi dalam Olahraga

Dalam setiap pertandingan atau kejuaraan, perolehan medali memang menjadi ukuran keberhasilan suatu daerah atau negara dalam mengembangkan prestasi olahraganya. Suka atau tidak suka, itulah fakta yang terjadi. Meskipun hal tersebut dapat diuji lebih dalam, apakah suatu daerah yang memperoleh medali dalam PON, misalnya, serta-merta dapat dijustifikasi bahwa daerah yang bersangkutan maju prestasi olahraganya. Bagaimana jika sejumlah medali tersebut diperoleh dari sejumlah atlet yang “dibeli” dari daerah lain? Bagaimana halnya karena alasan gengsi, tuan rumah harus menjadi juara umum dengan menghalalkan segala cara?

Dalam beberapa kajian, perolehan medali sangat terkait erat dengan kemajuan ekonomi dan jumlah penduduk (De Bosscher et al., 2009, 2008). Variabel ekonomi dan jumlah penduduk menjadi faktor dominan. Semakin kaya dan semakin banyak penduduk, maka semakin banyak jumlah medali yang diperoleh. *More people, more money, more medals* (Hylton et al., 2007). Peraih medali dalam suatu *event*, apakah Olimpiade, Asian Games, Sea Games, dan bahkan PON, adalah mereka yang secara ekonomi memiliki PDB yang tinggi dan jumlah penduduk yang besar. Amerika dan China adalah negara dengan kekuatan ekonomi dan jumlah penduduk terbesar. Mereka selalu mendominasi perolehan medali dalam Olimpiade. Demikian juga Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta adalah daerah dengan PDRB dan penduduk terbesar. Ketiga daerah tersebut juga silih berganti menjadi juara dalam PON.

Kajian yang dilakukan terhadap 34 provinsi di Indonesia melalui analisis regresi menunjukkan bahwa medali yang diperoleh suatu daerah dipengaruhi secara signifikan oleh PDRB dan jumlah penduduknya, dengan nilai beta sebesar 0,615 dan 0,337 pada signifikansi $<.01$ dan $<.05$ (T.C. Mutohir et al., 2020b). Variabel partisipasi dalam olahraga dan tingkat kebugaran jasmani justru tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil kajian ini mengonfirmasi kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Bosscher, dkk serta Hylton, dkk terkait dengan keberhasilan pembangunan olahraga (De Bosscher et al., 2008; Hylton et al., 2007).

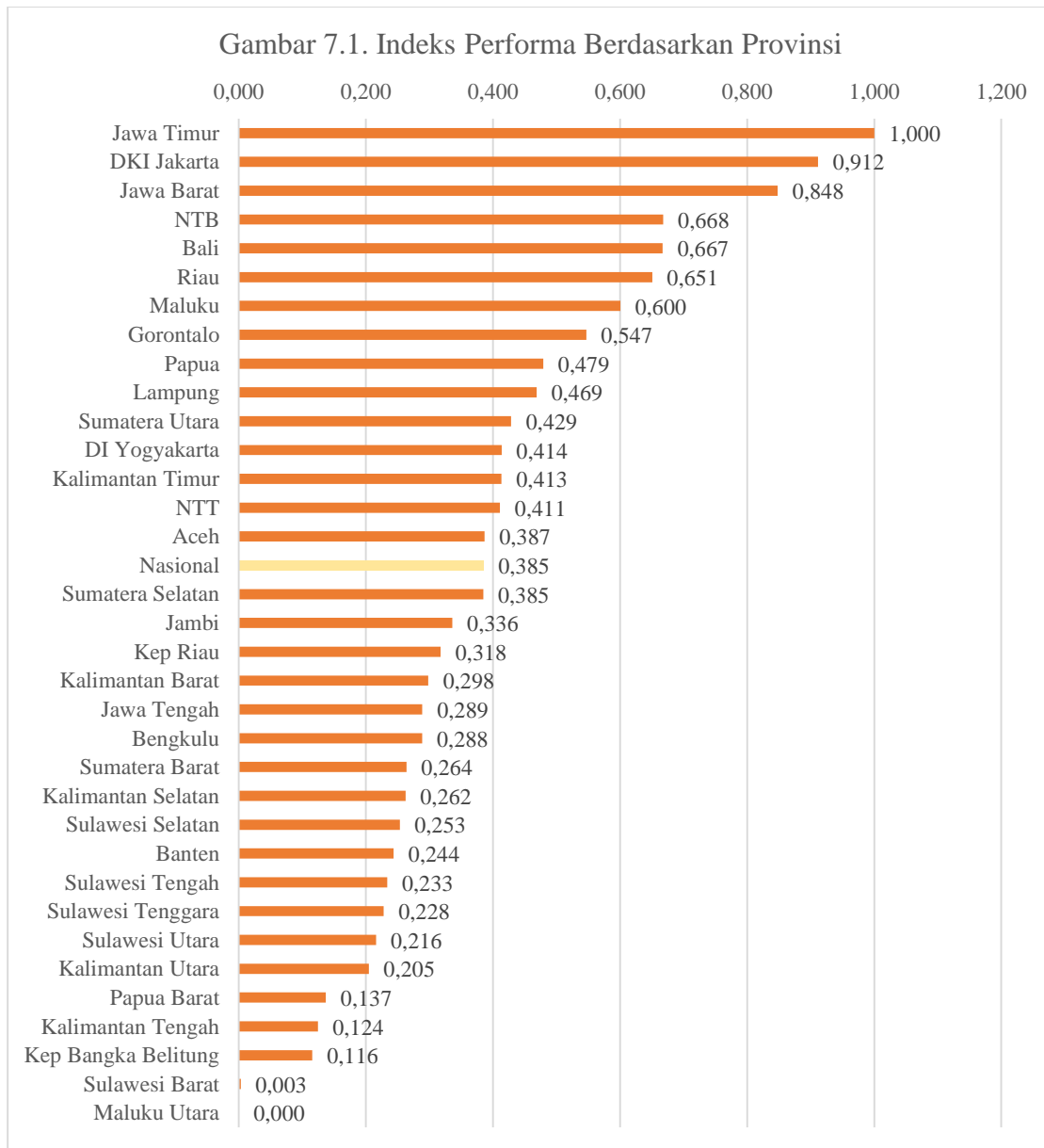
Hasil kajian tersebut semakin memperkuat bukti bahwa perburuan medali membutuhkan biaya tinggi, hanya mereka yang memiliki cukup sumberdaya yang dapat memperolehnya. Sebagai ilustrasi, dalam persiapan menuju Olimpiade 2004, pemerintah Inggris mengalokasikan anggaran sebesar £70 juta atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Dalam olimpiade tersebut, Inggris mendapatkan

30 medali, 9 diantaranya merupakan medali emas. Jika dihitung, maka harga setiap medali sekitar £2,3 juta atau sekitar 43 milyar rupiah (Houlihan & Green, 2008). Pada konteks nasional seperti PON, kita bisa pelajari dari Jawa Barat. Dalam persiapan PON 2016, Jawa Barat mengalokasikan dana sebesar 461 milyar. Dalam PON tersebut, Jawa Barat meraih 531 medali, terdiri dari 217 emas, 157 perak, dan 157 perunggu. Jika dihitung, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk 1 medali sebesar 868 juta atau mendekati 1 milyar (Toho Cholik Mutohir & Lutan, 2020).

Sekali lagi, olahraga membutuhkan biaya besar. Karena itu, keinginan untuk memberikan *mandatory spending* sebesar 2% dalam RUU SKN bisa dipahami (DPR RI, 2020), meski tidak mudah dan bahkan mustahil untuk diwujudkan. Pihak pertama yang paling keberatan terkait usulan tersebut adalah Kementerian Keuangan dan Pemda. Mengapa? Karena kebijakan tersebut selain tidak berbasis kinerja juga akan menjerat kaki pemerintah, fleksibilitas penganggaran tidak bisa dilakukan. Sudah terlalu banyak kebijakan *mandatory spending* dalam Undang-Undang, yakni bidang pendidikan 20%, kesehatan 10%, dana desa 10%, dana transfer umum 25%, dan belum termasuk dana otonomi khusus. Secara keseluruhan sudah sekitar 70% yang menjadi *mandatory spending* dalam APBN.

Dalam praktik penganggaran olahraga, yang dibutuhkan sejatinya bukan sekadar *mandatory spending*, tetapi komitmen kolektif pemangku kepentingan. Sangat boleh jadi, dengan visi, program, dan target yang jelas, seperti yang kita berharap dari DBON, maka penganggaran bisa berbasis kinerja dan anggarannya lebih dari 2%. Keberhasilan Indonesia dalam Asian Games 1962 dan 2018, bukan karena mematok anggaran. Demikian juga yang terjadi di luar negeri seperti Amerika, Jepang, dan Australia.

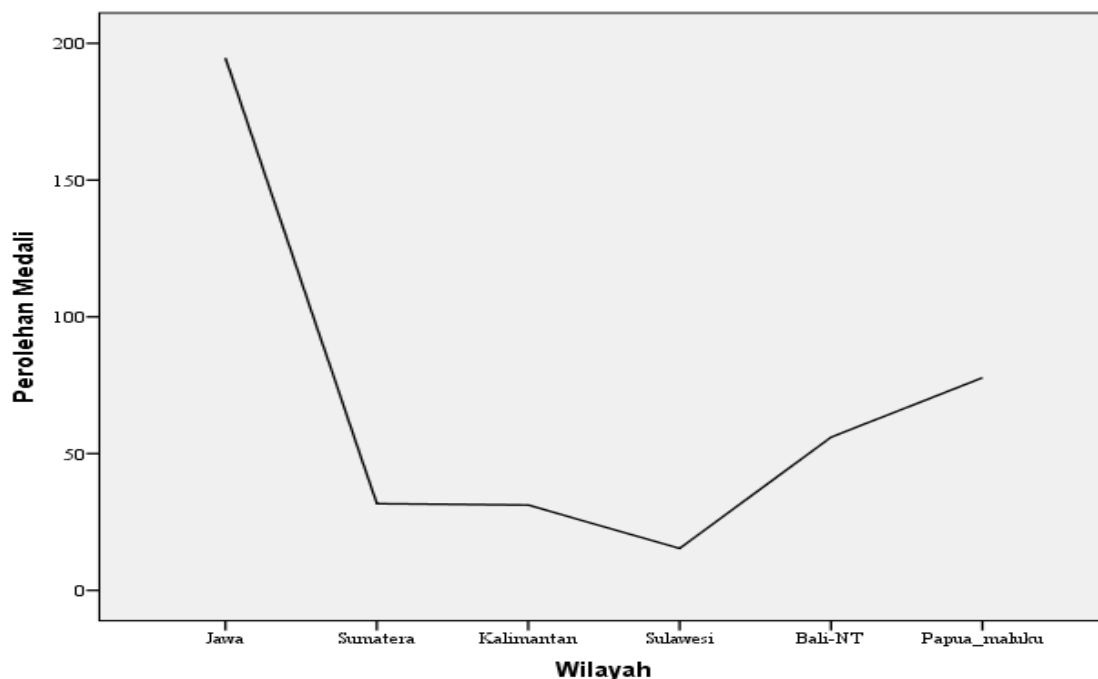
Pembiayaan olahraga tidak mungkin sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, meski dalam negara komunis sekalipun. Sebelum tahun 1990, pemerintah China membiayai olahraga untuk kepentingan menegakkan ideologi. Namun pasca 1990, pembiayaan sudah bergeser kepada swasta melalui sponsorship (Hallmann, Kirstin and Petry, 2013). Di negara-negara maju yang termasuk negara kaya sekalipun memperoleh dana olahraga dari tiga sumber: (1) pemerintah, (2) swasta-korporat, dan (3) toto, kecuali AS, yang sepenuhnya dari pihak swasta-korporat. Artinya, industri olahraga harus terus diupayakan melalui penciptaan ekosistem yang kondusif. Dengan demikian, dunia olahraga akan bisa menghidupi dirinya sendiri.



Laporan ini menyatakan bahwa secara nasional, indeks performa sebesar 0,385. Berdasarkan kategori yang ada, maka indeks tersebut masuk dalam kategori rendah. Terdapat tiga Provinsi yang menduduki peringkat teratas, yakni Jawa Timur dengan indeks sebesar 1, DKI Jakarta dengan indeks sebesar 0,912, dan Jawa Barat dengan indeks sebesar 0,848. Sementara itu, Provinsi dengan indeks terendah adalah Maluku Utara dengan indeks 0,000, Sulawesi Barat dengan indeks 0,003, dan Kepulauan Bangka Belitung dengan indeks 0,116.

Dalam kaitan ini perlu diberikan catatan bahwa performa diukur dengan menggunakan perolehan medali pada PON XX Papua 2021. Dalam PON tersebut, Jawa Barat memang menempatkan diri sebagai Provinsi yang memperoleh medali terbanyak, mengungguli DKI Jakarta dan Jawa Timur. Namun demikian, proporsi jumlah atlet yang diikutsertakan lebih besar dibandingkan dengan DKI Jakarta dan Jawa Timur. Dari perspektif *cost-effectiveness analysis*, maka indeks Jawa Barat lebih rendah dibandingkan dengan DKI Jakarta dan Jawa Timur. Sementara itu, pada kasus Maluku Utara yang mendapatkan indeks 0,000, karena Provinsi tersebut dalam PON XX 2021 tidak memperoleh medali emas dan perak, yang mereka peroleh berupa 3 medali perunggu dan ketika dipertimbangkan jumlah atlet yang ikut serta sebanyak 52 orang, maka indeksnya mendekati nol.

Gambar 7.2. Peta Perolehan Medali dalam PON XX Papua 2021

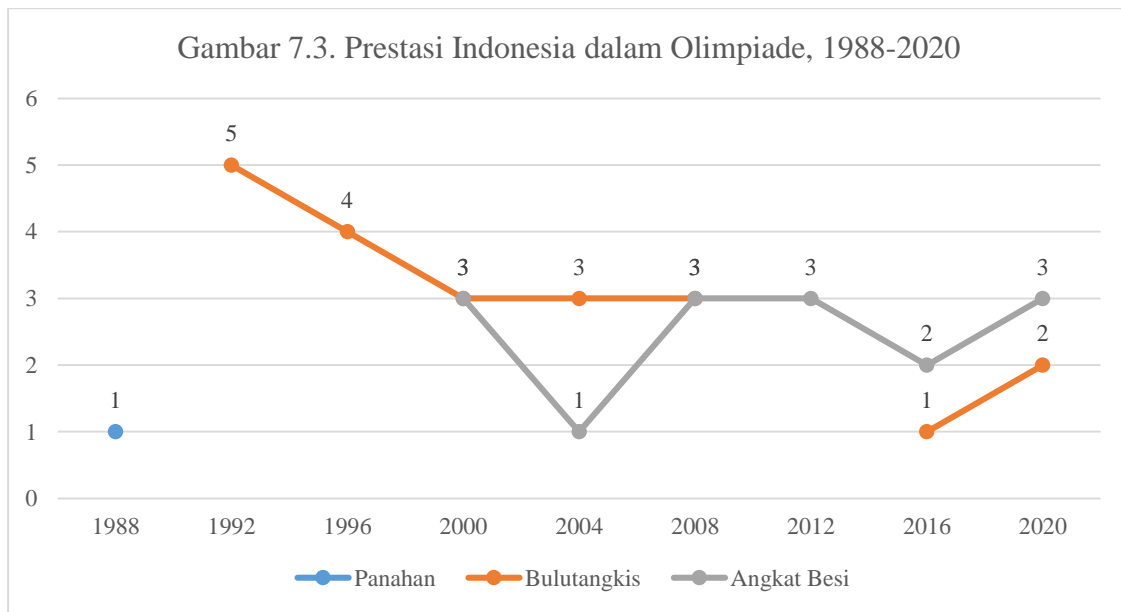


Perolehan medali dalam PON akan terus menjadi indikator kesenjangan dalam pembangunan olahraga, terutama antara Jawa dan luar Jawa. Dalam PON XX Papua 2021, misalnya, 53% medali dikuasai oleh Provinsi dari Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Sementara itu, wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi masih cenderung tertinggal. Khusus Papua sebagai tuan rumah, perolehan medalnya memang sangat fantastik. Dari 68 medali pada PON 2016, menjadi 261 medali pada PON 2021. Peningkatannya mencapai 384%. Pertanyaannya,

apakah medali yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan atlet yang dilakukan oleh Papua? Ataukah, ini lebih mengikuti logika umum sebagai tuan rumah yang ingin memenangi banyak nomor pertandingan sebagai indikator kesuksesan? Setelah itu, keberhasilan tersebut akan meredup seiring berjalannya waktu dan momentum.

Prestasi dan Penguatan Identitas

Jika suatu kejuaraan multicabang seperti PON sekedar menjadi ajang perburuan medali, maka yang terjadi adalah manipulasi proses pembinaan yang berujung pada capaian prestasi yang semu, tidak otentik. Karena itu, perlu ada perspektif baru dalam melihat prestasi dalam olahraga, yakni olahraga sebagai identitas, baik dalam konteks daerah dan terlebih sebagai identitas nasional (Coakley, 2017; Houlihan, 1997).



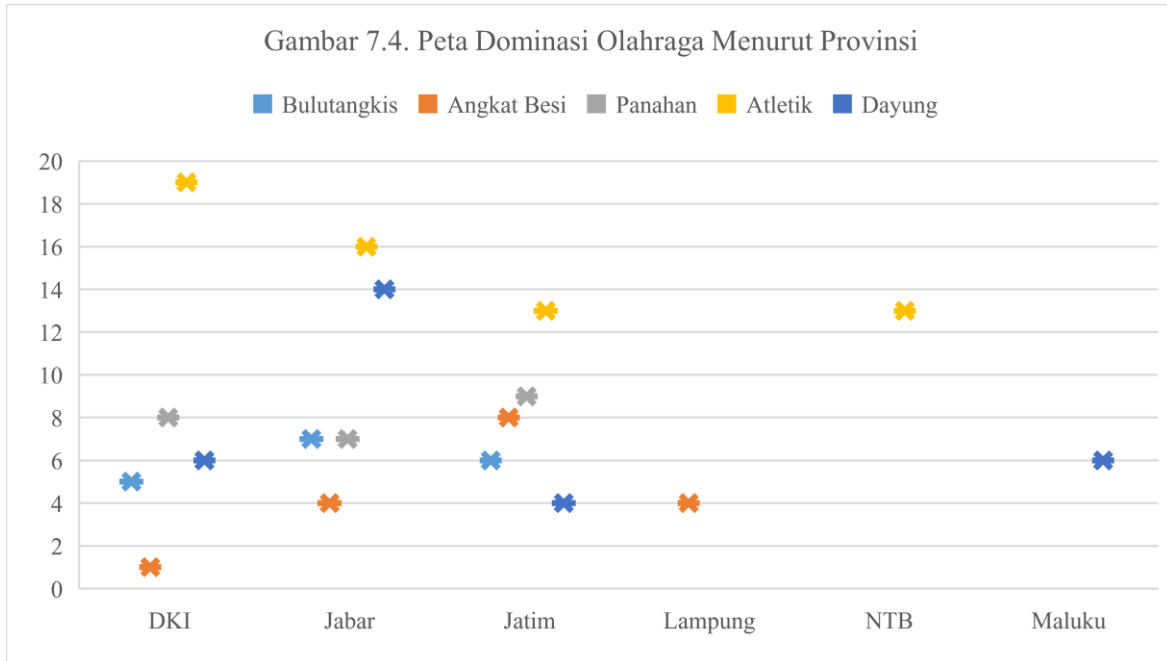
Dalam konteks sosiologis, olahraga dapat digunakan sebagai instrumen untuk membangun identitas, baik pada tataran etnis, daerah maupun suku bangsa. Dalam hal sepakbola, misalnya, ada sejumlah negara yang memiliki identitas kuat seperti Brasil, Argentina, Jerman, dan Spanyol. Pada cabang olahraga atletik, nomor lari jarak pendek 100-200m telah menjadi identitas nasional bagi Jamaica yang berpenduduk 2,7 juta dengan melahirkan sprinter kelas dunia. Sementara itu, Kenya dengan penduduk sebesar 49,6 juta sangat dominan dalam lari jarak jauh. Pada level nasional ada daerah yang memiliki tradisi kuat dalam sepakbola dan telah menjadi identitas seperti Papua,

Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Dalam olahraga bulutangkis, dominasi Asia lebih kuat dibandingkan dengan dengan sejumlah negara Eropa dan Amerika sekalipun. Nama Indonesia seringkali bergema di forum internasional melalui olahraga ini. Rudy Hartono, misalnya, menjadi satu-satunya pemain dunia yang dapat menjuarai All England 8 kali mulai 1968-1976 dan 7 kali diperolehnya secara berturut-turut. Pada kejuaraan Piala Thomas yang merupakan lambang supremasi bulutangkis beregu putra dunia, pemain Indonesia menjadi juara sebanyak 13 kali mulai 1958-2002 dan 5 kali diperolehnya secara berturut-turut. Sampai sekarang, bulutangkis menjadi satu-satunya olahraga Indonesia yang telah memperoleh medali emas dalam Olimpiade. Bagi Indonesia, bulutangkis telah menjadi identitas nasional. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada angkat besi.

Cabang olahraga panahan pernah memperoleh medali perak pada Olimpiade Seoul 1988, namun setelah itu tidak lagi bisa mempersembahkan medali hingga sekarang. Konsistensi merupakan indikator penting bahwa capaian prestasi yang diperoleh bukan karena faktor-faktor yang sifatnya temporer apalagi kebetulan, melainkan kinerja sistem yang optimal. Sejak dipertandingkan untuk pertama kalinya pada Olimpiade Barcelona 1992, bulutangkis langsung memperoleh 2 medali emas dan 2 medali perak. Meski capaian prestasi berikutnya bersifat dinamis, tetapi bulutangkis masih menjadi tumpuhan harapan bagi Indonesia hingga sekarang dan ke depan. Hal yang sama juga terjadi pada cabang olahraga angkat besi yang konsisten menyumbangkan medali sejak Olimpiade Sydney 2000 hingga sekarang. Artinya, bulutangkis selama 28 tahun dan angkat besi selama 20 tahun relatif konsisten memperoleh medali pada Olimpiade.

Terbentuknya sebuah identitas tentu tidak serta-merta, tetapi melalui sebuah proses panjang, yang dalam konteks performa olahraga disebut sebagai rekam jejak prestasi, dan ada upaya terus menerus untuk menjaga dan memelihara identitas tersebut (Allen et al., 2010). Pembentukan dan pemeliharaan identitas yang lebih umum secara sosial melalui partisipasi pribadi dalam olahraga serta melalui menonton olahraga telah menjadi hal yang sangat menarik untuk dicermati. Olahraga diyakini sangat manjur dalam membangun identitas seperti itu karena popularitasnya yang luar biasa, gairah yang dapat ditimbulkannya baik pada peserta maupun penonton, dan potensinya untuk menghadirkan model yang efektif dari identitas yang berbeda. Berbagai macam olahraga dapat digunakan untuk menciptakan dan memperkuat identitas gender, seperti identitas "maskulin" melalui partisipasi dalam olahraga sepak bola, rugby, dan beladiri. Bahkan dalam konteks yang

cenderung kontroversial, partisipasi dalam olahraga dapat digunakan untuk menciptakan dan mempertahankan identitas gender yang menantang makna dan definisi tradisional – misalnya, atlet gay yang menantang definisi hegemonik maskulinitas.



Dalam konteks olahraga sebagai identitas daerah, peta dominasi prestasi dapat dilihat dari hasil PON dari waktu ke waktu. Dominasi tiga Provinsi besar, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, ternyata tidak hanya pada perolehan medali secara umum, tetapi juga menjadi penyangga utama olahraga prioritas seperti bulutangkis, angkat besi, dan panahan. Meskipun demikian, ada wilayah lain yang juga menjadi kontributor utama. Cabang olahraga angkat besi, misalnya, selain Jawa Timur dan Jawa Barat, Provinsi Lampung menjadi tulang punggung yang menciptakan atlet angkat besi. Demikian juga cabang olahraga atletik pada Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Dayung pada Provinsi Maluku. Artinya, angkat besi telah menjadi identitas daerah Lampung, Atletik telah menjadi identitas daerah Nusa Tenggara Barat, dan Dayung menjadi identitas daerah Maluku.

Kesimpulan

1. Secara nasional, indeks performa olahraga sebesar 0,385, masuk dalam kategori rendah. Terdapat tiga Provinsi yang menduduki peringkat teratas, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, Provinsi dengan indeks terendah adalah Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung.
2. Terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara Provinsi di Jawa dan di luar Jawa dalam perolehan medali. Dari waktu ke waktu, dominasi Provinsi di Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, sangat signifikan dalam perolehan medali. Ada korelasi kuat antara ketersediaan sumberdaya, terutama anggaran, dengan perolehan medali.
3. Perlu ada perspektif baru dalam melihat prestasi olahraga sebagai sebuah identitas. Pembentukan identitas membutuhkan proses yang panjang dan upaya terus menerus untuk menjaga dan memelihara identitas tersebut. Cabang olahraga bulutangkis dan angkat besi memenuhi syarat sebagai identitas nasional karena rekam jejaknya di kejuaraan internasional dan upaya yang sungguh-sungguh serta terus-menerus dalam menjaga prestasi tersebut.

Bab 8 Menggerakkan Ekonomi Melalui Olahraga

Menelaah benang merah yang menghubungkan olahraga dan ekonomi memang sesuatu yang sangat penting. Menghubungkannya bukan merupakan hal yang mudah walau pun juga bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Ada pameo yang bersifat universal bahwa manusia secara individu maupun kolektif, adalah makhluk yang dikenal sebagai “*homo economicus*”. Segala sepek terjangnya tidak terlepas dengan aneka motif untuk pemenuhan kebutuhan ekonominya. Hal tersebut sangat bersinggungan erat dengan pameo lain bahwa “tiada hari tanpa olahraga”. Persinggungan di antara predikat manusia sebagai *homo economicus* dan formula interaksi sosial tiada hari tanpa olahraga, menghasilkan simbiosis yang kuat antara olahraga dan ekonomi.

Ekonomi olahraga memiliki esensi yang lengkap dalam koridor besar pembangunan olahraga, yakni misi *development of sport* dan sekaligus *development trough sport*. Lebih jelasnya pembangunan olahraga itu adalah berhubungan dengan lini strategis untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkonotasi menyehatkan, mendamaikan, dan memakmurkan. Terdapat segmen kemakmuran dalam pembangunan olahraga yang bersinergi dengan aktivitas ekonomi, termasuk di dalamnya adalah ekonomi kreatif (Kristiyanto, 2009).

Perlu ada kesadaran baru bahwa olahraga tidak hanya berhenti pada pencapaian medali, tetapi memiliki dampak pada aspek pembangunan bidang lain termasuk ekonomi. Indonesia bisa belajar dari Korea Selatan dan Inggris dalam mengelola ekonomi olahraga. Selama beberapa dekade terakhir, Korea Selatan telah memperoleh pengakuan internasional yang luar biasa dengan mencapai kinerja yang sangat baik dalam berbagai kompetisi olahraga internasional dan menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga besar seperti olimpiade. Meskipun keberhasilan dalam olahraga elit telah memberikan kontribusi untuk menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu kekuatan olahraga di dunia, Korea Selatan telah memberikan perhatian pada peran yang dapat dimainkan oleh olahraga sebagai alat untuk pengembangan sosial dan pribadi, terutama dari aspek ekonomi (Ha, Lee, & Ok, 2015). Sementara itu, di Inggris olahraga telah diakui sebagai sektor strategis dari kegiatan ekonomi, bagian dari industri rekreasi yang semakin penting yang menyumbang lebih dari seperempat dari semua pengeluaran konsumen dan lebih dari 10 persen dari total lapangan kerja di Inggris, dan menghasilkan lebih dari £20 miliar per tahun (Gratton & Taylor, 2000). Olahraga bukanlah sektor terbesar dari industri rekreasi, tetapi merupakan salah

satu yang paling cepat perkembangannya. Olahraga merupakan industri yang menyumbang bagian signifikan dari Produk Domestik Bruto, pengeluaran konsumen, dan lapangan kerja.

Faktor ekonomi menjadi salah alasan mengapa banyak negara berebut menjadi penyelenggara Olimpiade. Even empat tahunan tersebut merupakan perhelatan olahraga paling berpengaruh di dunia, tidak hanya akan mempromosikan pengembangan industri barang dan jasa, budaya, dan olahraga, tetapi juga mempromosikan pertumbuhan ekonomi kota tuan rumah, merangsang pembangunan ekonomi regional, dan membawa dampak signifikan pada ekonomi negara tuan rumah (L. Huang, 2011; Ratten & Ratten, 2011). Dari sudut pandang ekonomi, Olimpiade tidak hanya memiliki efek munculnya industri dan promosi merek, tetapi juga memiliki efek radiasi ekonomi dan merangsang konsumsi. Oleh karena itu, untuk mengadakan Olimpiade tidak hanya dapat meningkatkan prestise internasional negara tuan rumah, meningkatkan reputasi internasionalnya, tetapi juga membawa permintaan yang sangat besar untuk investasi dan peluang bisnis.

Olimpiade Beijing, misalnya, tidak hanya menyediakan ekonomi yang tumbuh cepat dengan stimulasi permintaan yang besar, menguntungkan untuk pengembangan teknologi lokal, untuk membantu meningkatkan dan memperluas fasilitas wisata, tetapi juga membangkitkan semangat prospek ekonomi dan merangsang konsumsi. Sementara itu, keberhasilan penyelenggaraan Olimpiade dan infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan citra internasional China sebagai tujuan wisata, membantu menarik investasi bisnis, tetapi juga membantu mempromosikan pembentukan dan pengembangan rantai industri olahraga. Berbagai peralatan olahraga, perlengkapan dan peralatan lainnya yang secara langsung dibutuhkan untuk Olimpiade Beijing 2008 senilai hampir 170 juta yuan, pada tahun 2010, nilai output tahunan barang olahraga China diperkirakan meningkat 0,3% menyumbang proporsi PDB. Pada 2012, ukuran industri Alat Olahraga China akan meningkat menjadi 131,2 juta yuan, tingkat pertumbuhan tahunan mencapai 26%. Diperkirakan keuntungan pasar dari industri Alat Olahraga populer mencapai 35,4 miliar yuan pada tahun 2012, akun saham untuk industri Alat Olahraga meningkat dari 17% menjadi 27% (L. Huang, 2011).

Dari sini menjadi semakin jelas bahwa pengembangan ekonomi olahraga menjadi penting karena: (1) ekonomi olahraga itu sebagai kegiatan yang berbeda dan spesifik; (2) berkaitan dengan fitur-fitur utama kebijakan yang menciptakan lingkungan baru ekonomi olahraga, dan (3) selalu

berkaitan dengan partisipasi masyarakat atau publik dalam berolahraga, penyelenggaraan *event* olahraga, serta berkembangnya olahraga profesional (Downward, Dawson, & Dejonghe, 2009).

Relasi olahraga dan ekonomi sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan sebuah konfigurasi hubungan fungsional yang sangat kuat. Saling berhubungan, saling memperkuat, dan saling menggerakkan satu dengan yang lainnya. Hubungan fungsional timbal balik yang terjadi dapat dipahami bahwa ekonomi menggerakkan olahraga dan olahraga menggerakkan ekonomi. Pertanyaannya adalah bagaimana formula yang sebaiknya disusun agar olahraga memiliki energi penggerak yang cukup signifikan untuk memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Setidaknya terdapat tiga aspek utama pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh olahraga yang menjadi tantangan besar bersama. *Pertama*, mengenali nilai spesifik serta potensi unik dari kegiatan olahraga. Potensi unik tersebut berkaitan dengan “nilai ekonomi” yang sifatnya mikro maupun makro. Nilai yang terbangkitkan melalui aktivitas besar yang mengakomodasikan aneka kebutuhan pragmatis ekonomi dan pencapaian tujuan olahraga. *Kedua*, pertumbuhan ekonomi digerakkan melalui olahraga diperkuat dengan sentuhan kebijakan sinergi untuk menggerakkan ekosistem perekonomian serta keolahragaan secara multilingkup dan multiranah. Olahraga merupakan “fungsi reservoir energi penggerak”. *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi keolahragaan dipersyarati oleh pertumbuhan angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga, baik partisipasi secara aktif maupun secara pasif.

Olahraga menggerakkan ekonomi karena memiliki karakteristik yang khas yang menjadikannya memiliki banyak fungsi spesifik. Olahraga dalam pemahaman yang komprehensif, bukan saja sekadar mendefinisikan aktivitas fisik yang dilakukan secara perorangan maupun kolektif. Nilai elaboratif olahraga besifat *unlimited* yang potensial memberikan “tendangan-tendangan besar” yang acapkali bernilai *multiplier effect* secara mental, sosial, dan ekonomi. Cakupan *multiplier effect* mulai dari yang bersifat mikro, seperti kesehatan, kebugaran, imunitas tubuh, pemenuhan hobi dan pengisian waktu luang yang positif, hingga persoalan makro yang mengharuskan tata kelola dalam kebijakan layanan publik yang melibatkan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, pengusaha, dan berbagai komunitas terkait.

Fungsi spesifik olahraga yang menghasilkan *multiplier effect* secara ekonomi dapat dicontohkan oleh dampak penyelenggaraan *event* olahraga, baik yang bersifat *single event* maupun multi event. Baik *event* yang sifatnya formal diselenggarakan sebagai bagian dari *Olympic movement*, maupun *event non olympic*, bahkan *event* kreatif yang berupa *event* yang bernuansa

extreme sport. Sejarah penyelenggaraan olimpiade telah memberikan pelajaran penting dalam membuka sekat pemisah antara industri dan olahraga, sekaligus membuka konesitas olahraga dan ekonomi. Olimpiade 1984 Los Angeles, misalnya, berhasil menjadi salah satu pemantik bahwa ranah olahraga dan industri itu ternyata “dua sahabat karib” yang tak bisa terpisahkan. *Multi event* yang murni diselenggarakan pihak swasta tersebut memberikan dampak lahirnya aneka bisnis baru yang sangat meyakinkan. Menjadi justifikasi bahwa paradigma olahraga bukan hanya “membangun olahraga”, melainkan juga “membangun melalui olahraga”.

Aneka perusahaan yang bergelut di bidang penginapan, kuliner, cinderamata, transportasi, *merchandise*, serta hiburan mengalami lonjakan. Bukan saja pada saat penyelenggaraan olimpiade tersebut, tetapi berlanjut secara *multiplier effect*. Bahkan, beberapa peluang kerjasama pengembangan industri dan lahirnya berbagai perusahaan *start-up* pun tumbuh sangat subur usai penyelenggaraan olimpiade ditutup secara resmi.

Propaganda positif tentang tuan rumah pun berlanjut dan diseberluaskan oleh para duta olahraga tatkala mereka kembali pulang ke negaranya masing-masing. Inilah yang menjadi penjelasan kenapa menjadi tuan rumah *event* olahraga itu “diperebutkan”, karena superstrategis untuk kepentingan propaganda industri olahraga. Lahirnya prestasi “moncer” dan spektakuler yang terukir oleh figur atlet selama penyelenggaraan, menjadi magnet tersendiri yang makin menguat. Atlet pemegang emas olimpiade, apa lagi untuk cabor dan nomor populer, akan langsung naik kelas dan secara otomatis menjadi *brand image* dalam konstalasi reputasi yang bersinggungan dengan penguatan entitas nilai industri.

Potensi Ekonomi Olahraga Indonesia

Potensi dan peluang Indonesia secara ekonomi sangat menjanjikan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah untuk memajukan perekonomian. Sumber daya manusia pun juga melimpah yang bisa menjadi potensi sekaligus menciptakan peluang pasar yang bisa menggerakkan perekonomian. Menurut sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa (BPS, 2021). Selain bertumpu pada faktor sumber daya alam, Indonesia juga tumbuh dengan ditopang oleh besarnya konsumsi domestik yang besar. Masa mendatang pertumbuhan kelas menengah baru bahkan kian membesar.

Dari dimensi partisipasi, laporan ini menyebutkan bahwa dari keseluruhan responden SDI 2021 yang berusia 10-60 tahun, sebanyak 81,2% melakukan olahraga atau aktivitas fisik meski

hanya sesekali dalam seminggu dan yang melakukan aktivitas olahraga/aktivitas fisik secara aktif, ≥ 3 kali perminggu, sebesar 32,83%. Artinya, jumlah penduduk berusia 10-60 tahun yang melakukan olahraga sebanyak 159,7 juta orang dan yang melakukan olahraga secara aktif sebanyak 63,1 juta orang. Sebuah angka keterlibatan masyarakat dalam olahraga yang sekaligus menunjukkan potensi pasar dari ekonomi olahraga.

Ada korelasi yang sangat kuat antara tingkat partisipasi dengan ekonomi olahraga dengan koefisien sebesar 0,77 pada $p < 0,01$. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam berolahraga, maka semakin tinggi pula potensi ekonomi olahraga yang dapat dikapitalisasi. Selain itu, dimensi kebugaran juga berkorelasi dengan dimensi ekonomi dengan koefisien sebesar 0,58 pada $p < 0,01$.

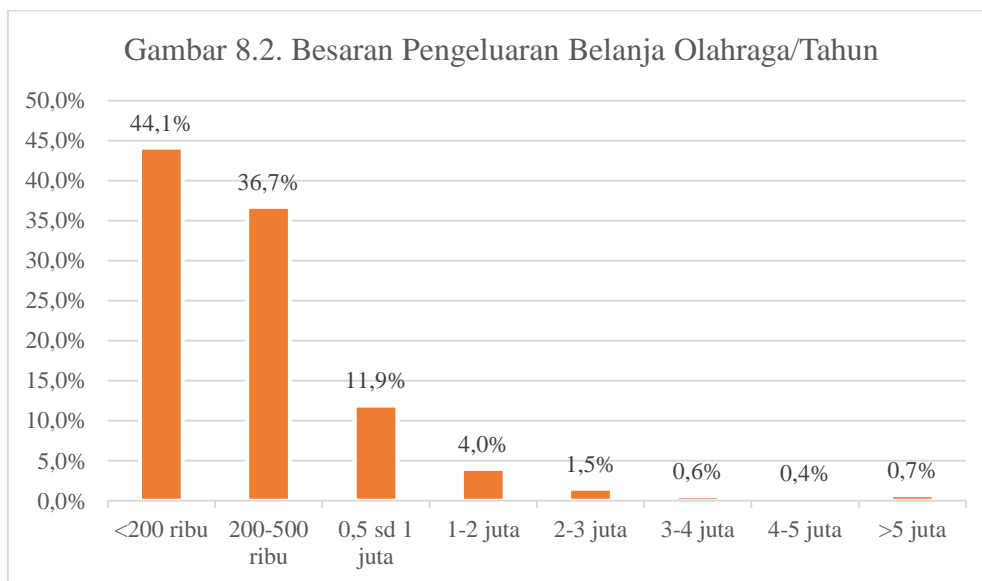
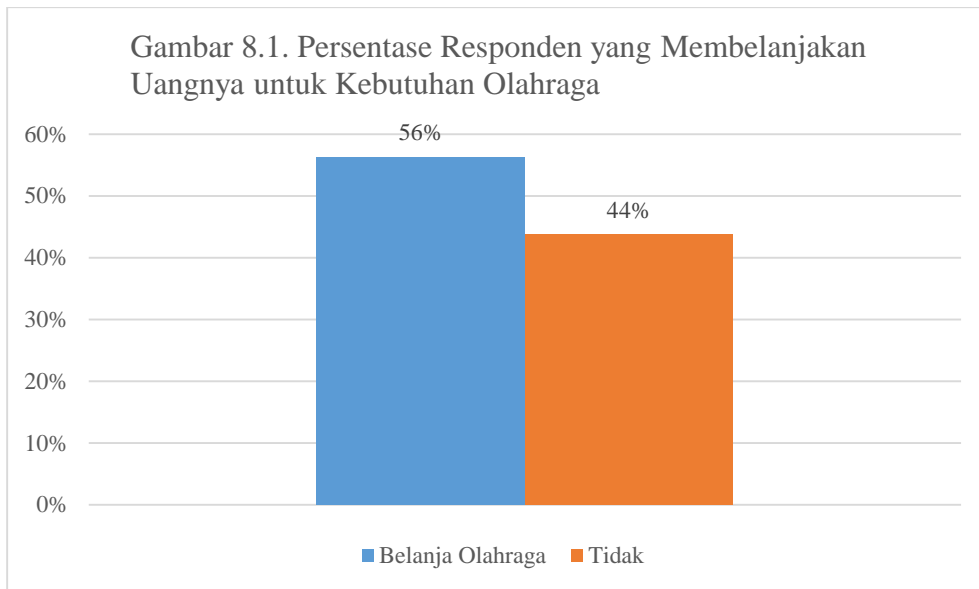
Tabel 8.1. Korelasi antara Partisipasi, Ekonomi, dan Kebugaran

		Partisipasi	Ekonomi	Kebugaran
Partisipasi	Pearson Correlation	1	.775**	.522**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002
	N		34	34
Ekonomi	Pearson Correlation		1	.585**
	Sig. (2-tailed)			.000
	N			34
Kebugaran	Pearson Correlation			1
	Sig. (2-tailed)			
	N			

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari keseluruhan responden dalam SDI 2021, 56% atau sekitar 110,45 juta orang membelanjakan uangnya untuk kebutuhan olahraga dalam bentuk belanja barang, seperti pembelian sepatu, pakaian, dan perlengkapan yang lain, serta untuk belanja jasa olahraga seperti TV berbayar, membayar pelatih, dan sebagainya. Ketika kepada mereka ditanya seberapa besar jumlah uang yang dibelanjakan dalam satu tahun? Sebanyak 44,1% menjawab mereka membelanjakan uang untuk kebutuhan olahraga sebesar ≤ 200 ribu rupiah, sebanyak 36,7% membelanjakan sebesar 200-500 ribu rupiah, 11,9% membelanjakan sebesar 0,5-1 juta rupiah, 4% membelanjakan sebesar 1-2 juta rupiah, 1,5% membelanjakan sebesar 2-3 juta rupiah, 0,6%

membelanjakan sebesar 3-4 juta rupiah, 0,4% membelanjakan sebesar 4-5 juta rupiah, dan 0,7% membelanjakan sebesar ≥ 5 juta rupiah.



Memperhatikan tentang data besaran pengeluaran belanja olahraga tersebut, maka dapat diestimasi seberapa besar ekonomi olahraga di Indonesia. Sebagai ilustrasi, mereka yang membelanjakan uangnya untuk kebutuhan olahraga dengan besaran <200 ribu rupiah sebanyak 44,1%. Jika angka 44,1% dikonversi ke dalam jumlah penduduk usia 10-60 tahun, maka angkanya

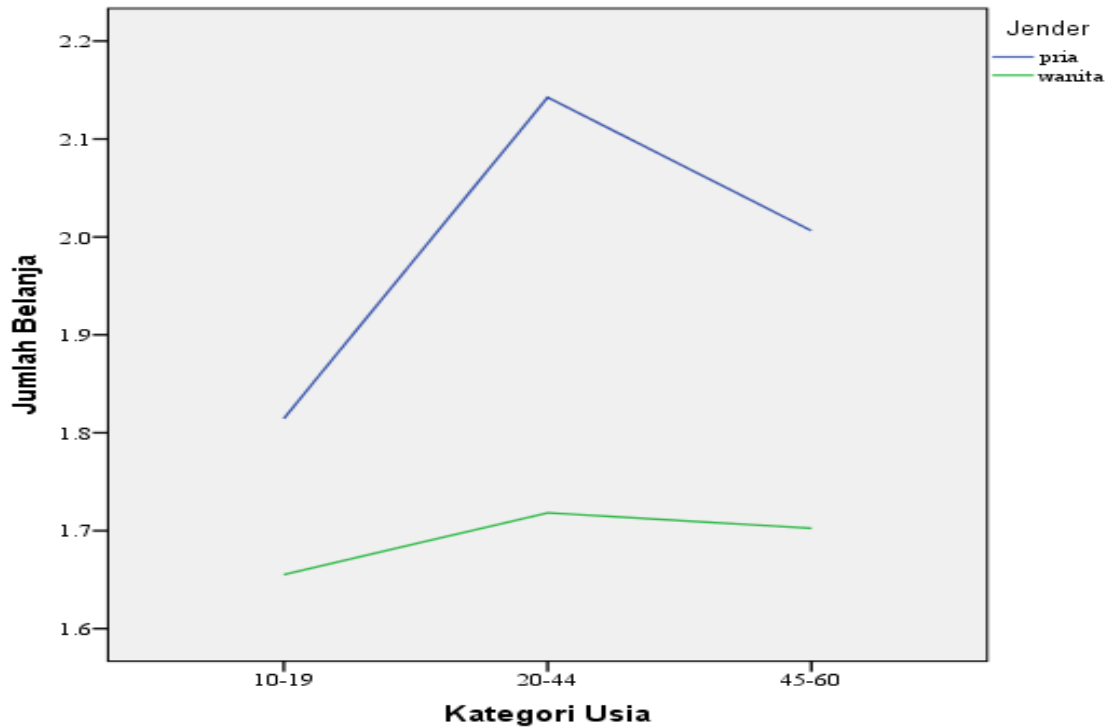
menjadi 48.757.207 orang yang diasumsikan sebagai konsumen. Jika angka tersebut dikalikan dengan besaran uang yang dibelanjakan, misalnya diambil mediannya (Rp 100 ribu), maka total uang belanja olahraga sebesar 4,8 trilyun, atau tepatnya Rp 4.875.720.720.721. Dengan cara yang sama, mereka yang berbelanja kebutuhan olahraga dengan besaran anggaran 200-500 ribu rupiah sebanyak 36,7%, maka total uang yang dibelanjakan sebesar 10,14 trilyun, atau tepatnya Rp10.143.931.431.431. Jika semua tingkatan belanja olahraga dihitung, maka total uang yang beredar untuk belanja kebutuhan olahraga sebesar 43,8 trilyun rupiah, atau tepatnya Rp43.848.318.318.318.

Tabel 8.2. Estimasi Ekonomi Olahraga di Indonesia

Besaran Belanja Olahraga	Persentase	Median Belanja	Jumlah Konsumen	Total Uang Belanja/Tahun
<200 ribu	44,1%	100.000	48.757.207	4.875.720.720.721
200-500 ribu	36,7%	250.000	40.575.726	10.143.931.431.431
0,5 sd 1 juta	11,9%	750.000	13.156.707	9.867.530.030.030
1-2 juta	4,0%	1.500.000	4.422.422	6.633.633.633.634
2-3 juta	1,5%	2.500.000	1.658.408	4.146.021.021.021
3-4 juta	0,6%	3.500.000	663.363	2.321.771.771.772
4-5 juta	0,4%	4.500.000	442.242	1.990.090.090.090
>5 juta	0,7%	5.000.000	773.924	3.869.619.619.620
			Jumlah	43.848.318.318.318

Jika pola belanja olahraga dilihat dari kategori usia, maka dapat dijelaskan bahwa belanja olahraga tinggi pada kelompok usia 20-44 tahun, kemudian diikuti kelompok usia 45-60 tahun, dan yang paling rendah adalah pada kelompok usia 10-19 tahun. Angka tersebut bisa dipahami karena pengeluaran seseorang sangat berkorelasi dengan daya beli yang dimiliki. Usia 20-44 tahun merupakan *peak performance* dari produktivitas dan pada saat yang sama tingkat kebutuhan juga ada pada tingkat tertinggi. Indonesia memiliki jumlah usia produktif yang sangat besar dan sekaligus tanpa terlalu terbebani oleh kelompok usia tidak produktif. Artinya, tercapainya performa perekonomian olahraga yang kuat, mendapatkan energi optimisme ditinjau dari aspek bonus demografi. Namun, bonus demografi juga dapat menjadi ancaman jika pengendalian dan kelayakan kehidupan penduduk tidak sebanding dengan beban kolektif secara sosial dan ekonomi.

Gambar 8.3. Pola Belanja Olahraga Berdasarkan Kategori Usia dan Jender



Dari aspek jenis kelamin, laki-laki lebih tinggi belanja olahraganya dibandingkan dengan perempuan. Hal ini sejalan dengan angka partisipasi dalam olahraga, yang secara persentase laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

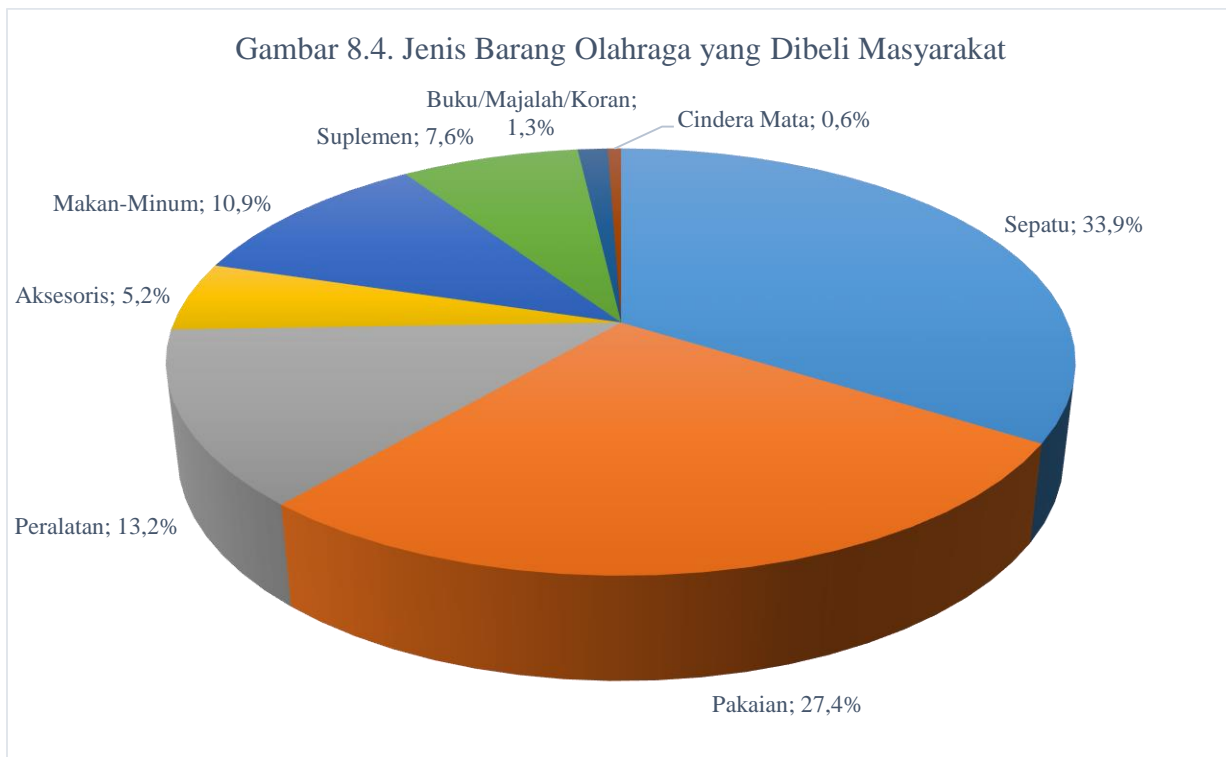
Industri Barang dan Jasa Olahraga

Industri olahraga tumbuh makin mempesona dan menjadi pusat perhatian publik semenjak Pemerintah mencanangkan tema keolahragaan pada puncak peringatan Hari Olahraga Nasional 2020. Haornas 2020 mengusung titik tumpu baru pembangunan olahraga yang mengintegrasikan tata kelola dan ekosistem baru. *Sport science*, *Sport tourism*, dan *Sport industry* menjadi ranah inti untuk ekosistem baru pembangunan olahraga nasional ke depan. Olahraga diarahkan ditata dengan tatacara modern yang ilmiah, berdaya saing, dan mensejahterakan untuk semua.

Sebenarnya di beberapa negara maju, pertumbuhan industri olahraga sudah lama berkembang sangat pesat. Namun tidak ada yang tahu persis sejak kapan mulai terjadinya kolaborasi antara industri dan olahraga. Pada sebagian besar khalayak dunia sebelumnya memiliki *mindset* yang kuat, bahwa olahraga itu tumbuhnya di ranah sosial, sementara industri itu tumbuh di ranah bisnis.

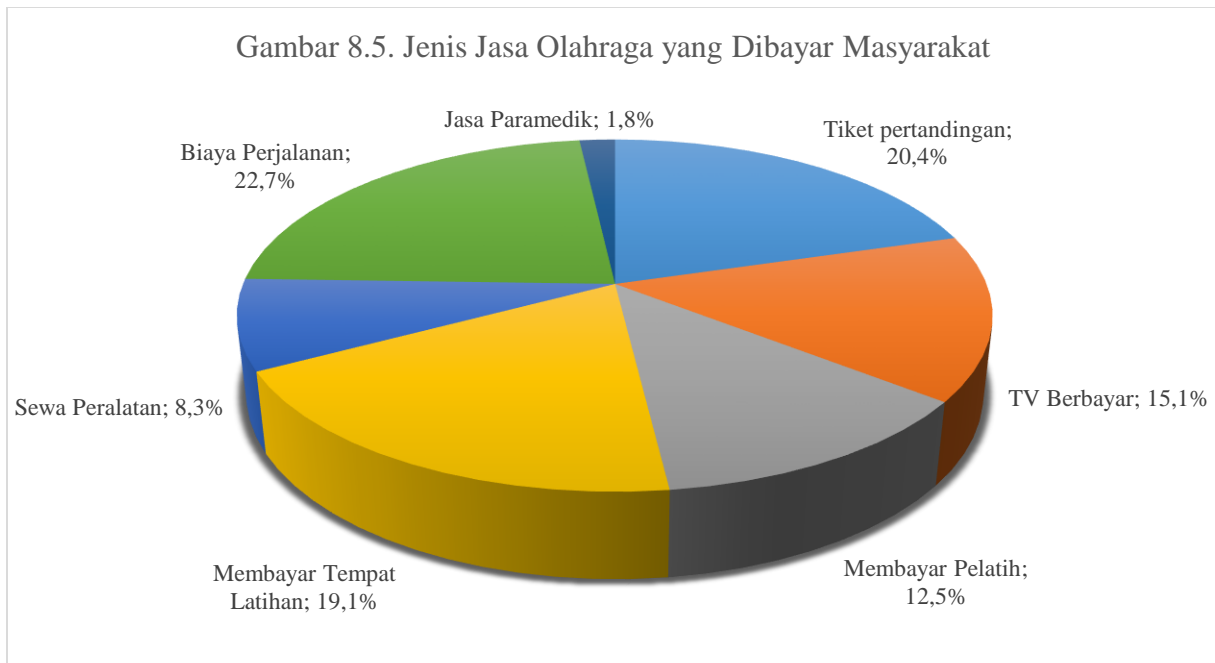
Terjadinya kolaborasi antara keduanya tentu saja menjadi hal yang cukup unik, yang pasti membutuhkan proses asimilasi yang tidak mudah.

Setiap negara di dunia ini memiliki cerita suksesnya masing-masing berkaitan dengan kelahiran embrio industri olahraga. Iklim globalisasi kemudian menyebabkan kemajuan industri olahraga cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia. Saling ketergantungan di antara segmen dan sektor perekonomian, industri dan perdagangan menyebabkan *mindset* publik dunia bergeser. Olahraga tidak bisa steril dari pengaruh performa bisnis. Volume produksi barang dan jasa olahraga meningkat dan terjadi interkorelasional dengan animo dan angka partisipasi masyarakat dunia dalam berolahraga. Parameter utama kemajuan kultur olahraga adalah meningkatnya angka partisipasi. Dampak global akan terasa terutama untuk menekan dan mengeliminasi berbagai penyakit degeneratif akibat gaya hidup yang keliru.

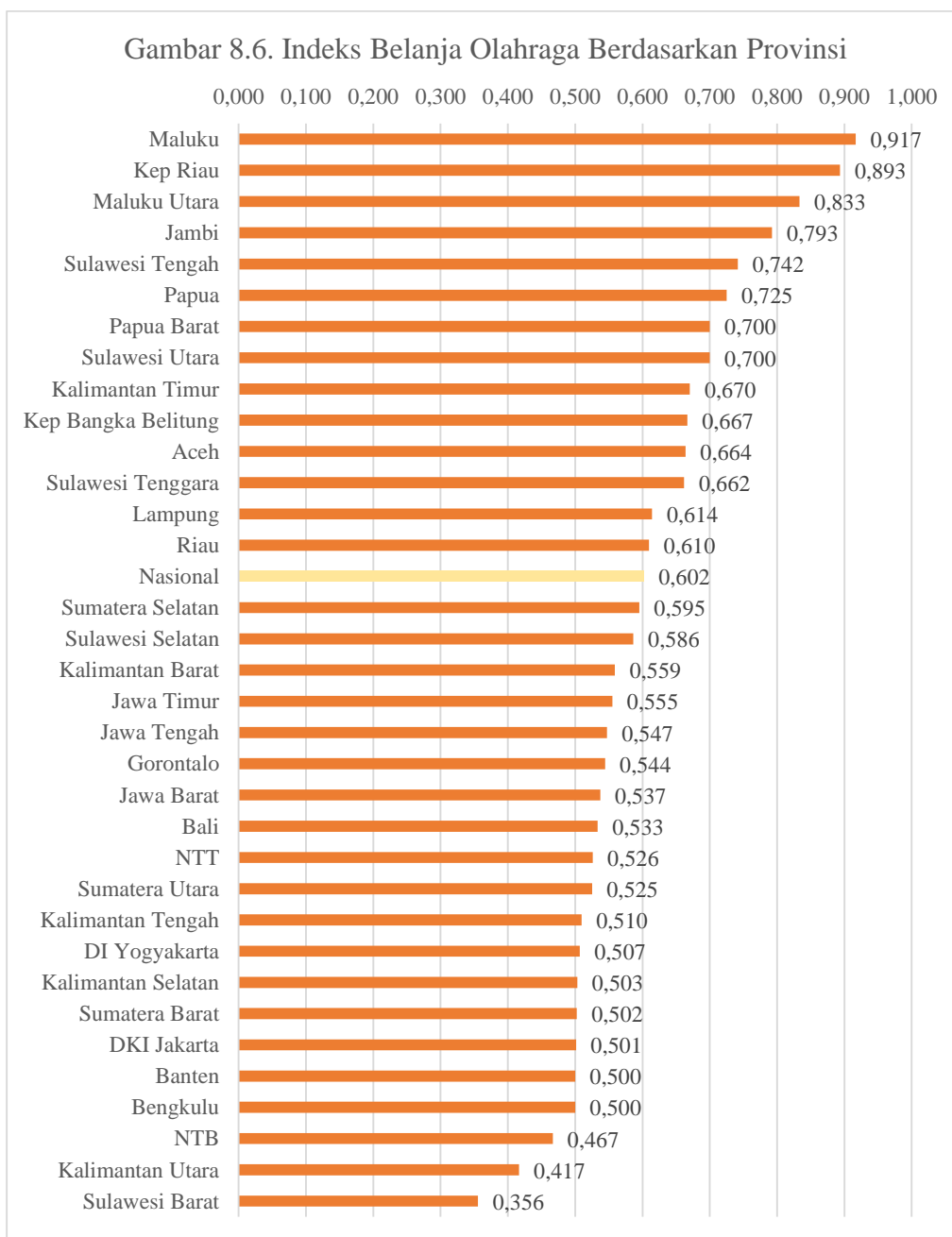


Modus belanja barang olahraga masyarakat Indonesia tertuju pada sepatu sebesar 33,9%, belanja pakaian olahraga sebesar 27,4%, dan belanja peralatan olahraga sebesar 13,2%. Ketiga barang olahraga tersebut menjadi sesuatu yang primer dalam belanja barang olahraga. Tentu terdapat berbagai penjelasan yang sangat menarik jika ditindak lanjuti dengan survei yang lebih

mendalam. Di balik pilihan mereka terhadap jenis barang dominan yang dibeli, pasti ada sebuah peta nasional *need assesment* akan kebutuhan *existing* masyarakat tentang barang olahraga. Peta tersebut menjadi sangat penting bagi kalangan produsen barang olahraga untuk memproduksi jenis barang yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat atau apa yang dianggap bernilai oleh masyarakat. Termasuk juga memahami secara lebih mendasar tentang keterbatasan akses dan daya beli masyarakat.



Sementara itu, untuk belanja jasa olahraga, prioritas pertama adalah biaya perjalanan yang mencapai 22,7%, baru kemudian diikuti belanja tiket pertandingan sebesar 20,4%, dan membayar tempat latihan sebesar 19,1%. Dalam kondisi pandemi Covid-19, di mana pergerakan orang dibatasi, biaya perjalanan sebesar 22,7% termasuk angka yang cukup besar. Terdapat dua kemungkinan, yakni tempat berolahraga yang dilakukan cukup jauh dari tempat tinggal, atau mereka tetap menempuh perjalanan karena melakukan olahraga sangat penting bagi dirinya. Membeli tiket pertandingan, membayar tempat latihan, langganan TV olahraga berbayar, dan membayar pelatih yang dilakukan pada masa Pandemi Covid-19 semakin memperkuat bahwa olahraga memiliki sisi utilitas yang tinggi di masyarakat. Olahraga telah menjadi kebutuhan penting dan prioritas.



Laporan ini menyatakan bahwa secara nasional, indeks ekonomi yang tercermin dalam belanja olahraga sebesar 0,602, masuk pada kategori menengah. Terdapat tiga Provinsi yang memiliki indeks ekonomi tertinggi, yakni Maluku, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara. Sementara itu, Provinsi dengan indeks ekonomi terendah adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Indeks yang tinggi dalam ekonomi mencerminkan belanja barang dan jasa

olahraga masyarakat memiliki “energi kinetik” yang besar. Belanja barang dan jasa olahraga digerakkan oleh nilai utilitas olahraga dalam pandangan mereka. Masyarakat memberikan persepsi, apresiasi, dan ekspektasi yang tinggi terhadap nilai kemanfaatan olahraga. Mereka mewujudkannya dengan cara belanja barang dan jasa olahraga karena olahraga memiliki nilai bagi mereka.

Kesimpulan

1. Ada korelasi yang sangat kuat antara tingkat partisipasi dengan ekonomi olahraga. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam berolahraga, maka semakin tinggi pula belanja olahraga yang dapat dikapitalisasi.
2. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat 56% atau sekitar 110,45 juta orang yang membelanjakan uangnya untuk kebutuhan olahraga dalam bentuk belanja barang, seperti pembelian sepatu dan pakaian, serta untuk belanja jasa olahraga seperti TV berbayar dan membayar pelatih.
3. Besaran uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan olahraga, baik untuk belanja barang dan jasa, berkisar antara <Rp200 ribu hingga >Rp5 juta rupiah per orang per tahun. Jika angka tersebut dihitung secara agregat, maka diperkirakan uang yang beredar secara nasional untuk belanja olahraga mencapai Rp 43,8 trilyun per tahun.
4. Dilihat dari kategori usia, belanja kebutuhan olahraga tertinggi ada pada kelompok usia 20-44 tahun, kemudian diikuti kelompok usia 45-60 tahun, dan yang paling rendah adalah pada kelompok usia 10-19 tahun.
5. Belanja barang olahraga sebagian besar atau 33,9% berupa sepatu olahraga, baru diikuti belanja pakaian olahraga sebesar 27,4%, dan belanja peralatan olahraga sebesar 13,2%. Sementara itu, untuk belanja jasa olahraga, prioritas pertama adalah biaya perjalanan yang mencapai 22,7%, baru kemudian diikuti belanja tiket pertandingan sebesar 20,4%, dan membayar tempat latihan sebesar 19,1%.

Bab 9 Indeks SDI Nasional dan Rekomendasi Kebijakan

Indeks SDI Nasional

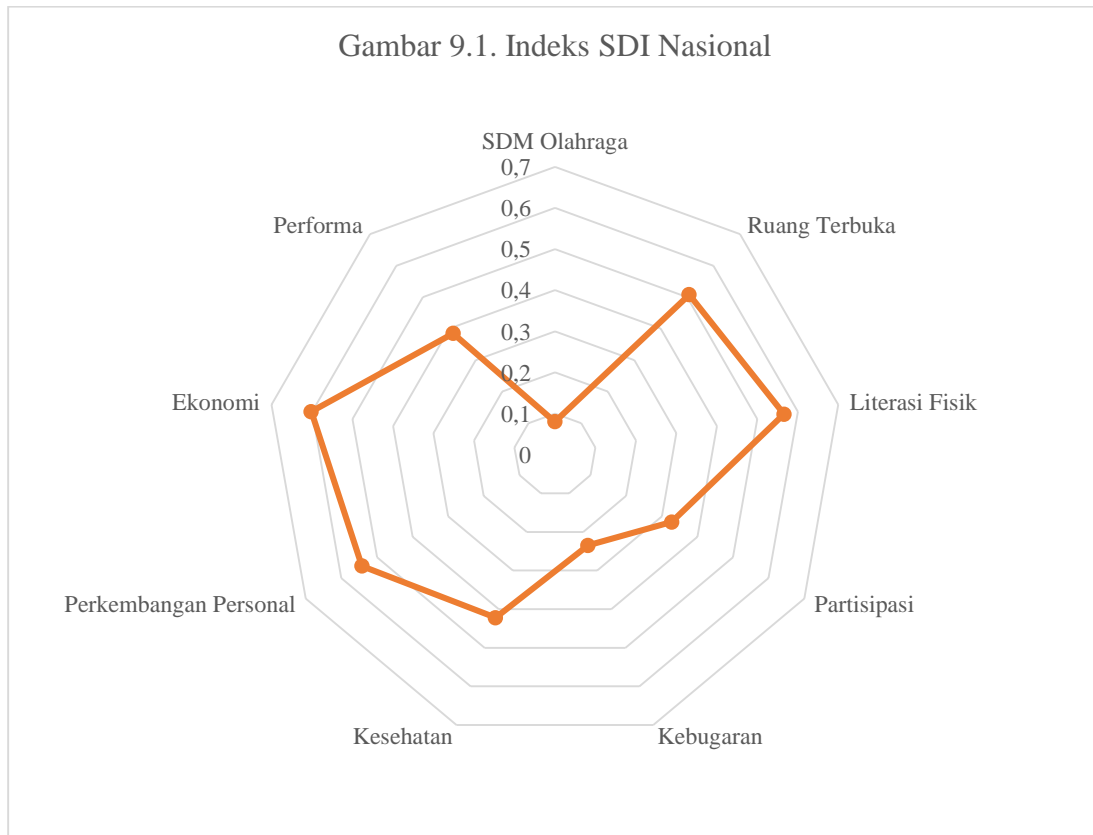
Laporan ini telah memaparkan sejumlah data dan analisis dari kesembilan dimensi SDI, termasuk posisi masing-masing Provinsi dalam setiap dimensi tersebut. Pertanyaannya kemudian, bagaimanakah dengan SDI nasional? Dari analisis data didapatkan bahwa indeks SDI 2021 sebesar 0,408. Angka tersebut masuk kategori rendah dalam skala 0-1. Sebagaimana skala pengukuran yang sudah ditetapkan dalam metodologi, yang pada dasarnya mengacu pada model penskalaan HDI, angka 0-0,499 masuk kategori rendah, 0,500-0,799 masuk kategori menengah, dan 0,800-1 masuk kategori tinggi. Ibarat orang yang ingin menempuh suatu perjalanan mencapai tujuan, maka capaian pembangunan olahraga di Indonesia, dengan indeks 0,408, belum sampai pada separuh perjalanan. Masih diperlukan kerja keras, kerja cerdas, dan strategi terarah untuk mencapai tujuan pembangunan keolahragaan.

Pertanyaannya kemudian, pada dimensi apa capaian pembangunan olahraga sudah dapat dianggap relatif baik dan pada dimensi mana masih jauh dari harapan. Ada tiga dimensi yang memiliki indeks tertinggi dalam SDI 2021, yaitu dimensi ekonomi dengan indeks 0,602, literasi fisik dengan indeks 0,566, dan perkembangan personal dengan indeks 0,542. Angka tersebut masuk kategori menengah meski pada batas bawah. Sementara itu, tiga dimensi yang memiliki indeks terendah adalah dimensi SDM dengan indeks sebesar 0,080, kebugaran dengan indeks 0,235, dan partisipasi dengan indeks 0,328.

Terkait dengan indeks SDI 2021 tersebut, ada beberapa hal menarik yang perlu mendapatkan perhatian dan karena itu perlu dielaborasi lebih dalam. Pertama, terkait dengan dimensi ekonomi yang indeksnya sebesar 0,602. Angka tersebut pada dasarnya diperoleh dari seberapa banyak responden yang membelanjakan uang untuk membeli barang kebutuhan olahraga dan/atau menonton pertandingan/kejuaraan olahraga. Artinya, ada 60,2% masyarakat yang mengeluarkan uang untuk kebutuhan berolahraga, baik untuk kepentingan membeli barang seperti sepatu dan pakaian, maupun membayar jasa yang terkait dengan olahraga seperti membeli tiket menonton pertandingan, iuran TV berbayar, dan membayar jasa pelatih.

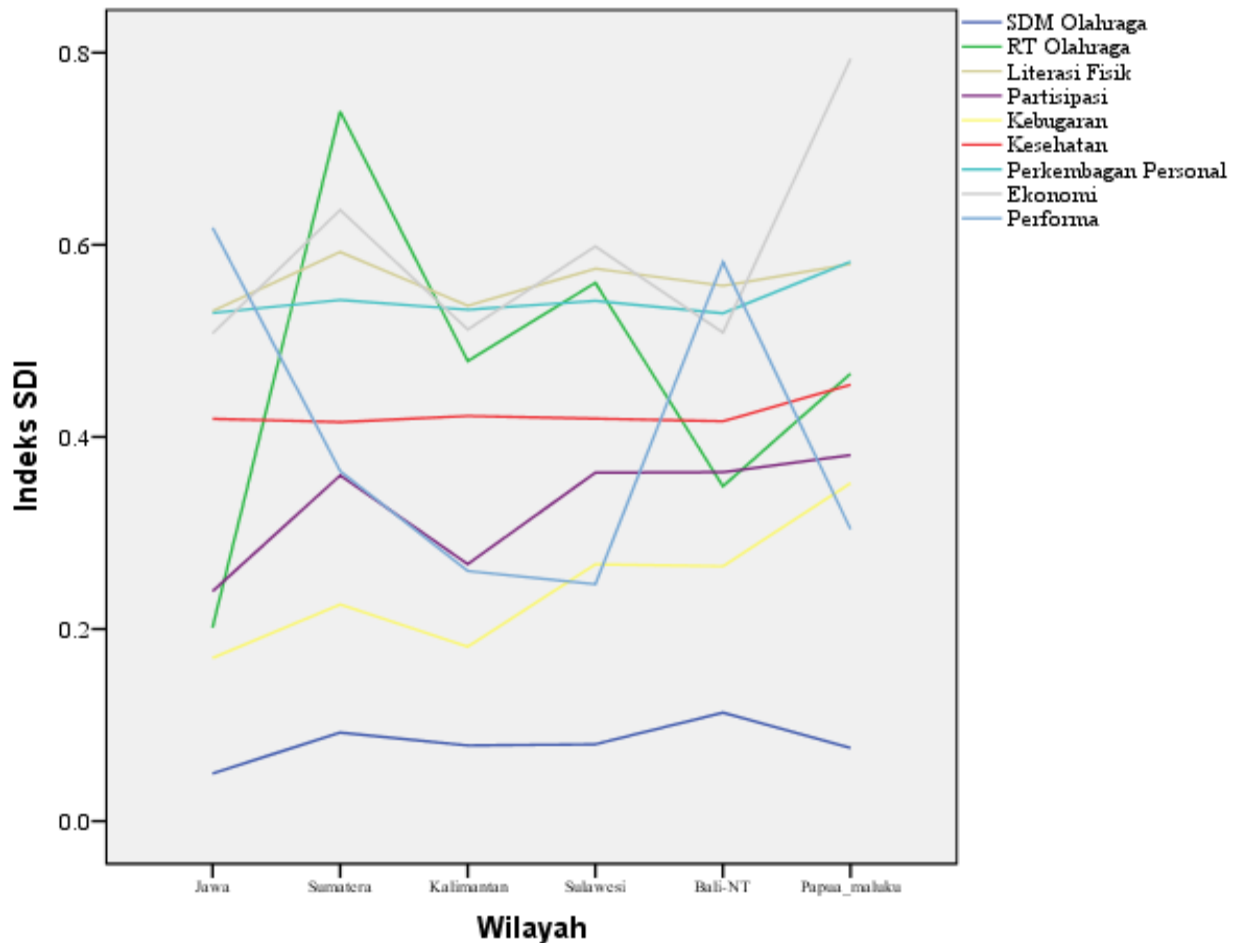
Angka tersebut menjadi sangat besar jika dinterpolasi dengan jumlah penduduk yang menjadi sasaran. Seperti sudah dijelaskan pada bagian metodologi bahwa target SDI 2021 adalah penduduk usia 10-60 tahun. Mengacu pada BPS, jumlah penduduk pada kategori usia tersebut sekitar 73%

dari total penduduk Indonesia yang besarnya 270,20 juta jiwa (BPS, 2021). Dengan demikian, populasi pengumpulan data SDI 2021 sebesar 197,246 juta jiwa dan 60,2% dari jumlah penduduk tersebut adalah 118,35 juta orang. Artinya, potensi ekonomi olahraga Indonesia sangat besar. Pasar barang dan jasa olahraga dapat menyasar 118 juta orang.



Bagaimana indeks SDI dikaitkan dengan perbandingan antar wilayah di Indonesia, terutama Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-NT, dan Papua-Maluku? Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak ada wilayah yang dominan pada semua dimensi. Ada wilayah yang unggul pada satu atau beberapa dimensi, tetapi rendah pada dimensi yang lain. Propinsi di Jawa, misalnya, mereka unggul dalam dimensi performa karena menguasai 55% medali dalam PON. Tetapi mereka rendah pada dimensi ruang terbuka olahraga dan tingkat kebugaran. Provinsi di wilayah Sumatera unggul dalam dimensi ruang terbuka olahraga dan literasi fisik, tetapi rendah pada dimensi performa dan kesehatan. Demikian juga Provinsi di Papua-Maluku, mereka unggul pada dimensi partisipasi, ekonomi, dan perkembangan personal, tetapi rendah pada dimensi performa.

Gambar 9.2. Peta Indeks SDI Berdasarkan Wilayah



Meskipun setiap wilayah memiliki keunggulan pada dimensi tertentu dan pada saat yang sama juga memiliki kelemahan pada dimensi yang lain, fenomena tersebut dapat diberikan penjelasan secara logis dan didukung oleh fakta empirik. Provinsi di Jawa, misalnya, mereka sangat unggul dalam performa olahraga yang diukur dengan perolehan medali karena berdasarkan analisis statistik, perolehan medali sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi berupa ketersediaan anggaran dan jumlah penduduk. Menurut catatan BPS, aktivitas ekonomi di Jawa berkontribusi sebesar 58,5% dari total PDB. Selain itu, jumlah penduduk di Jawa adalah 60% dari penduduk Indonesia. Sementara itu, provinsi di wilayah Papua dan Maluku, mereka memiliki keunggulan dalam perkembangan personal yang mencakup resilien dan modal sosial. Hal ini sejalan dengan temuan BPS yang menyatakan bahwa Maluku Utara memiliki indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia (BPS-Statistics Indonesia, 2017).

Rekomendasi Kebijakan

1. Dari sembilan dimensi yang ada, indeks SDM dan kebugaran menempati urutan yang paling bawah dan masuk kategori rendah. Karena itu, dalam konteks pembangunan olahraga ke depan, pengembangan SDM dari sisi kuantitas dan kualitas menjadi keniscayaan. Selain itu, upaya menggerakkan masyarakat melalui olahraga dan aktivitas fisik guna meningkatkan kebugaran juga menjadi sesuatu yang urgen dan mendesak.
2. Laporan ini banyak menyajikan data keolahragaan dalam lingkup nasional yang mencakup 34 Provinsi, terutama yang menyangkut sembilan dimensi SDI. Data tersebut hendaknya digunakan sebagai dasar dalam menyusun program intervensi sesuai kebutuhan, urgensi, dan relevansinya. Dengan begitu, perbaikan dapat dilakukan karena memiliki *baseline* yang terukur.
3. Laporan ini telah dapat membuktikan bahwa olahraga berdampak positif bagi kebugaran, kesehatan fisik, kesejahteraan psikis, resiliensi, dan modal sosial, yang merupakan bagian penting dari *human capital* melalui metode *cross-sectional*. Bukti empirik tersebut perlu diperkuat dengan rekayasa masyarakat dalam bentuk *community development* melalui eksperimen lapangan, dengan memasukkan aspek ekonomi sebagai variabel dampak.
4. Sebagai suatu ukuran keberhasilan pembangunan dengan sembilan dimensi, SDI 2021 merupakan pertama kali dilakukan. Dalam kondisi pandemi Covid-19, di mana pergerakan masyarakat dibatasi, termasuk penggunaan protokol kesehatan secara ketat, maka proses bimbingan teknis dan pengumpulan data banyak menghadapi kendala yang patut diduga mempengaruhi efektivitas dan akurasi data. Karena itu, pengkajian SDI perlu dilakukan lagi di tahun 2022 guna lebih menyempurnakan implementasinya.
5. Meskipun laporan SDI 2021 disusun oleh Kemenpora, tetapi kebermanfaatannya tidak hanya terbatas pada kebutuhan internal Kemenpora, melainkan juga untuk kepentingan Kementerian/Lembaga lain seperti Bappenas, Kemenkes, Kemendikbud, dan Kemendagri. Karena itu, diseminasi perlu dilakukan kepada mereka agar terjadi kesepahaman, sinergi, dan harmoni dalam merumuskan dan melaksanakan program-program keolahragaan dalam satu ayunan kebijakan.

Referensi

- Allen, J. T., Drane, D. D., Byon, K. K., & Mohn, R. S. (2010). Sport as a vehicle for socialization and maintenance of cultural identity: International students attending American universities. *Sport Management Review*, 13(4), 421–434. <https://doi.org/10.1016/J.SMR.2010.01.004>
- American College of Sports Medicine. (2009). American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. *Medicine and Science in Sports and Exercise*. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181915670>
- Anand, S., & Sen, A. K. (1994). Human development Index: Methodology and Measurement. *Human Development Report Office*. <https://doi.org/RePEc>
- Australasian Sport Information Network. (2021). Volunteers in Sport. Retrieved November 25, 2021, from <https://www.clearinghouseforsport.gov.au/kb/volunteers-in-sport>
- Australian Government. (2010). *Australian sport: The pathway to success [Publications Approval Number 6510]*. Commonwealth of Australia. Retrieved from <http://www.ag.gov.au/cca>
- Ayers, S. F., & Sariscsany, M. J. (2011). *Physical education for lifelong fitness* (3rd ed.). Human Kinetics.
- Bailey, R., Cope, E., Parnell, D., & Reeves, M. J. (2016). The human capital model: Realising the benefits of sport and physical activity. *Sport, Education and Social Policy: The State of the Social Sciences of Sport*, (January), 135–159. <https://doi.org/10.4324/9781315404868>
- Bailey, R., Hillman, C., Arent, S., & Petitpas, A. (2012). Physical activity as an investment in personal and social change: The human capital model. *Journal of Physical Activity and Health*, 9(8), 1053–1055. <https://doi.org/10.1123/jpah.9.8.1053>
- Balkin, J. M. (2017). Digital speech and democratic culture: A theory of freedom of expression for the information society. In *Popular Culture and Law*. <https://doi.org/10.4324/9781351154161-9>
- Bappenas. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024*. Kementerian PPN/ Bappenas. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Bergsgard, N. A., Houlihan, B., Mangset, P., Nørdland, S. I., & Rommetvedt, H. (2007). *Sport policy: A comparative analysis of stability and change*. *Sport Policy: A Comparative Analysis of Stability and Change*. <https://doi.org/10.4324/9780080498218>
- Bidzan-Bluma, I., & Lipowska, M. (2018). Physical activity and cognitive functioning of children: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph15040800>
- Billinger, S. A., Boyne, P., Coughenour, E., Dunning, K., & Mattlage, A. (2014). Does Aerobic Exercise and the FITT Principle Fit into Stroke Recovery? *Current Neurology and Neuroscience Reports*. <https://doi.org/10.1007/s11910-014-0519-8>
- Booth, F. W., Roberts, C. K., & Laye, M. J. (2012). Lack of exercise is a major cause of chronic diseases. *Comprehensive Physiology*, 2(2), 1143–1211. <https://doi.org/10.1002/cphy.c110025>
- BPS-Statistics Indonesia. (2017). Indeks Kebahagiaan 2017. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/34/601/1/indeks-kebahagiaan-menurut-provinsi.html>
- BPS-Statistics Indonesia. (2018). *Keadaan Ketenagakerjaan di Indonesia 2018 [The State of Employment in Indonesia 2018]*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- BPS. (2021). *Hasil sensus penduduk Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved

from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>

- Cairney, J., Kiez, T., Paul Roetert, E., & Kriellaars, D. (2019). A 20th-century narrative on the origins of the physical literacy construct. *Journal of Teaching in Physical Education*, 38(2). <https://doi.org/10.1123/jtpe.2018-0072>
- Chan, G., Huo, Y., Kelly, S., Leung, J., & Tisdale, C. (2022). The impact of eSports and online video gaming on lifestyle behaviours in youth: A systematic review. *Computers in Human Behavior*, 126, 106974. <https://doi.org/10.1016/J.CHB.2021.106974>
- Coakley, J. (2017). Sociology of sport. In *The Cambridge Handbook of Sociology*. <https://doi.org/10.1017/9781316418376.036>
- Coalter, F. (2010). Sport-for-development: Going beyond the boundary? *Sport in Society*. <https://doi.org/10.1080/17430437.2010.510675>
- Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new Resilience scale: The Connor-Davidson Resilience scale (CD-RISC). *Depression and Anxiety*. <https://doi.org/10.1002/da.10113>
- Corbin, C. B. (2016). Implications of Physical Literacy for Research and Practice: A Commentary. *Research Quarterly for Exercise and Sport*. <https://doi.org/10.1080/02701367.2016.1124722>
- Côté, J., & Hancock, D. J. (2016). Evidence-based policies for youth sport programmes. *International Journal of Sport Policy*. <https://doi.org/10.1080/19406940.2014.919338>
- Coulter, T. J., Mallett, C. J., Singer, J. A., & Gucciardi, D. F. (2016). Personality in sport and exercise psychology: Integrating a whole person perspective. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*. <https://doi.org/10.1080/1612197X.2015.1016085>
- Crespo, R. M., Najjar, J., Derntl, M., Leony, D., Neumann, S., Oberhuemer, P., ... Delgado Kloos, C. (2010). Aligning assessment with learning outcomes in outcome-based education. In *2010 IEEE Education Engineering Conference, EDUCON 2010*. <https://doi.org/10.1109/EDUCON.2010.5492385>
- De Bosscher, V., De Knop, P., van Bottenburg, M., Shibli, S., & Bingham, J. (2009). Explaining international sporting success: An international comparison of elite sport systems and policies in six countries. *Sport Management Review*. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2009.01.001>
- De Bosscher, V., Heyndels, B., De Knop, P., Van Bottenburg, M., & Shibli, S. (2008). The paradox of measuring success of nations in elite sport. *BELGEO*. <https://doi.org/10.4000/belgeo.10303>
- De Bosscher, V., Shibli, S., Westerbeek, H., & Van Bottenburg, M. (2015). Successful elite sport policies. An International comparison of Elite Sport Policies in 15 Nations (SPLISS 2.0). *SPLISS*.
- de Lira, C. A. B., Taveira, H. V., Rufo-Tavares, W., Amorim, A. dos S., Ferreira, L. M. C., Andrade, M. S., & Vancini, R. L. (2018). Engagement in a Community Physical Activity Program and Its Effects Upon the Health-Related Quality of Life of Elderly People: A Cross-Sectional Study. *Value in Health Regional Issues*, 17, 183–188. <https://doi.org/10.1016/J.VHRI.2018.10.002>
- Degenne, A. (2004). Social capital: a theory of social structure and action. *Tempo Social*. <https://doi.org/10.1590/s0103-20702004000200014>
- Downward, P., Dawson, A., & Dejonghe, T. (2009). *Sports economics: Theory, evidence and policy*. *Sports Economics: Theory, Evidence and Policy*.

- <https://doi.org/10.4324/9780080942087>
- DPR RI. (2020). *Naskah akademik RUU perubahan atas UU No. 3 Tahun 2005 Tentang SKN*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Driggin, E., Madhavan, M. V., Bikdeli, B., Chuich, T., Laracy, J., Biondi-Zoccai, G., ... Parikh, S. A. (2020). Cardiovascular Considerations for Patients, Health Care Workers, and Health Systems During the COVID-19 Pandemic. *Journal of the American College of Cardiology*, 75(18), 2352–2371. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.03.031>
- Durden-Myers, E. J., Green, N. R., & Whitehead, M. E. (2018). Implications for promoting physical literacy. *Journal of Teaching in Physical Education*, 37(3). <https://doi.org/10.1123/jtpe.2018-0131>
- Eime, R. M., Harvey, J., Charity, M. J., Casey, M., Westerbeek, H., & Payne, W. R. (2017). The relationship of sport participation to provision of sports facilities and socioeconomic status: a geographical analysis. *Australian and New Zealand Journal of Public Health*. <https://doi.org/10.1111/1753-6405.12647>
- Erickson, K. I., Hillman, C. H., & Kramer, A. F. (2015). Physical activity, brain, and cognition. *Current Opinion in Behavioral Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2015.01.005>
- Erickson, K. I., Hillman, C., Stillman, C. M., Ballard, R. M., Bloodgood, B., Conroy, D. E., ... Powell, K. E. (2019). Physical Activity, Cognition, and Brain Outcomes: A Review of the 2018 Physical Activity Guidelines. *Medicine and Science in Sports and Exercise*. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001936>
- Fenwick, a. (2005). *Sport for development and peace: Achieving the Millennium Development Goals. Report from the United Nations Inter-Agency task Force on Sport for Development and Peace. The Lancet*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)71134-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)71134-X)
- Fernández-Abascal, E. G., & Martín-Díaz, M. D. (2021). Longitudinal study on affect, psychological well-being, depression, mental and physical health, prior to and during the COVID-19 pandemic in Spain. *Personality and Individual Differences*, 172(September 2020). <https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110591>
- Forrest, R., & Kearns, A. (2001). Social cohesion, social capital and the neighbourhood. *Urban Studies*. <https://doi.org/10.1080/00420980120087081>
- Fuchs, R. (2015). Physical Activity and Health. In J. Wright (Ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (2nd ed.). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.14115-7>
- Gigliotti, M., Schmidt-Traub, G., & Bastianoni, S. (2018). The sustainable development goals. In B. Fath (Ed.), *Encyclopedia of Ecology* (2nd ed.). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.10986-8>
- Giulianotti, R. (2012). The Sport for Development and Peace Sector: An Analysis of its Emergence, Key Institutions, and Social Possibilities. *Brown Journal of World Affairs*.
- González-Muniesa, P., Martínez-González, M. A., Hu, F. B., Després, J. P., Matsuzawa, Y., Loos, R. J. F., ... Martinez, J. A. (2017). Obesity. *Nature Reviews Disease Primers*, 3. <https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.34>
- Gratton, C., & Taylor, P. (2000). *Economics of sport and recreation*. London: Routledge.
- Ha, J.-P., Lee, K., & Ok, G. (2015). From development of sport to development through sport: A paradigm shift for sport development in South Korea. *The International Journal of the History of Sport*, 32(10), 1–17. <https://doi.org/10.1080/09523367.2015.1062756>
- Hallmann, Kirstin and Petry, K. (2013). *Comparative sport development: Systems, participation and public policy*. London: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8905-4>

- Handayani, D., Hadi, D. R., Isbaniah, F., Burhan, E., & Agustin, H. (2020). Corona virus disease 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia*, 40(2), 119–129. Retrieved from <https://jurnalrespirologi.org/index.php/jri/article/view/101>
- Heinemann, K. (2003). *Sport and welfare policies: Six European Case studies*. Verlag Kalrl Hofmann.
- Houlihan, B. (1997). Sport, national identity and public policy. *Nations and Nationalism*. <https://doi.org/10.1111/j.1354-5078.1997.00113.x>
- Houlihan, B., & Green, M. (2008). *Comparative elite sport development: Systems, structures and public policy*. Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.4324/9780080554426>
- Hoye, R., Parent, M. M., Darnell, S. C., & Marchesseault, D. (2016). Sport for Development and Peace. In *The SAGE Handbook of Sport Management*. <https://doi.org/10.4135/9781473957961.n14>
- Huang, C. J., Webb, H. E., Zourdos, M. C., & Acevedo, E. O. (2013). Cardiovascular reactivity, stress, and physical activity. *Frontiers in Physiology*, 4(314). <https://doi.org/10.3389/fphys.2013.00314>
- Huang, L. (2011). Research on effect of beijing post-olympic sports industry to China's economic development. *Energy Procedia*, 5, 2097–2102. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.03.362>
- Hughes, D., Saw, R., Perera, N. K. P., Mooney, M., Wallett, A., Cooke, J., ... Broderick, C. (2020). The Australian Institute of Sport framework for rebooting sport in a COVID-19 environment. *Journal of Science and Medicine in Sport*. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2020.05.004>
- Hylton, K., Bramham, P., Jackson, D., & Nesti, M. (2007). *Sport development: Policy, process, and practice* (Revision). New York: Routledge.
- IOC. (2017). *The Olympic Charter. In force as from 15 september 2017*.
- Joeseof, D. (2014). *Studi strategi: Logika ketahanan dan pembangunan nasional*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Kahneman, D., & Deaton, A. (2010). High income improves evaluation of life but not emotional well-being. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. <https://doi.org/10.1073/pnas.1011492107>
- Kasser, S. L., & Zia, A. (2020). The Mediating Role of Resilience on Quality of Life in Individuals with Multiple Sclerosis: A Structural Equation Modeling Approach. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 101(7), 1152–1161. <https://doi.org/10.1016/J.APMR.2020.02.010>
- Keating, X., Castro-Pinero, J., Centeio, E., Harrison, L. J., Ramirez, T., & Chen, L. (2010). Health-Related Fitness Knowledge and Its Relation to Student Physical Activity Patterns at a Large U.S. Southern State University. *ICHPER-SD Journal of Research*, 5(2), 3–9.
- Kemendes. (2018). *Riset kesehatan dasar*. Agency of Health Research and Development. Retrieved from <https://www.litbang.kemkes.go.id/laporan-riset-kesehatan-dasar-risikesdas/>
- Kristiyanto, A. (2009). *Penguatan kebijakan publik sektor mikro industri olahraga untuk program pengentasan kemiskinan - Laporan Penelitian*. UNS Surakarta.
- Léger, L. A., Mercier, D., Gadoury, C., & Lambert, J. (1988). The multistage 20 metre shuttle run test for aerobic fitness. *Journal of Sports Sciences*. <https://doi.org/10.1080/02640418808729800>
- Lutan, R. (1988). *Belajar keterampilan motorik: Pengantar teori dan metode*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Luthans, F., Luthans, K. W., & Luthans, B. C. (2004). Positive psychological capital: Beyond human and social capital. *Business Horizons*. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2003.11.007>
- Lynch, T. (2016). United nations sustainable development goals: Promoting health and well-being through physical education partnerships. *Cogent Education*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1188469>
- Maksum, A. (2020a). Patterns of physical activity and its implication on health risk and life satisfaction: An evidence from adults in Indonesia [Paper presentation]. The 2020 Yokohama Sport Conference. Yokohama, Japan.
- Maksum, A. (2020b). *Patterns of sports participation by age, gender, and jobs: A case of Indonesia (Research Report)*. State University of Surabaya.
- Maksum, A., & Indahwati, N. (2020). *Physical Activity and Quality of Life: A Structural Equation Modeling Analysis of Its Relations and Affecting Factors - Research Report*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Maksum, A., & Indahwati, N. (2021). Patterns of physical activity and its impact on health risk and life satisfaction: An evidence from adults in Indonesia. *International Journal of Human Movement and Sports Sciences*, 9(6), 1087–1096. <https://doi.org/10.13189/saj.2021.090602>
- Maksum, A., Mahardika, I. M. S., & Indahwati, N. (2004). *Dampak olahraga terhadap peningkatan kualitas hidup (Laporan Penelitian)*. Jakarta.
- McInnes, R. J. (2018). Sustainable development goals. In C Max Finlayson (Ed.), *The Wetland Book: I: Structure and Function, Management, and Methods*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9659-3_125
- Medicine, A. C. of S. (2016). ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. *Lippincott Williams & Wilkins*.
- Meisenberg, G., & Woodley, M. A. (2015). Gender Differences in Subjective Well-Being and Their Relationships with Gender Equality. *Journal of Happiness Studies*. <https://doi.org/10.1007/s10902-014-9577-5>
- Miletzki, J., & Broten, N. (2017). *Development as freedom. Development as Freedom*. <https://doi.org/10.4324/9781912281275>
- Miragaya, A. (2017). Lifelong Physical Activity for All Starting in Childhood through Inclusive Programmes of Physical Education and Sporting Activities - The Values-based Case of Brazil. *ICSSPE Bulletin (17285909)*.
- Morgan, W. J., & Meier, K. V. (1995). *Philosophic inquiry in sport* (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. <https://doi.org/10.1080/00948705.1987.9714454>
- Morse, S., & Morse, S. (2019). Human Development Index. In *The Rise and Rise of Indicators*. <https://doi.org/10.4324/9781315226675-3>
- Mutohir, T.C., Lutan, R., Maksum, A., Kristiyanto, A., & Akbar, R. (2020a). *Laporan uji coba instrumen Sport Development Index*.
- Mutohir, T.C., Lutan, R., Maksum, A., Kristiyanto, A., & Akbar, R. (2020b). *Review dan arah pengembangan Sport Development Index: Pendekatan interdisiplin*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
- Mutohir, T.C., & Maksum, A. (2007). *Sport Develoment Index: Concept, methodology, and application*. Bessindo Primalaras.
- Mutohir, Toho Cholik, & Lutan, R. (2020). *Naskah akademik perubahan UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
- Ng, M., Fleming, T., Robinson, M., Thomson, B., Graetz, N., Margono, C., ... Gakidou, E.

- (2014). Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980-2013: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *The Lancet*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60460-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60460-8)
- Noviani, A. (2015, February 27). Menkes: 65% penduduk sakit, klaim BPJS membengkak [Minister of Health: 65% of the population is sick, National Health Insurance claims have increased]. *Financial.Bisnis.Com*, p. 1. Retrieved from <https://finansial.bisnis.com/read/20150227/215/407320>
- O’Riordan, C., Clifford, A., Van De Ven, P., & Nelson, J. (2014). Chronic neck pain and exercise interventions: Frequency, intensity, time, and type principle. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2013.11.015>
- Oliveria, S. A., Kohl, H. W., Trichopoulos, D., & Blair, S. N. (1996). The association between cardiorespiratory fitness and prostate cancer. *Medicine and Science in Sports and Exercise*. <https://doi.org/10.1097/00005768-199601000-00020>
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2007). *Human development* (10th ed.). McGraw-Hill.
- Pharr, J. R., & Lough, N. L. (2016). Examining the relationship between sport and health among USA women: An analysis of the Behavioral Risk Factor Surveillance System. *Journal of Sport and Health Science*, 5(4), 403–409. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2016.07.005>
- Philp, M., & Posada-Carbó, E. (2018). Liberalism and democracy. In *Re-Imagining Democracy in the Mediterranean, 1780-1860*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198798163.003.0008>
- Prakash, R. S., Voss, M. W., Erickson, K. I., & Kramer, A. F. (2015). Physical Activity and Cognitive Vitality. *Annual Review of Psychology*. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010814-015249>
- Rasmussen, M., & Laumann, K. (2014). The role of exercise during adolescence on adult happiness and mood. *Leisure Studies*, 33(4), 341–356. <https://doi.org/10.1080/02614367.2013.798347>
- Ratten, V., & Ratten, H. (2011). International sport marketing: Practical and future research implications. *Journal of Business and Industrial Marketing*. <https://doi.org/10.1108/08858621111179886>
- Rijsdorp, K. (1973). ICHPER Presidential Address. In S. Swanpo & M. W. Sie (Eds.), *Health, Physical Education, and Recreation for National Development - The Sixteenth International Congress of The International Council on Health, Physical Education, and Recreation - Sanur Denpasar, July 29 - August 3* (pp. 10–14). Jakarta: The Directorate General of Sport and Youth - Ministry of Education and Culture.
- Roetert, E. P. (2019). *Physical literacy in the United States. Physical Literacy across the World*. <https://doi.org/10.4324/9780203702697-14>
- Rosana, F. C. (2019, October 7). Wamenkeu beberkan penyebab BPJS kesehatan defisit Rp 32 triliun [The Deputy Minister of Finance explained the cause of the National Health Insurance deficit of Rp 32 trillion]. *Tempo.Co*, p. 1. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/1256903/>
- Ryff, C. D., & Singer, B. (1996). Psychological well-being: Meaning, measurement, and implications for psychotherapy research. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 65(1), 14–23. <https://doi.org/10.1159/000289026>
- Samouilidu, E., PaciĆ, S., NikiĆ, R., & Eminović, F. (2016). Physical activity and quality of life of older adults. In F. Eminovic & M. Dopsaj (Eds.), *Physical Activity Effects on the Anthropological Status of Children, Youth and Adults*. Nova Science Pub Inc.

- <https://doi.org/10.1249/00005768-200505001-01096>
- Santrock, J. W. (2017). *Life-span development* (13th ed.). McGraw-Hill.
- Sapkota, J. B., & Neupane, P. (2020). Sport for Development and Peace (SDP) Organisations and the Sustainable Development Goals (SDGs) of Nepal. *Global Social Welfare*.
<https://doi.org/10.1007/s40609-018-0129-5>
- Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. Geneva: World Economic Forum.
- Siedentop, D. (1998). What is Sport Education and How Does it Work? *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*. <https://doi.org/10.1080/07303084.1998.10605528>
- Siedentop, D. L. (2009). National plan for physical activity: Education sector. *Journal of Physical Activity and Health*. <https://doi.org/10.1123/jpah.6.s2.s168>
- Siregar, M. F., & Harsuki. (2003). *Sejarah olahraga Indonesia*. Jakarta: Dirjen Olahraga - Depdiknas.
- Skinner, J., Zakus, D. H., & Cowell, J. (2008). Development through Sport: Building Social Capital in Disadvantaged Communities. *Sport Management Review*.
[https://doi.org/10.1016/S1441-3523\(08\)70112-8](https://doi.org/10.1016/S1441-3523(08)70112-8)
- Sport England. (2016). *Towards an active nation: Strategy 2016-2021*. Sport England. Retrieved from <https://www.activehw.co.uk/uploads/sport-england-towards-an-active-nation.pdf>
- Stewart, B. (2007). *Sport funding and finance*. Oxford: Elsevier.
- Tam, M. (2014). Outcomes-based approach to quality assessment and curriculum improvement in higher education. *Quality Assurance in Education*. <https://doi.org/10.1108/QAE-09-2011-0059>
- The WHOQOL Group. (1998). Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF Quality of Life Assessment. *Psychological Medicine*, 28, 551–558.
<https://doi.org/10.5.12>
- U.S. Department of Health and Human Services. (2003). *Preventing obesity and chronic diseases through good nutrition and physical activity*. Retrieved from <http://www.cdc.gov/nccdphp/publications/factsheets/prevention/obesity.htm>.
- UNDP. (2015). *Human Development Report 2015 - Work for human development - Guinea Bissau*. United Nations for Development Programs. Retrieved from http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/GNB.pdf
- United Nations. (2007a). Report on the international year of sport and physical education, 2005. *Choice Reviews Online*. <https://doi.org/10.5860/choice.45-0026>
- United Nations. (2007b). Women, gender equality and sport. *Women2000 and Beyond*.
- United Nations. (2016). *Human Development Report: Human development for everyone. United Nations Development Programme*. <https://doi.org/eISBN:978-92-1-060036-1>
- United Nations General Assembly. (2003). Sport as a means to promote education, health, development and peace. *Official Records of the General Assembly, Fifty-Eighth Session, Plenary Meetings*.
- Vuik, S., Lerouge, A., Guillemette, Y., Feigl, A., & Aldea, A. (2019). The economic burden of obesity. <https://doi.org/10.1787/6cc2aacc-en>
- Whitehead, M. (2013). Definition of Physical Literacy and Clarification of related Issues. *ICSSPE Bulletin*. <https://doi.org/1728-5909>
- WHO. (2008). Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2008-2013. *Geneva: World Health Organization*.
- WHO. (2015). Physical activity strategy for the WHO European Region 2016-2025. *Organización Mundial de La Salud*.

- WHO. (2016). Obesity and overweight: Fact sheet. *WHO Media Centre*.
- WHO. (2017). *Draft WHO global action plan on physical activity 2018 - 2030*. Who.
- WHO. (2019). Facts and figures on childhood obesity. *Commission on Ending Childhood Obesity*.
- World Bank. (2015). *Certification and beyond: An empirical evaluation of the teacher certification program and education quality improvements in Indonesia*. Jakarta.
- World Bank. (2020). *Revealing how Indonesia's Subregional Government spend their money on education*. Washington, DC: World Bank.
- World Health Organization. (2004). The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF. *World Health Organization*.
- World Health Organization. (2012). *Programme on mental health: WHOQOL User Manual* (No. WHO/MNH/MHP/98.4.). https://doi.org/10.1007/SpringerReference_28001
- World Health Organization. (2015). Physical Inactivity: A Global Public Health Problem. Retrieved from <https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/inactivity-global-health-problem/en/>
- World Health Organization. (2018). *Noncommunicable Diseases Country Profiles 2018*. World Health Organization. <https://doi.org/16/j.jad.2010.09.007>
- Wu, X. Y., Han, L. H., Zhang, J. H., Luo, S., Hu, J. W., & Sun, K. (2017). The influence of physical activity, sedentary behavior on health-related quality of life among the general population of children and adolescents: A systematic review. *PLoS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187668>
- Yin, et al. (2020). Linking Esports to health risks and benefits: Current knowledge and future research needs. *Journal of Sport and Health Science*, 9, 485–488. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jshs.2020.04.006>
- Yuki, A., Lee, S., Kim, H., Kozakai, R., Ando, F., & Shimokata, H. (2012). Relationship between physical activity and brain atrophy progression. *Medicine and Science in Sports and Exercise*. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3182667d1d>
- Zambrano-Monserrate, M. A., Ruano, M. A., & Sanchez-Alcalde, L. (2020). Indirect effects of COVID-19 on the environment. *Science of the Total Environment*. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138813>
- Zhang, J., & Chaaban, J. (2013). The economic cost of physical inactivity in China. *Preventive Medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2012.11.010>
- Zhou, R., & Kaplanidou, K. (2018). Building social capital from sport event participation: An exploration of the social impacts of participatory sport events on the community. *Sport Management Review*, 21(5), 491–503. <https://doi.org/10.1016/J.SMR.2017.11.001>
- Zubala, A., MacGillivray, S., Frost, H., Kroll, T., Skelton, D. A., Gavine, A., ... Morris, J. (2017). Promotion of physical activity interventions for community dwelling older adults: A systematic review of reviews. *PLoS ONE*, 12(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180902>

Lampiran

1. SDI Menurut Provinsi

No	PROVINSI	DIMENSI									SDI
		SDM	RT	LF	PART	KEB	KS	PP	PERF	EKO	
1	Aceh	0,097	1,708	0,607	0,377	0,260	0,427	0,549	0,387	0,664	0,564
2	Bali	0,128	0,206	0,555	0,433	0,267	0,413	0,509	0,667	0,533	0,412
3	Banten	0,017	0,099	0,517	0,229	0,190	0,417	0,528	0,244	0,500	0,305
4	Bengkulu	0,104	0,772	0,608	0,267	0,192	0,432	0,559	0,288	0,500	0,414
5	DI Yogyakarta	0,124	0,084	0,497	0,253	0,154	0,422	0,526	0,414	0,507	0,331
6	DKI Jakarta	0,033	0,231	0,545	0,190	0,140	0,417	0,524	0,912	0,501	0,388
7	Gorontalo	0,088	0,052	0,565	0,233	0,320	0,446	0,581	0,547	0,544	0,375
8	Jambi	0,073	1,651	0,625	0,411	0,239	0,409	0,541	0,336	0,793	0,564
9	Jawa Barat	0,042	0,160	0,542	0,201	0,192	0,424	0,544	0,848	0,537	0,388
10	Jawa Tengah	0,037	0,307	0,535	0,276	0,183	0,414	0,524	0,289	0,547	0,346
11	Jawa Timur	0,045	0,328	0,550	0,287	0,160	0,419	0,528	1,000	0,555	0,430
12	Kalbar	0,069	0,519	0,540	0,226	0,174	0,416	0,552	0,298	0,559	0,373
13	Kalsel	0,046	0,368	0,538	0,276	0,198	0,423	0,540	0,262	0,503	0,350
14	Kalteng	0,173	1,267	0,534	0,238	0,182	0,399	0,534	0,124	0,510	0,440
15	Kaltim	0,043	0,223	0,597	0,348	0,240	0,420	0,523	0,413	0,670	0,386
16	Kaltara	0,063	0,018	0,474	0,250	0,114	0,451	0,513	0,205	0,417	0,278
17	Kep. Babel	0,166	1,434	0,574	0,367	0,265	0,409	0,515	0,116	0,667	0,501
18	Kep. Riau	0,191	0,077	0,636	0,527	0,199	0,387	0,550	0,318	0,893	0,420
19	Lampung	0,022	0,498	0,564	0,310	0,237	0,410	0,536	0,469	0,614	0,407
20	Maluku	0,092	0,718	0,603	0,517	0,391	0,439	0,572	0,600	0,917	0,539
21	Maluku Utara	0,099	0,862	0,632	0,478	0,440	0,475	0,634	0,000	0,833	0,495
22	NTB	0,138	0,164	0,544	0,321	0,237	0,416	0,538	0,668	0,467	0,388
23	NTT	0,073	0,676	0,573	0,336	0,292	0,420	0,539	0,411	0,526	0,427
24	Papua	0,071	0,246	0,563	0,279	0,228	0,448	0,537	0,479	0,725	0,397
25	Papua Barat	0,043	0,037	0,522	0,250	0,349	0,455	0,587	0,137	0,700	0,342
26	Riau	0,030	0,398	0,581	0,435	0,214	0,421	0,538	0,651	0,610	0,431
27	Sulbar	0,134	1,339	0,560	0,200	0,247	0,407	0,513	0,003	0,356	0,418
28	Sulsel	0,060	0,790	0,591	0,367	0,249	0,411	0,528	0,253	0,586	0,426
29	Sulteng	0,046	0,348	0,640	0,467	0,296	0,409	0,574	0,233	0,742	0,417
30	Sultra	0,077	0,625	0,538	0,438	0,223	0,438	0,512	0,228	0,662	0,416
31	Sulut	0,075	0,209	0,557	0,472	0,269	0,403	0,542	0,216	0,700	0,383
32	Sumbar	0,135	0,314	0,584	0,288	0,185	0,423	0,553	0,264	0,502	0,361
33	Sumsel	0,053	0,155	0,590	0,335	0,235	0,419	0,539	0,385	0,595	0,367
34	Sumut	0,051	0,380	0,557	0,283	0,230	0,417	0,545	0,429	0,525	0,380

2. SDM Olahraga Menurut Provinsi

No	PROVINSI	SDM		NILAI AKTUAL	INDEKS
		PENDUDUK >5 TAHUN	JUMLAH SDM		
1	Aceh	232.046	112	0,000483	0,097
2	Bali	1.257.276	803	0,000639	0,128
3	Banten	2.181.483	184	0,000084	0,017
4	Bengkulu	59.374	31	0,000522	0,104
5	DI Yogyakarta	393.489	243	0,000618	0,124
6	DKI Jakarta	3.376.882	554	0,000164	0,033
7	Gorontalo	29.391	13	0,000442	0,088
8	Jambi	516.517	188	0,000364	0,073
9	Jawa Barat	7.451.152	1.576	0,000212	0,042
10	Jawa Tengah	4.926.763	916	0,000186	0,037
11	Jawa Timur	4.667.744	1.055	0,000226	0,045
12	Kalbar	423.893	147	0,000347	0,069
13	Kalsel	290.490	67	0,000231	0,046
14	Kalteng	99.181	86	0,000867	0,173
15	Kaltim	585.666	127	0,000217	0,043
16	Kaltara	79.510	25	0,000314	0,063
17	Kep. Babel	98.855	82	0,000829	0,166
18	Kep. Riau	97.539	93	0,000953	0,191
19	Lampung	1.287.318	140	0,000109	0,022
20	Maluku	99.647	46	0,000462	0,092
21	Maluku Utara	18.247	9	0,000493	0,099
22	NTB	539.841	372	0,000689	0,138
23	NTT	297.899	108	0,000363	0,073
24	Papua	129.011	46	0,000357	0,071
25	Papua Barat	18.731	4	0,000214	0,043
26	Riau	664.104	98	0,000148	0,030
27	Sulbar	32.864	22	0,000669	0,134
28	Sulsel	551.083	165	0,000299	0,060
29	Sulteng	152.291	35	0,000230	0,046
30	Sultra	103.780	40	0,000385	0,077
31	Sulut	122.112	46	0,000377	0,075
32	Sumbar	342.743	231	0,000674	0,135
33	Sumsel	701.291	185	0,000264	0,053
34	Sumut	1.260.499	322	0,000255	0,051

3. Ruang Terbuka Olahraga Menurut Provinsi

No	PROVINSI	RUANG TERBUKA		NILAI AKTUAL	INDEKS
		PENDUDUK >5TAHUN	LUASAN		
1	Aceh	71.284	11.925	5,978	1,708
2	Bali	59.851	83.127	0,720	0,206
3	Banten	106.141	305.979	0,347	0,099
4	Bengkulu	12.852	4.759	2,701	0,772
5	DI Yogyakarta	26.462	90.517	0,292	0,084
6	DKI Jakarta	650.420	803.095	0,810	0,231
7	Gorontalo	530	2.910	0,182	0,052
8	Jambi	123.753	21.411	5,780	1,651
9	Jawa Barat	609.255	1.089.270	0,559	0,160
10	Jawa Tengah	521.372	485.123	1,075	0,307
11	Jawa Timur	539.345	470.123	1,147	0,328
12	Kalbar	147.938	81.513	1,815	0,519
13	Kalsel	25.472	19.801	1,286	0,368
14	Kalteng	34.828	7.856	4,433	1,267
15	Kaltim	48.740	62.528	0,779	0,223
16	Kaltara	1.087	16.900	0,064	0,018
17	Kep. Babel	55.210	11.002	5,018	1,434
18	Kep. Riau	6.694	24.989	0,268	0,077
19	Lampung	111.486	63.959	1,743	0,498
20	Maluku	27.529	10.952	2,514	0,718
21	Maluku Utara	7.312	2.423	3,018	0,862
22	NTB	99.468	173.025	0,575	0,164
23	NTT	68.814	29.080	2,366	0,676
24	Papua	31.057	36.036	0,862	0,246
25	Papua Barat	620	4.807	0,129	0,037
26	Riau	128.477	92.209	1,393	0,398
27	Sulbar	14.851	3.169	4,686	1,339
28	Sulsel	143.151	51.786	2,764	0,790
29	Sulteng	29.021	23.827	1,218	0,348
30	Sultra	13.162	6.016	2,188	0,625
31	Sulut	20.700	28.268	0,732	0,209
32	Sumbar	147.303	134.218	1,097	0,314
33	Sumsel	59.643	110.147	0,541	0,155
34	Sumut	164.783	123.801	1,331	0,380

4. Literasi Fisik Menurut Provinsi

No	Provinsi	SOAL BENAR			RATA-RATA		NILAI AKTUAL	INDEKS
		Frek	Dur	Intens	Pengetahuan	Sikap Perilaku		
1	Aceh	22,82%	52,56%	64,62%	2,867	3,847	3,427	0,607
2	Bali	27,27%	56,06%	52,42%	2,810	3,525	3,219	0,555
3	Banten	16,35%	37,50%	56,67%	2,474	3,516	3,069	0,517
4	Bengkulu	20,00%	53,33%	70,00%	2,911	3,822	3,431	0,608
5	DI.Yogyakarta	16,33%	43,33%	47,00%	2,422	3,410	2,987	0,497
6	DKI Jakarta	15,77%	56,15%	54,36%	2,684	3,555	3,182	0,545
7	Gorontalo	27,78%	58,89%	50,00%	2,822	3,589	3,260	0,565
8	Jambi	28,15%	52,22%	71,48%	3,025	3,858	3,501	0,625
9	Jawa Barat	15,23%	51,22%	57,51%	2,653	3,555	3,168	0,542
10	Jawa Tengah	19,30%	49,07%	54,57%	2,639	3,513	3,139	0,535
11	Jawa Timur	19,39%	50,67%	57,95%	2,707	3,572	3,201	0,550
12	Kalbar	21,03%	49,49%	56,15%	2,689	3,515	3,161	0,540
13	Kalsel	17,88%	46,36%	54,55%	2,584	3,578	3,152	0,538
14	Kalteng	12,38%	49,05%	55,24%	2,556	3,569	3,135	0,534
15	Kaltim	22,96%	54,07%	65,56%	2,901	3,756	3,390	0,597
16	Kaltara	26,67%	43,33%	40,00%	2,467	3,221	2,898	0,474
17	Kep. Babel	22,50%	38,33%	60,00%	2,611	3,808	3,295	0,574
18	Kep. Riau	36,67%	32,00%	79,33%	2,973	3,972	3,544	0,636
19	Lampung	18,41%	50,00%	61,43%	2,731	3,649	3,256	0,564
20	Maluku	20,83%	40,00%	64,17%	2,667	3,971	3,412	0,603
21	Maluku Utara	32,22%	47,78%	66,67%	2,956	3,956	3,527	0,632
22	NTB	23,33%	46,41%	54,87%	2,662	3,559	3,174	0,544
23	NTT	23,81%	47,62%	54,29%	2,676	3,755	3,293	0,573
24	Papua	20,00%	46,25%	56,25%	2,633	3,713	3,250	0,563
25	Papua Barat	18,33%	21,67%	50,00%	2,200	3,754	3,088	0,522
26	Riau	26,08%	43,92%	62,94%	2,773	3,736	3,323	0,581
27	Sulbar	35,56%	47,78%	48,89%	2,763	3,597	3,240	0,560
28	Sulsel	19,09%	50,76%	64,70%	2,794	3,788	3,362	0,591
29	Sulteng	25,42%	48,75%	67,92%	2,894	4,061	3,561	0,640
30	Sultra	22,86%	45,24%	53,81%	2,625	3,549	3,153	0,538
31	Sulut	22,22%	50,00%	46,67%	2,585	3,711	3,229	0,557
32	Sumbar	18,81%	55,48%	64,29%	2,848	3,701	3,335	0,584
33	Sumsel	25,71%	47,14%	65,24%	2,841	3,751	3,361	0,590
34	Sumut	16,57%	48,43%	59,17%	2,656	3,657	3,228	0,557

5. Tingkat Partisipasi Olahraga Menurut Provinsi

No	PROVINSI	AKTIVITAS >2 KALI PER MINGGU			NILAI AKTUAL	INDEKS
		11-19	20-44	45-60		
1	Aceh	0,478	0,384	0,258	37,692	0,377
2	Bali	0,545	0,435	0,345	43,333	0,433
3	Banten	0,235	0,230	0,223	22,917	0,229
4	Bengkulu	0,235	0,253	0,333	26,667	0,267
5	DI.Yogyakarta	0,217	0,238	0,313	25,333	0,253
6	DKI Jakarta	0,173	0,202	0,179	18,974	0,190
7	Gorontalo	0,263	0,240	0,190	23,333	0,233
8	Jambi	0,486	0,435	0,245	41,111	0,411
9	Jawa Barat	0,256	0,202	0,154	20,081	0,201
10	Jawa Tengah	0,380	0,256	0,230	27,558	0,276
11	Jawa Timur	0,337	0,289	0,241	28,721	0,287
12	Kalbar	0,337	0,201	0,176	22,564	0,226
13	Kalsel	0,348	0,276	0,222	27,576	0,276
14	Kalteng	0,333	0,157	0,314	23,810	0,238
15	Kaltim	0,407	0,390	0,214	34,815	0,348
16	Kaltara	0,313	0,192	0,278	25,000	0,250
17	Kep. Babel	0,345	0,450	0,226	36,667	0,367
18	Kep. Riau	0,621	0,476	0,564	52,667	0,527
19	Lampung	0,401	0,311	0,230	30,952	0,310
20	Maluku	0,618	0,516	0,375	51,667	0,517
21	Maluku Utara	0,481	0,563	0,200	47,778	0,478
22	NTB	0,342	0,340	0,265	32,051	0,321
23	NTT	0,241	0,393	0,294	33,571	0,336
24	Papua	0,316	0,287	0,147	27,917	0,279
25	Papua Barat	0,222	0,294	0,125	25,000	0,250
26	Riau	0,515	0,474	0,296	43,529	0,435
27	Sulbar	0,250	0,267	0,040	20,000	0,200
28	Sulsel	0,385	0,370	0,337	36,667	0,367
29	Sulteng	0,533	0,429	0,453	46,667	0,467
30	Sultra	0,488	0,463	0,356	43,810	0,438
31	Sulut	0,480	0,535	0,341	47,222	0,472
32	Sumbar	0,290	0,284	0,294	28,810	0,288
33	Sumsel	0,339	0,353	0,296	33,492	0,335
34	Sumut	0,341	0,280	0,244	28,333	0,283

6. Tingkat Kebugaran Menurut Provinsi

No	PROVINSI	KELOMPOK USIA			NILAI AKTUAL	INDEKS
		11-19	20-44	45-60		
1	Aceh	30,432	29,113	24,985	28,411	0,260
2	Bali	30,459	29,660	24,821	28,650	0,267
3	Banten	27,647	26,379	24,308	26,178	0,190
4	Bengkulu	27,797	26,714	23,793	26,254	0,192
5	DI Yogyakarta	26,092	25,493	23,094	25,043	0,154
6	DKI Jakarta	25,891	24,932	22,545	24,575	0,140
7	Gorontalo	32,000	31,538	26,329	30,351	0,320
8	Jambi	30,169	28,163	24,492	27,747	0,239
9	Jawa Barat	27,635	26,726	23,951	26,259	0,192
10	Jawa Tengah	27,963	26,044	23,733	25,946	0,183
11	Jawa Timur	27,104	25,394	22,974	25,217	0,160
12	Kalbar	27,508	26,128	22,936	25,675	0,174
13	Kalsel	27,536	27,022	24,100	26,420	0,198
14	Kalteng	28,959	26,062	22,616	25,925	0,182
15	Kaltim	29,056	28,001	26,000	27,764	0,240
16	Kaltara	24,144	24,215	22,417	23,748	0,114
17	Kep. Babel	30,448	28,896	26,081	28,580	0,265
18	Kep. Riau	28,966	26,749	23,451	26,479	0,199
19	Lampung	29,938	28,358	24,021	27,669	0,237
20	Maluku	36,789	32,967	27,775	32,624	0,391
21	Maluku Utara	30,036	34,889	36,893	34,177	0,440
22	NTB	29,244	28,334	24,885	27,699	0,237
23	NTT	31,027	29,571	27,618	29,446	0,292
24	Papua	28,067	28,500	24,456	27,381	0,228
25	Papua Barat	33,050	32,685	26,625	31,261	0,349
26	Riau	29,343	27,368	23,735	26,953	0,214
27	Sulbar	29,190	29,680	23,460	28,003	0,247
28	Sulsel	29,816	28,660	25,119	28,064	0,249
29	Sulteng	30,124	30,647	26,868	29,572	0,296
30	Sultra	27,151	27,765	26,322	27,251	0,223
31	Sulut	31,596	28,773	25,657	28,700	0,269
32	Sumbar	28,686	26,140	23,088	26,014	0,185
33	Sumsel	30,315	27,750	24,699	27,628	0,235
34	Sumut	29,235	27,902	24,818	27,464	0,230

7. Kesehatan Fisik dan Kesejahteraan Psikis Menurut Provinsi

No	PROVINSI	KESEHATAN		NILAI AKTUAL	INDEKS
		FISIK	PSIKIS		
1	Aceh	2,715	2,700	2,707	0,425
2	Bali	2,670	2,631	2,651	0,408
3	Banten	2,711	2,624	2,667	0,406
4	Bengkulu	2,700	2,753	2,727	0,438
5	DI Yogyakarta	2,706	2,671	2,688	0,418
6	DKI Jakarta	2,701	2,635	2,668	0,409
7	Gorontalo	2,726	2,844	2,785	0,461
8	Jambi	2,690	2,579	2,635	0,395
9	Jawa Barat	2,714	2,674	2,694	0,419
10	Jawa Tengah	2,686	2,625	2,656	0,406
11	Jawa Timur	2,687	2,666	2,676	0,416
12	Kalbar	2,712	2,613	2,662	0,403
13	Kalsel	2,681	2,700	2,690	0,425
14	Kalteng	2,694	2,495	2,594	0,374
15	Kaltim	2,701	2,658	2,680	0,415
16	Kaltara	2,750	2,856	2,803	0,464
17	Kep. Babel	2,681	2,594	2,638	0,399
18	Kep. Riau	2,593	2,502	2,548	0,376
19	Lampung	2,651	2,629	2,640	0,407
20	Maluku	2,786	2,722	2,754	0,431
21	Maluku Utara	3,044	2,752	2,898	0,438
22	NTB	2,702	2,628	2,665	0,407
23	NTT	2,793	2,563	2,678	0,391
24	Papua	2,808	2,774	2,791	0,443
25	Papua Barat	2,806	2,833	2,819	0,458
26	Riau	2,721	2,646	2,683	0,411
27	Sulbar	2,667	2,589	2,628	0,397
28	Sulsel	2,706	2,585	2,645	0,396
29	Sulteng	2,675	2,593	2,634	0,398
30	Sultra	2,811	2,692	2,752	0,423
31	Sulut	2,657	2,567	2,612	0,392
32	Sumbar	2,726	2,655	2,690	0,414
33	Sumsel	2,706	2,648	2,677	0,412
34	Sumut	2,686	2,654	2,670	0,413

8. Resilien dan Modal Sosial Menurut Provinsi

No	PROVINSI	PERKEMBANGAN PERSONAL		NILAI AKTUAL	INDEKS
		RISILIEN	MODAL SOSIAL		
1	Aceh	3,310	3,084	3,197	0,549
2	Bali	3,414	2,662	3,038	0,509
3	Banten	3,351	2,873	3,112	0,528
4	Bengkulu	3,367	3,102	3,234	0,559
5	DI Yogyakarta	3,377	2,831	3,104	0,526
6	DKI Jakarta	3,312	2,881	3,097	0,524
7	Gorontalo	3,437	3,215	3,326	0,581
8	Jambi	3,309	3,021	3,165	0,541
9	Jawa Barat	3,367	2,982	3,175	0,544
10	Jawa Tengah	3,351	2,840	3,095	0,524
11	Jawa Timur	3,352	2,875	3,113	0,528
12	Kalbar	3,472	2,944	3,208	0,552
13	Kalsel	3,329	2,987	3,158	0,540
14	Kalteng	3,259	3,010	3,134	0,534
15	Kaltim	3,309	2,872	3,090	0,523
16	Kaltara	3,339	2,767	3,053	0,513
17	Kep. Babel	3,322	2,797	3,060	0,515
18	Kep. Riau	3,440	2,960	3,200	0,550
19	Lampung	3,340	2,947	3,144	0,536
20	Maluku	3,425	3,147	3,286	0,572
21	Maluku Utara	3,559	3,511	3,535	0,634
22	NTB	3,324	2,982	3,153	0,538
23	NTT	3,350	2,963	3,157	0,539
24	Papua	3,354	2,942	3,148	0,537
25	Papua Barat	3,622	3,072	3,347	0,587
26	Riau	3,350	2,954	3,152	0,538
27	Sulbar	3,285	2,822	3,054	0,513
28	Sulsel	3,319	2,905	3,112	0,528
29	Sulteng	3,465	3,128	3,297	0,574
30	Sultra	3,167	2,929	3,048	0,512
31	Sulut	3,439	2,894	3,167	0,542
32	Sumbar	3,317	3,110	3,213	0,553
33	Sumsel	3,353	2,956	3,154	0,539
34	Sumut	3,393	2,971	3,182	0,545

9. Capaian Olahraga Prestasi Menurut Provinsi

No	PROVINSI	JUMLAH ATLET	PEROLEHAN MEDALI			NILAI AKTUAL	INDEKS
			EMS	PRK	PRG		
1	Aceh	128	11	7	11	0,6797	0,3866
2	Bali	237	28	25	53	1,1308	0,6670
3	Banten	269	10	15	26	0,4498	0,2437
4	Bengkulu	46	1	4	7	0,5217	0,2884
5	DI Yogyakarta	130	8	12	18	0,7231	0,4135
6	DKI Jakarta	608	111	91	99	1,5247	0,9117
7	Gorontalo	16	2	1	2	0,9375	0,5468
8	Jambi	122	6	10	13	0,5984	0,3360
9	Jawa Barat	770	133	105	115	1,4221	0,8480
10	Jawa Tengah	651	27	47	64	0,5223	0,2887
11	Jawa Timur	543	110	89	88	1,6667	1,0000
12	Kalbar	67	3	5	6	0,5373	0,2981
13	Kalsel	123	4	9	12	0,4797	0,2623
14	Kalteng	128	2	6	5	0,2578	0,1244
15	Kaltim	368	25	33	42	0,7228	0,4134
16	Kaltara	31	1	2	1	0,3871	0,2047
17	Kep. Babel	78	1	2	8	0,2436	0,1155
18	Kep. Riau	51	2	5	4	0,5686	0,3176
19	Lampung	138	14	10	12	0,8116	0,4686
20	Maluku	42	5	4	6	1,0238	0,6005
21	Maluku Utara	52	0	0	3	0,0577	0,0000
22	NTB	106	15	11	12	1,1321	0,6677
23	NTT	89	5	10	9	0,7191	0,4111
24	Papua	923	93	66	102	0,8288	0,4793
25	Papua Barat	259	3	14	15	0,2780	0,1369
26	Riau	182	21	25	21	1,1044	0,6505
27	Sulbar	32	0	0	2	0,0625	0,0030
28	Sulsel	230	11	13	13	0,4652	0,2533
29	Sulteng	60	1	5	6	0,4333	0,2335
30	Sultra	106	5	5	5	0,4245	0,2280
31	Sulut	121	4	6	11	0,4050	0,2158
32	Sumbar	195	8	12	18	0,4821	0,2637
33	Sumsel	102	8	4	17	0,6765	0,3846
34	Sumut	186	10	22	23	0,7473	0,4286

10. Ekonomi Olahraga Menurut Provinsi

No	PROVINSI	KELOMPOK USIA			NILAI AKTUAL	INDEKS
		11-19	20-44	45-60		
1	Aceh	15,13%	37,44%	13,85%	66,410	0,664
2	Bali	12,12%	29,70%	11,52%	53,333	0,533
3	Banten	10,63%	27,71%	11,67%	50,000	0,500
4	Bengkulu	13,33%	27,33%	9,33%	50,000	0,500
5	DI.Yogyakarta	8,67%	27,33%	14,67%	50,667	0,507
6	DKI Jakarta	9,10%	27,69%	13,33%	50,128	0,501
7	Gorontalo	13,33%	34,44%	6,67%	54,444	0,544
8	Jambi	21,85%	44,07%	13,33%	79,259	0,793
9	Jawa Barat	11,73%	29,51%	12,47%	53,713	0,537
10	Jawa Tengah	11,98%	29,65%	13,10%	54,729	0,547
11	Jawa Timur	12,90%	30,10%	12,53%	55,522	0,555
12	Kalbar	11,28%	30,77%	13,85%	55,897	0,559
13	Kalsel	9,70%	29,70%	10,91%	50,303	0,503
14	Kalteng	14,76%	27,14%	9,05%	50,952	0,510
15	Kaltim	13,70%	39,26%	14,07%	67,037	0,670
16	Kaltara	15,00%	10,00%	16,67%	41,667	0,417
17	Kep. Babel	13,33%	35,00%	18,33%	66,667	0,667
18	Kep. Riau	18,67%	48,00%	22,67%	89,333	0,893
19	Lampung	13,17%	33,65%	14,60%	61,429	0,614
20	Maluku	24,17%	50,00%	17,50%	91,667	0,917
21	Maluku Utara	25,56%	45,56%	12,22%	83,333	0,833
22	NTB	12,05%	24,87%	9,74%	46,667	0,467
23	NTT	11,43%	27,86%	13,33%	52,619	0,526
24	Papua	29,17%	35,83%	7,50%	72,500	0,725
25	Papua Barat	21,67%	41,67%	6,67%	70,000	0,700
26	Riau	11,57%	36,08%	13,33%	60,980	0,610
27	Sulbar	6,67%	22,22%	6,67%	35,556	0,356
28	Sulsel	11,82%	33,03%	13,79%	58,636	0,586
29	Sulteng	23,33%	34,58%	16,25%	74,167	0,742
30	Sultra	12,86%	35,24%	18,10%	66,190	0,662
31	Sulut	18,89%	34,44%	16,67%	70,000	0,700
32	Sumbar	10,48%	26,67%	13,10%	50,238	0,502
33	Sumsel	15,08%	29,05%	15,40%	59,524	0,595
34	Sumut	12,04%	28,06%	12,41%	52,500	0,525